



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS DAMPAK PENGEMBANGAN PELABUHAN
PERIKANAN NUSANTARA (PPN) TERNATE TERHADAP
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
(Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kec. Kota Ternate Selatan
Kota Ternate)**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Ilmu Kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan**

**Disusun Oleh :
PRIYAGUS
NIM : 014914038**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU KELAUTAN
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul
Analisis Dampak Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate Terhadap
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kec, Kota Ternate
Selatan Kota Ternate) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka bersedia
menerima sanksi akademik.

Ternate, 29 April 2011

Yang menyatakan,



Priyagus

NIM. 014914038

ABSTRACT

The Analysis of the Impact of Ternate Fishery Port Towards The Level of The Welfare Coastal Communities.
(Case Study of Coastal Communities in the South Ternate District, Ternate City)

Priyagus
Universitas Terbuka
priyagusmmp2@gmail.com

Improving the livelihoods and welfare of fisherman and farmers, among others, can not be separated from the availability of fishing port and fish landing bases. While the facts on the ground indicate that the growth of total fishing fleet is positively correlated to the development of port and fish landing base. Development of fisheries infrastructure in form of Port of Fisheries/fish landing base has a strategic value in the context of economic development of fisheries. The presence of fisheries infrastructure in addition to supporting the efforts of traditional fisherman also have an important role in regional development.

This study aims to : (1) identify the roles and functions of fishery harbour of the archipelago of Ternate in order to support coastal communities and have influence on the level of welfare of coastal communities. (2) analyze the factors that influence the development of the archipelago fishing port of Ternate to be more beneficial to coastal communities (3) analyze the differences in well-being of coastal communities in this case fisherman and non fisherman who use fishing port of Ternate archipelago, and (4) analyzing the strategy of development of the archipelago fishing port of Ternate.

Development of fishing ports of the archipelago of (PPN) Ternate impact on the welfare of coastal communities, both positive and negative. Positive impact that an increase in business and employment opportunities (pro job) or new jobs for coastal communities, it affects the level of income (pro poor). The negative impact of fishery port development which occurred competition and social conflict. Prospect VAT Ternate fishing port archipelago development becomes more focused when developing fisheries port aligned with the estimated carrying capacity of coastal communities, goverment and business world for the betterment of fisheries livelihoods of coastal communities (pro-growth).

SWOT Analysis showed that internal and external factors are very influential on the policy development of Ternate Nusantara Fishery Port. Strategy in the future for improvement the welfare of coastal communities caan be put in 4 (four) alternative priority strategies : increase employment business and opportunities, improved quality of human resources, instutional improvement, and empowerment of coastal communities.

Key words : *impact, development, welfare, coastal communities*

ABSTRAK

Analisis Dampak Pengembangan PPN Ternate Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate).

Priyagus
Universitas Terbuka
priyagusmmp2@gmail.com

Peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan tidak terlepas antara lain dari ketersediaan pelabuhan perikanan dan pangkalan-pangkalan pendaratan ikan. Sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan jumlah armada perikanan cukup berkorelasi positif terhadap perkembangan jumlah pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan. Pembangunan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai nilai strategis dalam rangka pembangunan ekonomi perikanan. Kehadiran prasarana perikanan selain menunjang usaha nelayan tradisional juga mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengidentifikasi peranan dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dalam rangka mendukung usaha masyarakat pesisir dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir, (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate agar lebih bermanfaat terhadap masyarakat pesisir, (3) Menganalisis perbedaan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan dan non nelayan yang memanfaatkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, serta (4) menganalisis strategi pengembangan PPN Ternate.

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir, baik positif maupun negatif. Pengaruh positif yaitu terjadi peningkatan usaha dan kesempatan kerja (*pro job*) atau lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat pesisir, hal ini berpengaruh pada tingkat pendapatan (*pro poor*). Adapun pengaruh negatif dari pengembangan pelabuhan perikanan yaitu terjadi persaingan usaha dan konflik sosial. Prospek pengembangan PPN Ternate menjadi lebih terarah bila pengembangan pelabuhan perikanan diselaraskan dengan memperkirakan daya dukung masyarakat pesisir, pemerintah dan dunia usaha perikanan demi perbaikan taraf hidup masyarakat pesisir (*pro growth*).

Analisis SWOT menunjukkan bahwa faktor Internal dan Eksternal sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate. Strategi ke depan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir diperoleh 4 (empat) prioritas alternatif strategi yaitu : Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, Peningkatan kualitas SDM, Peningkatan kelembagaan, dan Pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kata Kunci : *dampak, pengembangan, tingkat kesejahteraan, masyarakat pesisir*

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : Analisis Dampak Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate)

Penyusun TAPM : Priyagus

NIM : 014914038

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan

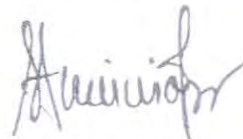
Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Nuraini Soleiman, M.Ed
NIP. 19540730 198601 2 001

Pembimbing I,



Dr. Sitti Masniah Djabir, S.Pi, M.P
NIP. 19730502 200501 2 010

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/Program
Magister Ilmu Kelautan,



Dra. Agnes P. Sudarmo, M.A
NIP.19631007 198903 2 001

Direktur Program Pascasarjana,



Sucrati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU KELAUTAN
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN**

PENGESAHAN

Nama : Priyagus
 NIM : 014914038
 Program Studi : Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan

Judul TAPM : Analisis Dampak Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate)

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka, pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 April 2011
 Waktu : 120 menit
 Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM:

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dra. Agnes P. Sudarmo, M.A



Penguji Ahli

Nama : Dr. Sugeng Hari Wisudo, MSc



Pembimbing I

Nama : Dr. Sitti Masniah Djabir, S.Pi, M.P



Pembimbing II

Nama : Dr. Nuraini Soleiman, M.Ed



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan dan anugerah-Nya, sehingga penulisan TAPM ini dapat terselesaikan. Penelitian dengan judul “Analisis Dampak Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate)” merupakan suatu studi kasus hubungan antara pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Selain itu merupakan salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Perikanan Universitas Terbuka.

Materi dalam TAPM ini diharapkan dapat menggambarkan proses terjadinya hubungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dalam ikatan Patron-Klien, serta bentuk ikatan Patron-Klien di tengah terus berlangsungnya proses diferensiasi sosial, komersialisasi ekonomi yang semakin menguat. Kajian dan evaluasi dari kasus ini diharapkan dapat juga memberikan tambahan pemahaman penulis dalam melihat dan menganalisis permasalahan serta dapat menyimpulkan kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate di Kecamatan Kota Ternate Selatan.

Proses penyelesaian TAPM ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

2. Dr. Sugeng Hari Wisudo, M.Sc, selaku Penguji Ahli..
3. Dra. Agnes P. Sudarmo, MA, selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Ilmu Kelautan, yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
4. Dr. Siti Masniah Djabir, S.Pi, M.P selaku pembimbing I, yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Dr. Nuraini Soleiman, M.Ed selaku pembimbing II, yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Ir. Mulyadi, M.Si, selaku Kepala UPBJJ UT Ternate, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis mengikuti program pendidikan.
7. Jabaludin Namsa, S.Pi, M.Si, selaku Penanggungjawab Program S2 UPBJJ UT Ternate.
8. Dwi Yuliono Rochayadi, A.Pi MM, selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program pendidikan.
9. Kepala Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Bastiong Talangame, Bastiong Karance, Mangga Dua, Kayu Merah, dan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan, yang telah membantu dan memfasilitasi kepada penulis.
10. Istri dan anak-anakku (Endang Pratnawati, Nurul Chomariah Agustin, Nuraeni Novianti, Nuridha Salzabila Febrianti, Nurasifa Meiningsih), yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
11. Orang Tua Tercinta S. Noersidi (Alm) dan Kamisem (Alm), Kakak dan adik-adikku tercinta.

12. Teman-teman sesama Mahasiswa Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih kurang sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk lebih sempurnanya tesis ini.

Ternate, April 2011

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Jenis Alat Tangkap Ikan yang Ada di Tiap Kecamatan di Kota Ternate	13
Tabel 2.2	Armada Penangkapan Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate.....	14
Tabel 2.3	Data Hasil Produk Olahan Perikanan di Kota Ternate	15
Tabel 3.1	Jenis Data, Variabel, Sumber dan Metode Yang Digunakan ...	34
Tabel 3.2	Variabel dan Indikator Faktor Peranan dan Fungsi PPN Ternate	37
Tabel 3.3	Variabel dan Indikator Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan PPN Ternate dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Yang Memanfaatkan PPN Ternate.....	38
Tabel 3.4	Variabel dan Indikator Faktor Strategi Pengembangan PPN Ternate.....	39
Tabel 3.5	Metode Analisis	40
Tabel 3.6	Bobot Rating Faktor Strategi Internal	43
Tabel 3.7	Bobot Rating Faktor Strategi Eksternal	44
Tabel 3.8	Strategi Yang Dihasilkan Dari Perpaduan Antara Faktor Strategi Internal dengan Eksternal	48
Tabel 3.9	Indikator Tingkat Kesejahteraan	47
Tabel 4.1	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Kota Ternate Selatan	56

Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Penduduk di Kecamatan Kota Ternate Selatan	56
Tabel 4.3	Penilaian Peranan PPN Ternate	58
Tabel 4.4	Pendaratan dan Nilai Ikan bulan Pebruari s/d Mei Tahun 2008 dan 2009	61
Tabel 4.5	Jumlah Pelayanan Air Bulan Pebruari s/d Mei Tahun 2008 dan 2009	63
Tabel 4.6	Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Bulan Pebruari 2009 s/d Mei Tahun 2008 dan 2009 Melalui KPN. Mina Sejahtera	64
Tabel 4.7	Penyaluran Es bulan Pebruari 2008 s/d Mei 2008 dan Pebruari 2009 s/d Mei 2009.....	65
Tabel 4.8	Jumlah Kapal yang Bertambat Pada Bulan Pebruari s/d Mei 2008 dan Pebruari s/d Mei 2009.....	67
Tabel 4.9	Se va Cold Storage di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Periode Bulan Pebruari s/ d Mei Tahun 2008 dan 2009.....	68
Tabel 4.10	Penggunaan Balai Pertemuan Nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2007 s/d Tahun 2008	71
Tabel 4.11	Penilaian Fungsi PPN Ternate	73
Tabel 4.12	Penerapan SLO/LBP oleh Satker Pengawasan SDKP PPN Ternate selama Tahun 2008	86
Tabel 4.13	Kinerja PPN Ternate dari Tahun 2003 s/d Tahun 2008	91

Tabel 4.14	Pendapatan Per Kapita Per Bulan di Kawasan PPN Ternate Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate	97
Tabel 4.15	Keadaan Tingkat Konsumsi Responden (nelayan) Per Kapita Per Bulan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate	99
Tabel 4.16	Keadaan Tingkat Pendidikan Responden	100
Tabel 4.17	Keadaan Tingkat Kesehatan Responden	102
Tabel 4.18	Kondisi Rumah Keluarga Responden	103
Tabel 4.19	Kondisi Fasilitas Rumah Keluarga Responden (Nelayan dan Pedagang)	104
Tabel 4.20	Kondisi Fasilitas Rumah Keluarga Responden (Pengolah)...	105
Tabel 4.21	Pendapatan Responden di Kawasan PPN Ternate Per Bulan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate	106
Tabel 4.22	Pengeluaran Responden di Kawasan PPN Ternate Per Bulan..	110
Tabel 4.23	Perbedaan Tingkat Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate	112
Tabel 4.24	Perbedaan Tingkat Pengeluaran Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate	113
Tabel 4.25	Perbedaan Tingkat Pendidikan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate	115
Tabel 4.26	Perbedaan Tingkat Kesehatan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate	116
Tabel 4.27	Perbedaan Tingkat Kondisi Perumahan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate	118

Tabel 4.28	Perbedaan Fasilitas Perumahan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate	119
Tabel 4.29	Distribusi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Masyarakat Pesisir di PPN Ternate	122
Tabel 4.30	Variabel Indikator Kesejahteraan, Jumlah Responden pada Setiap Kelompok Sesudah Pengembangan PPN Ternate	123
Tabel 4.31	Hasil Skor Faktor Strategi Internal	126
Tabel 4.32	Hasil Skor Faktor Strategi Eksternal	127
Tabel 4.33	Interaksi Antara Faktor Internal dan Eksternal	129

UNIVERSITAS TERBUKA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Universitas Terbuka
UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH (UPBJJ) TERNATE

Eks. Kantor Gapensi, Kelurahan Makasar Timur,
Kota Ternate Selatan, Maluku Utara
Telepon , Fax : (0921) 3110402
Home Page : <http://www.ut.ac.id>
E-mail : ut-ternate@upbjj.ut.ac.id

23 Mei 2009

No. : 172/H31.58/LL/2009
Lampiran : -
Perihal : Surat Permohonan Ijin Pengambilan Data
Penelitian Tesis Pascasarjana

Kepada Yth.

1. Walikota Ternate
2. Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Ternate
3. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi dan Kota Ternate
4. BPS Kota Ternate
5. Camat Kota Ternate Selatan

Dengan hormat

Bersama ini, Kami UPBJJUT Ternate menerangkan bahwa yang bersangkutan :

Nama : Priyagus.
NIM : 014914038
Program Studi : Magister Manajemen Perikanan (MMP).
Program : Pascasarjana UT

Telah memasuki Tahap Akhir Program di masa studinya dengan kegiatan penelitian lapangan yang berkaitan dengan tema Tesis yang diusulkannya. Untuk itu yang bersangkutan bermaksud untuk mengambil data penelitiannya di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Berkaitan dengan perihal tersebut kami pihak UPBJJ-UT Ternate, dengan segala hormat kepada Bapak/Ibu untuk dapat memeberikan ijin mahasiswa kami dalam hal dimaksud.

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu berkenaan memfasilitasi keperluan dari yang bermaksud.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Direktur Pascasarjana UT.
2. Kadiv. Program Studi MMP.

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Lampiran	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teori.....	7
A.1 Potensi Sumberdaya Perikanan	7
A.2 Keragaan Perikanan Kota Ternate	12
A.3 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan	15
A.3.1 Masyarakat Pesisir.....	15
A.3.2 Pendapatan Rumah Tangga.....	17
A.3.3 Kesejahteraan	17

A.3.4 Kondisi Ekonomi Nelayan.....	19
A.4 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).....	20
A.4.1 Peranan Pelabuhan Perikanan	22
A.4.2 Fungsi Pelabuhan	23
A.5 Kebijakan Pembangunan Perikanan	24
A.6 Pengembangan Wilayah Pesisir	25
B. Kerangka Berpikir	27
C. Definisi Operasional	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Desain Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Populasi dan Sampel	33
D. Tahapan Pelaksanaan Penelitian	35
E. Data dan Instrumentasi	36
F. Variabel dan Indikator Penelitian	37
G. Prosedur Pengumpulan Data	39
H. Metode Analisis Data	40
H.1 Analisis Identifikasi Peranan dan Fungsi Pelabuhan Perikanan.....	42
H.2 Analisis Strategi Pengembangan PPN Ternate.....	42
H.3 Analisis Perbedaan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir	46
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Kondisi Umum Wilayah	49
A.1 Letak Geografis	50
A.2 Topografi dan Geomorfologi	50
A.3 Klimatologi dan Cuaca	51
A.4 Hidro Oseanografi	52
B. Hasil dan Pembahasan	55

B.1 Kependudukan	55
B.2 Mata Pencaharian	55
B.3 Pendidikan dan Kesehatan	56
B.4 Prasarana dan Sarana	57
4. Peran dan Fungsi PPN Ternate	58
4.1 Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	58
4.1.1 Pelabuhan Perikanan Yang Berkaitan	
Dengan Aktivitas Produksi.....	60
a. Tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan.	60
b. Tempat untuk persiapan operasi penangkapan (mempersiapkan alat tangkap, bahan bakar, air, perbekalan ke laut, ataupun perbaikan kapal)....	61
b.1 Tempat mempersiapkan alat tangkap.....	61
b.2 Pelayanan air.....	62
b.3 Pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM).....	63
b.4 Penyaluran es	64
c. Tempat berlabuh dan bertambat kapal	66
4.1.2 Sebagai Pusat Distribusi	67
a. Tempat transaksi jual beli ikan	67
b. Terminal ikan hasil laut.....	68
4.1.3 Sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat Nelayan	69
a. Kehidupan nelayan	69
b. Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan	70
c. Lalu lintas dan jaringan informasi	
antara nelayan dan pihak luar	70
4.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	72
a. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.....	75

b. Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan	77
c. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	78
d. Pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan	80
e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan ...	82
f. Pelayanan bongkar muat.....	83
g. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan ..	84
h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan	85
i. Pelaksanaan kesyahbandaran	87
j. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan	88
k. Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (k3), kebakaran dan pencemaran)	89
k.1 Kebersihan.....	89
k.2 Ketertiban	89
k.3 Keamanan.....	90
4.3 Kinerja PPN Ternate dan Tingkat Pemanfaatan Oleh Masyarakat Pesisir.....	90
4.4 Perbedaan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir ..	94
4.4.1 Tingkat Pendapatan.....	95
4.4.2 Tingkat Konsumsi	97
4.4.3 Tingkat Pendidikan	99
4.4.4 Tingkat Kesehatan	101
4.4.5 Kondisi Rumah.....	102
4.4.6 Fasilitas Rumah	103
4.4.7 Pendapatan Rumah Tangga	105
4.4.8 Pengeluaran Rumah Tangga.....	108

4.5 Pengaruh Pengembangan PPN Ternate Terhadap	
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir	111
4.5.1 Indikator Tingkat Kesejahteraan Keluarga Masyarakat	
Pesisir di PPN Ternate	111
4.5.1.1 Tingkat Pendapatan Rumah Tangga	112
4.5.1.2 Tingkat Pengeluaran/Konsumsi Rumah Tangga ...	113
4.5.1.3 Tingkat Pendidikan Keluarga	114
4.5.1.4 Tingkat Kesehatan Keluarga	115
4.5.1.5 Kondisi Perumahan Keluarga	117
4.5.1.6 Fasilitas Perumahan Keluarga	119
4.5.2 Tingkat Kesejahteraan Keluarga di PPN Ternate	120
4.6 Strategi Pengembangan PPN Ternate Terhadap	
Masyarakat Pesisir	125
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	133
A. Simpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136
DAFTAR LAMPIRAN	139

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	28
Gambar 3.1 Peta Kota Ternate	33

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

		Hal
Lampiran 1	Kuesioner	139
Lampiran 2	Panduan untuk wawancara	145
Lampiran 3	Form Responden sebagai : Nelayan/Pedagang/Pengolah..	146
Lampiran 4	Surat Permohonan Ijin Pengambilan Data Penelitian Tesis Pascasarjana	148
Lampiran 5	Foto-foto Penelitian	149
Lampiran 6	Lay Out PPN Ternate.....	153

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya kelautan khususnya perikanan merupakan sumberdaya terbarukan atau sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*) yang cukup memiliki nilai strategis bagi upaya pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa potensi yang sebenarnya adalah potensi yang berkelanjutan (*sustainable*) untuk dilestarikan dan dimanfaatkan. Adanya kecenderungan pergeseran sebagian penduduk pedalaman dan daratan ke wilayah pesisir sebagai akibat dari makin menipisnya sumberdaya daratan menjadikan keberadaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekonomi semakin penting perannya (Dahuri, 2000). Selanjutnya pembangunan perikanan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan. Potensi sumberdaya perikanan laut di perairan Indonesia cukup besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut. Meskipun kenaikan produksi perikanan selama ini masih dapat dipertahankan atau mungkin dapat ditingkatkan, namun tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan laut masih belum merata. Sebagian wilayah telah mencapai tangkap lebih dan sebagian lagi masih belum termanfaatkan secara optimal (Dahuri, 2000).

Peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan tidak terlepas antara lain dari ketersediaan pelabuhan perikanan dan pangkalan-pangkalan pendaratan ikan. Sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan jumlah armada perikanan cukup berkorelasi positif terhadap perkembangan jumlah pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan. Pembangunan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai nilai strategis dalam rangka pembangunan ekonomi perikanan. Kehadiran prasarana perikanan selain menunjang usaha nelayan tradisional juga mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan daerah. Sesuai dengan fungsinya, bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) merupakan prasarana perikanan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum (*public utility*), oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh pihak pemerintah pusat (LKP, 2001).

Wilayah Kota Ternate memiliki karakteristik geografis spesifik dan sangat strategis sebagai titik sentral pembangunan global, serta didukung oleh ketersediaan potensi sumberdaya hayati dan jasa-jasa lingkungan yang cukup besar. Namun demikian, pertumbuhan dan perkembangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Ternate tidak cukup berlandaskan potensi, keunggulan komparatif dan kompetitif semata, melainkan memerlukan pendekatan sumberdaya berbasis lokal yang mencakup sumberdaya fisik-alam dan sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, dan sumberdaya sosial budaya. Karena itu diperlukan suatu pendekatan perencanaan terpadu yang benar-benar didasarkan pada potensi lokal, penguatan kelembagaan masyarakat nelayan,

pengembangan daya dukung sarana dan prasarana perikanan (Bappeda Kota Ternate, 2008).

Perkembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang dibangun pada tahun anggaran 1987/1988 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memiliki posisi strategis dengan frekuensi operasional yang cukup tinggi. Hal tersebut karena disamping nelayan-nelayan dari sekitar Kota Ternate, Kota Tidore, Kabupaten Halmahera Selatan hadir pula nelayan dari Propinsi Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, dengan rata-rata kunjungan kapal sebanyak 16 kapal per hari (DKP, 2009). Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate merupakan pelabuhan perikanan tipe B telah memiliki sarana dan prasarana berupa fasilitas pokok seperti lahan, jalan, dermaga ; fasilitas fungsional seperti tempat pelelangan ikan (TPI), Kantor Administrator serta fasilitas penunjang lainnya yang digunakan sebagai pelabuhan ekspor maupun sebagai pusat kegiatan ekonomi nelayan.

Prasarana dan sarana yang dimiliki pada saat sebelum pengembangan masih sangat minim (Lahan 4 Ha sebagian masih rawa, Dermaga I, Kantor I dan II, Pabrik Es kapasitas 5 ton, Pabrik es curah, cold storage kapasitas 20 ton, TPI, Tangki BBM solar kapasitas 50 ton, Tangki air tawar kapasitas 50 ton dan Perumahan/mess 6 unit), sehingga operasional pelabuhan juga masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan PPN Ternate baru ditingkatkan statusnya dari pelabuhan perikanan pantai (tipe C) menjadi pelabuhan perikanan nusantara (tipe B) dan akibat konflik horizontal, sehingga pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan masih terkendala oleh situasi yang kurang kondusif. Dengan adanya kondisi tersebut kinerja PPN Ternate masih tergolong rendah dan kurang

optimal, dan untuk meningkatkan kinerja tersebut diperlukan pengembangan prasarana dan sarana juga sumber daya manusia (SDM) yang mengelola baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai dengan kriteria pelabuhan perikanan Nusantara .

Kondisi masyarakat perikanan yang dilayani PPN Ternate dalam memanfaatkan fasilitas pelabuhan masih menemui masalah diantaranya : motivasi untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan masih rendah, tingkat produktivitas masih rendah akibat alat tangkap yang digunakan masih sederhana, sehingga masih membutuhkan bimbingan dan dukungan pemerintah. Demikian pula tingkat pendapatan masih relatif rendah sehingga berdampak terhadap tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Pengembangan PPN Ternate Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir**” (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate), untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh pada pengembangan PPN Ternate dan menentukan strategi pengembangannya.

B. Perumusan Masalah

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sebagai salah satu tempat pelabuhan perikanan di Kota Ternate telah melakukan aktivitasnya dan menunjukkan peningkatan kegiatan setiap tahunnya, namun dari aktivitas tersebut timbul berbagai permasalahan antara lain :

- a. Persepsi masyarakat nelayan tentang PPN Ternate yang belum sepenuhnya berperan sebagai pusat kegiatan dibidang (produksi, pendaratan, pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan).

- b. Terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh PPN Ternate sehingga fasilitas yang ada belum dapat menampung seluruh aktivitas nelayan yang memanfaatkan PPN Ternate dan lebih spesifik bahwa masyarakat nelayan disekitar PPN (di Kecamatan Kota Ternate Selatan) belum memperoleh manfaat secara maksimal dari keberadaan PPN itu sendiri sehingga tingkat pendapatan masyarakat sekitar PPN Ternate belum optimal.
- c. Terbatasnya kemampuan SDM aparatur maupun masyarakat pesisir sekitar PPN Ternate.

Untuk itu rumusan masalah diberikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran dan fungsi PPN Ternate untuk mendukung usaha/perekonomian masyarakat pesisir.
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan PPN Ternate terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir (nelayan dan non nelayan) yang memanfaatkan pengembangan PPN Ternate.
- c. Bagaimana strategi pengembangan PPN Ternate dalam meningkatkan operasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi peranan dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dalam rangka mendukung usaha masyarakat pesisir dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate agar lebih bermanfaat terhadap masyarakat pesisir (nelayan dan non nelayan).
3. Menganalisis perbedaan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan dan non nelayan yang memanfaatkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.
4. Menganalisis strategi pengembangan PPN Ternate, untuk meningkatkan operasional dalam menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perikanan tangkap.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan dalam perencanaan pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang terkait dengan daya dukung lingkungan. Di samping itu juga dapat memberi informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, khususnya masyarakat nelayan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

A.1 Potensi Sumberdaya Perikanan

Upaya peningkatan produksi perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terus mendorong pengembangan perikanan budidaya dan pengendalian perikanan tangkap dalam rangka pelestarian sumberdaya ikan. Perkembangan produksi perikanan selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2008 meningkat pertahunnya. Peningkatan produksi perikanan ini disumbang oleh peningkatan produksi perikanan budidaya yang mengalami peningkatan sebesar 14,84%. Jika dilihat dari jumlah produksinya, perikanan tangkap memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan perikanan budidaya. Dalam kurun waktu tahun 2006-2008 produksi perikanan mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 7,86% yakni dari 7,49 juta ton pada tahun 2008.

Pada tahun 2008, kontribusi produksi perikanan tangkap mencapai 59,47% terhadap produksi perikanan nasional, sedangkan produksi perikanan budidaya menyumbang 40,53%. Kontribusi produksi perikanan budidaya sejak tahun 2006 terus meningkat terhadap produksi perikanan secara nasional sebaliknya kontribusi produksi perikanan tangkap mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan produksi perikanan budidaya terhadap produksi perikanan nasional semakin penting dan sejalan dengan kebijakan

untuk menggalakkan pengembangan perikanan budidaya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya antara lain :

- a. bantuan sarana produksi budidaya ;
- b. pelepasan benih dan induk ikan unggul hasil riset ;
- c. bantuan bimbingan penyuluhan ;
- d. bantuan permodalan ;
- e. program subsidi benih.

Sedangkan pada bidang penangkapan telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi yakni melalui pemacuan stok (*restocking*) ikan di perairan umum dan pelaksanaan revitalisasi perikanan yang melingkupi restrukturisasi armada perikanan tangkap, pemanfaatan alat bantu, penataan sistem penangkapan ikan, penetapan *fishing ground* dan revitalisasi peraturan-pertauran penangkapan (DKP, 2009).

Perairan propinsi Maluku Utara memiliki potensi lestari perikanan sebesar 239.191,25 ton pertahun dari standing stok yang dimiliki sebesar 478.332,50 ton pertahun. Sampai dengan tahun 2006 pemanfaatan produksi baru mencapai 23,8% dari potensi lestari. Dari produksi yang dicapai tersebut nelayan kota Tidore kepulauan mempunyai kontribusi terbesar, yang memiliki 1.066 unit armada penangkapan dari berbagai jenis adalah sebesar 99.264 ton pertahun atau sebesar 41,50%.

Pengembangan investasi bidang perikanan sangat potensial, karena penangkapan ikan yang sampai dengan tahun 2006 baru mencapai 23,8% dari

potensi lestari. Di sisi lain peluang penanaman modal pada pengelolaan ikan masih sangat terbuka berupa pengalengan ikan, abon ikan, kecap ikan dan berbagai produk lainnya yang berbahan dasar hasil tangkapan laut. Pada saat ini pengolahan baru berupa pengawetan secara tradisional. Selain itu peluang investasi pada diversifikasi usaha dibidang sarana dan prasarana sangat terbuka seperti:

- Pengadaan dan peremajaan armada penangkapan ikan dengan pola PIR;
- Pengembangan *cool storage* dan pabrik Es;
- Pengembangan industri galangan/docing kapal perikanan (Bappeda Maluku Utara, 2007).

Potensi lestari perikanan Kota Ternate sebesar 47.838,25 ton/tahun dari *standing stock* yang dimiliki sebesar 71.757,38 ton yang terdiri dari ikan pelagis besar seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, cucut dan tenggiri serta ikan pelagis kecil seperti ikan layang dan tembang, ikan demersal meliputi ikan kakap merah, skuda, kakap sejati, ekor kuning, dan kerapu.

Pada tahun 2007 produksi baru mencapai 12.538,89 ton, dengan demikian tingkat pemanfaatan baru mencapai 26,21 % dari potensi lestari, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan masih *under exploitation*, sehingga peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan di Kota Ternate masih sangat terbuka.

Daerah penangkapan untuk pelagis besar (tuna dan cakalang) di perairan Kota Ternate meliputi perairan Pulau Hiri, Pulau Moti dan Pulau Batang Dua serta Laut Maluku. Dengan musim penangkapan sepanjang tahun, musim

puncak pada bulan Januari sampai dengan bulan April dan bulan September sampai dengan bulan Oktober. Untuk pelagis kecil dan ikan demersal daerah penangkapan disekitar Pulau Ternate, Pulau Moti, Pulau Hiri dan Pulau Tifure Batang Dua (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, 2008).

Berdasarkan laporan Dinas Kelautan dan Kota Ternate tahun 2008, bahwa ada beberapa jenis ikan komoditi unggulan yang menjadi peluang usaha/investasi di bidang penangkapan ikan, yaitu :

1. Ikan Pelagis Besar :

Jenis ikan pelagis besar yang dominan di perairan Kota Ternate meliputi jenis ikan tuna (*Thunnus spp*), cakalang (*Katsuwonus pelamis*), tenggiri (*Scomboramus spp*) dan cucut (*Flasmobranch*). Menurut laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate tahun 2009, bahwa pemanfaatan tuna dan cakalang baru mencapai 21,07 %, dengan demikian peluang investasi masih sangat terbuka di bidang penangkapan ikan tersebut, sebab perairan di Kota Ternate merupakan alur migrasi ikan tuna dan cakalang. Termasuk didalamnya penangkapan ikan cucut, dikarenakan penangkapan ikan cucut masih menggunakan cara-cara tradisional/sederhana, sehingga diperlukan sentuhan teknologi yang canggih.

2. Ikan Pelagis Kecil

Jenis ikan pelagis kecil yang terdapat di perairan Kota Ternate yang dominan adalah ikan layang (*Decapterus sp*), dan tembang (*Sardinella fimbriata*). Pemanfaatan pelagis kecil ini pada umumnya dilakukan oleh nelayan tradisional yang berdomisili pada daerah pesisir kota, sehingga

pemasaran hasil tangkapan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan antara pulau.

3. Ikan Demersal

Spesifik dasar perairan Kota Ternate adalah substrat lumpur berpasir, memiliki terumbu karang dan padang lamun sehingga pada habitat ini ikan demersal sangat potensial. Namun pemanfaatannya masih kurang optimal, sehingga peluang usaha penangkapan jenis ikan tersebut sangat diharapkan. Jenis-jenis ikan yang dominan dan banyak ditangkap para nelayan adalah ikan kakap merah (*Lutjanus altifrontalis*), ikan jena ha' tambangan (*Lutjanus johni*), ikan kerong-kerong (*Saurida tumbil*) dan kerapu (*Epinephelus sp*). Khusus ikan kerapu baru dikembangkan pada dua area budidaya dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA).

4. Non Ikan

Pada perairan Kota Ternate terdapat juga komoditi jenis non ikan, yaitu berbagai jenis teripang : teripang pasir (*Holothuria scobra*), teripang gama (*Stichopus sp*), teripang susuan (*Holothuria fuscogilva*), kerang tiram, udang lobster (*Panulirus homarus*).

5. Ikan Air Tawar

Untuk budidaya ikan tawar hanya dikembangkan di sebagian Pulau Ternate dan Pulau Moti, dengan jenis ikan mas, ikan nila, ikan patin dan ikan mujair.

6. Ikan Hias

Perairan Kota Ternate memiliki berbagai jenis ikan hias yang terdapat pada perairan Pulau Hiri, Pulau Moti dan Pulau Ternate yang dominan adalah jenis ikan bendera (*Zantidae*), ikan lepu (*Scorpaenidae*), dan ikan kepe-kepe (*Chaetodontidae*). Pemanfaatan/usaha penangkapan dilakukan dengan cara sederhana dan dipasarkan pada pasar lokal.

A.2 Keragaan Perikanan Kota Ternate

Dalam laporan 5 (lima) tahun pembangunan kelautan dan perikanan kota Ternate, disebutkan penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dengan mewujudkan indikator makro pada tahun 2010, yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan rata-rata kelompok sasaran program 60 %;
2. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 70 % aparatur;
3. Kontribusi terhadap PAD sebesar 10 % per tahun;
4. Meningkatnya produksi perikanan sebesar 15 % setiap tahunnya;
5. Konsumsi ikan sebesar 40 kg/kapita/tahun;
6. Jangkauan program pengentasan kemiskinan sebesar 18 % dari populasi masyarakat pesisir.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam kebijakan dan program pembangunan perikanan adalah sebagai berikut :

a. *Program Pengembangan Produksi Perikanan.* Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2004 adalah :

- Penyertaan Modal Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir, pengadaan rumpon ikan pelagis laut dangkal 2 unit, pengadaan alat

tangkap *purse seine* 1 unit, pengadaan bibit ikan (termasuk ikan kepala timah), pembuatan pabrik es (DIPDA-L), pengembangan PPI (DAK-Perikanan), pengembangan pabrik es (lanjutan) dan pengadaan rumpon laut dalam sebanyak 2 unit.

- b. *Program Pengembangan Budidaya Perikanan*, kegiatan meliputi pengembangan BBI Gambesi DAK – Non DR.
- c. *Program Peningkatan Mutu Perikanan*, yaitu kegiatan berupa pengadaan *cool box* 100 unit.

Untuk jenis alat tangkap ikan yang ada di tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jenis Alat Tangkap Ikan Yang Ada di Tiap Kecamatan di Kota Ternate

No.	Jenis Alat Tangkap	Kecamatan				Juml.
		P.Ternate (buah)	Ternate Selatan (buah)	Ternate Utara (buah)	Moti (buah)	
1.	Pukat Pantai	10	0	0	4	14
2.	Pukat Cincin	8	8	19	6	41
3.	Jaring Insang Melayut	35	21	26	11	93
4.	Jaring Insang Tetap	54	39	31	18	142
5.	Rawai Tetap	5	0	0	0	5
6.	Hubate	215	50	300	41	606
7.	Pancing Lain	111	81	89	45	326
8.	Pancing Tonda	26	15	17	15	73
9.	Bubu	31	0	0	37	68
10.	Muroami	4	0	0	0	4
	Jumlah	499	214	482	177	1.372

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate (2008)

Armada penangkapan yang ada di Kota Ternate terbagi menjadi 3, yaitu armada penangkapan : perahu tanpa motor, perahu motor dan kapal motor dan tersebar di 6 (enam) kecamatan. Data armada penangkapan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Armada Penangkapan Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Ternate

No.	Kecamatan	Armada Penangkapan		
		Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor	Kapal Motor
		(buah)	(buah)	(buah)
1.	Pulau Ternate	978	125	10
2.	Ternate Selatan	467	59	8
3.	Ternate Tengah	98	45	4
4.	Ternate Utara	603	61	7
5.	Batang Dua	125	95	11
6.	Moti	465	87	12
	Jumlah	2.736	472	52

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate (2008)

Tingginya angka pada perahu tanpa motor menggambarkan bahwa armada penangkapan masih dikuasai oleh armada tradisional, dengan demikian diharapkan Pemda Kota Ternate (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate) lebih memberikan bantuan untuk armada penangkapan yang menggunakan motor/kapal motor, agar penangkapan ikan lebih berhasil guna dan nelayan mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga kesejahteraan semakin meningkat.

Hasil produk olahan perikanan yang dibuat oleh masyarakat Kota Ternate pada umumnya berupa ikan asin, ikan asap/fufu, kecap ikan, abon ikan, ikan beku yang pemasarannya masih di sekitar kota Ternate, kecuali ikan beku yaitu di kirim antar pulau (Bitung dan Surabaya). Data hasil produk olahan perikanan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Data Hasil Produk Olahan Perikanan di Kota Ternate

No.	Jenis Olahan	Jumlah Pengolah	Produksi (kg)		Keterangan
			Per hari	Per bulan	
1.	Ikan Asin	10	450	9.500	Aktif
2.	Ikan Asap/ <i>fufu</i>	41	1.150	2.200	Aktif
3.	Kecap Ikan	2	50	1.000	Aktif
4.	Abon Ikan	10	65	1.300	Aktif
5.	Ikan Beku	3	100	2.500	Aktif

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate (2008)

A.3 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan

A.3.1 Masyarakat Pesisir

Perbedaan masyarakat pesisir atau pemukiman sukar dibedakan karena sifat masyarakat yang memiliki mata pencaharian yang saling bertumpang tindih. Klasifikasi masyarakat dapat dibedakan berdasarkan mata pencaharian utamanya atau berdasarkan sifat mereka bermukim (Muluk, 1996). Dengan kombinasi kriteria itu, masyarakat wilayah pesisir dapat dibagi kedalam (a) masyarakat nelayan, (b) masyarakat petani dan nelayan, (c) masyarakat petani, (d) masyarakat pengumpul atau penjarah (*collector, forager*), (e) masyarakat perkotaan dan perindustrian dan (f) masyarakat tidak menetap/ sementara atau pengembara (*migratory*).

Menurut Satria (2002) dalam konteks masyarakat pesisir, yaitu masyarakat desa terisolasi (masyarakat pulau kecil) dan masyarakat desa pantai dapat dijadikan gambaran wujud komunitas kecil. Komunitas kecil tersebut memiliki beberapa ciri :

- a. mempunyai identitas yang khas;
- b. jumlah penduduk terbatas sehingga saling mengenal sebagai individu

yang berkepribadian;

- c. bersifat seragam dengan diferensiasi terbatas;
- d. kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas sehingga semua dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada pasar di luar.

Selanjutnya dikatakan bahwa masyarakat pesisir yang berjenis desa pantai dan desa terisolasi dicirikan oleh sikap mereka terhadap alam dan manusia Satria (2002).

Pada penelitian ini yang dimaksud masyarakat pesisir adalah masyarakat nelayan dan non nelayan dan keluarganya yang memanfaatkan PPN Ternate. Menurut Undang-undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan, *nelayan* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan *nelayan kecil* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nelayan dibedakan nelayan pemilik dan nelayan pekerja (buruh). Nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas kapal/perahu yang diperlukan dalam usaha penangkapan ikan di laut. Nelayan pekerja (buruh) yaitu semua orang yang sebagai satu kesatuan menyediakan tenaga kerjanya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut baik sebagai nakoda, pandega maupun sebagai pengoperasian alat tangkap.

A.3.2 Pendapatan Rumah Tangga

Keluarga nelayan adalah suatu keluarga yang kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya terlibat dalam proses produksi atau pengolahan hasil perikanan sebagai sumber pendapatan dan penghidupannya. Pendapatan rumah tangga dapat diketahui dengan menjumlahkan pendapatan keluarga dari semua sumber pendapatan dan pendapatan tersebut dapat beragam. Hal ini disebabkan disamping kegiatan utama sebagai nelayan juga diupayakan kegiatan-kegiatan lain, seperti dagang, usaha jasa dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menurut Dahuri *et al.* (2001), pada saat ini kira-kira 60 % dari nelayan di desa pantai rata-rata pendapatannya berkisar antara Rp35.000,-perkapita/bulan, jauh dibawah kebutuhan minimumnya. Untuk meningkatkan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat pantai meningkat perlu usaha-usaha untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi.

A.3.3 Kesejahteraan

Menurut Dahuri (2000), tidak adanya akses ke sumber modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah alasan-alasan terjadinya kemiskinan. Alasan lain terkait dengan sifat sumberdaya pesisir. Selanjutnya dikatakan bahwa kemiskinan juga disebabkan karena faktor-faktor sosial seperti pertumbuhan jumlah

penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan dan berkembangnya kriminalitas. Alasan lain juga terkait dengan kurangnya prasarana umum di wilayah pesisir, lemahnya perencanaan spasial yang berakhir pada tumpang tindih berbagai sektor di suatu kawasan, dampak polusi dan kerusakan lingkungan. Kemiskinan juga terjadi karena prasarana pembangunan yang kurang di wilayah pesisir. Prasarana di wilayah pesisir memang sangat dibutuhkan, mengingat masyarakat hanya mampu memanfaatkan dan tidak mampu membangun atau mengadakannya.

Batas garis kemiskinan yang dipergunakan oleh BPS dihitung berdasarkan nilai dari kebutuhan pokok minimum masyarakat. Angka tersebut secara reguler direvisi sesuai dengan laju kenaikan indeks harga barang kebutuhan pokok. Akan tetapi penggunaan indeks harga untuk menetapkan garis kemiskinan harus dilakukan pembobotan dengan adanya variasi indeks harga antara wilayah. Dengan demikian penggunaan nilai konsumsi yang nyata setara dengan kebutuhan kalori untuk hidup normal kiranya dapat diaplikasikan sebagai dasar menentukan garis kemiskinan seperti yang diperkenalkan oleh Sajogyo (1977).

Klasifikasi tingkat kesejahteraan (kemiskinan) menurut Sajogyo (1977), didasarkan pada nilai pengeluaran perkapita per tahun yang diukur dengan nilai beras setempat, yaitu :

a. Miskin, apabila nilai perkapita per tahun lebih rendah dari setara

320 kg beras untuk pedesaan dan 480 kg beras untuk daerah kota.

- b. Miskin sekali, apabila pengeluaran perkapita per tahun lebih rendah dari setara 240 kg beras untuk pedesaan dan 360 kg beras untuk daerah kota.
- c. Paling miskin, apabila pengeluaran perkapita per tahun lebih rendah dari setara 180 kg beras untuk pedesaan dan 270 kg untuk daerah kota.

Aspek lain yang juga penting dalam menganalisis kesejahteraan rumah tangga, menurut BPS (2001), berdasarkan pada data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas serta perumahan dan lingkungan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik dikumpulkan berdasarkan :

- a. Konsumsi/pengeluaran/pendapatan;
- b. Kesehatan, pendidikan, perumahan dan pemukiman; dan
- c. Sosial budaya, kesejahteraan rumah tangga, kriminalitas.

A.3.1 Kondisi Ekonomi Nelayan

Widodo (1999), menyatakan bahwa permasalahan ekonomi di Indonesia sebagai negara berkembang masih tergantung pada keadaan penduduk, seperti masalah kemiskinan, upah kerja yang masih rendah, penyerapan tenaga kerja disektor formal dan semakin rendah kualitas sumberdaya manusia dalam arti luas.

Winoto (2006) berpendapat bahwa nelayan di Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang memiliki pendapatan yang kecil bila

dibandingkan dengan biaya pengeluaran. Pendapatan nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca atau musim. Sedangkan dari pendapatan pokok ditambah pendapatan sampingan belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu pola hidup boros juga menyebabkan nelayan selalu kekurangan pendapatan. Bila pendapatan yang diperoleh agak tinggi, kelebihan dari pendapatan tersebut tidak ditabung sehingga tidak jarang nelayan menggunakan sistem gali lobang tutup lobang. Akibatnya tingkat kemiskinan semakin meningkat, disebabkan oleh praktek pinjam meminjam dengan bunga yang cukup tinggi.

A.4. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2006), mendefinisikan Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pada umumnya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) ini ditujukan untuk melayani kapal yang mencakup kegiatan perikanan di wilayah perairan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang kurangnya 30 *Gross Tonnage* (GT). PPN mempunyai peranan yang penting mengingat panjangnya pantai Indonesia yang lebih kurang 81.000 km dan jumlahnya sebanyak 13 buah yang sebagian besar

dibangun dengan biaya APBN.

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2006), Peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai pusat pengembangan mencakup 3 (tiga) aspek pokok, yaitu :

- a. Aspek pengembangan ekonomi perikanan, baik yang berskala nasional maupun regional;
- b. Aspek pengembangan industri penunjang usaha perikanan, baik hulu maupun hilir;
- c. Aspek pengembangan sumberdaya manusia, yakni masyarakat perikanan.

Menurut Kusumaatmaja (2001), visi pembangunan perikanan adalah pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan yang menjadi pusat pengembangan ekonomi perikanan dan sebagai wahana untuk mensejahterakan masyarakat dan pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan.

Visi pembangunan kelautan dan perikanan menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2007) adalah “Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab bagi kesatuan dan kesejahteraan anak bangsa”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Disamping berperan sebagai penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan di satu pihak

lebih bersifat sebagai prasarana sosial yang memungkinkan terselenggaranya pembinaan nelayan serta penyuluhan kepada masyarakat perikanan, sedangkan dipihak lain pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan merupakan terminal dimana fungsi-fungsi pengaturan dibidang perikanan dapat dilaksanakan.

A.4.1 Peranan Pelabuhan Perikanan

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1992), Pelabuhan sebagai pusat kehidupan masyarakat nelayan dan pusat kegiatan industri perikanan, memiliki beberapa peranan, yakni :

- a. Peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas produksi, antara lain :
 1. Tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan.
 2. Tempat untuk persiapan operasi penangkapan (mempersiapkan alat tangkap, bahan bakar, air, perbekalan kelaut, ataupun perbaikan kapal).
 3. Tempat untuk berlabuh kapal perikanan.
- b. Sebagai pusat distribusi, peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas distribusi, antara lain:
 1. Tempat transaksi jual beli ikan.
 2. Sebagai terminal untuk mendistribusikan ikan.
 3. Sebagai terminal ikan hasil laut.
- a. Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan, pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas ini antar lain sebagai pusat :
 1. Kehidupan nelayan.

2. Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan.
3. lintas dan jaringan informasi antara nelayan dengan pihak luar.

A.4.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan

Secara umum Pelabuhan perikanan berfungsi sebagai tempat membongkar ikan hasil tangkapan, lebih rinci fungsi itu termuat dalam Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu :

- a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan
- b. Tempat berlabuh kapal-kapal perikanan
- c. Tempat mendaratkan ikan hasil tangkapan
- d. Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan
- e. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
- f. Pusat pelaksana pembinaan mutu hasil perikanan
- g. Pusat pelaksana penyuluhan dan pengumpulan data

Fungsi dari suatu pelabuhan perikanan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi maritim, fungsi komersial, dan fungsi jasa. Fungsi maritim ditandai dengan aktifitas kemaritiman, pelabuhan perikanan sebagai tempat kontak antara laut dan daratan. Fungsi komersial timbul karena pelabuhan perikanan merupakan suatu tempat awal untuk mempersiapkan industri produk perikanan dengan melakukan transaksi pelelangan ikan. Sedang fungsi jasa mencakup seluruh jasa-jasa pelabuhan perikanan mulai dari ikan didaratkan sampai didistribusikan, seperti jasa pendaratan ikan dan bongkar muat kapal, penanganan mutu, pemeliharaan dan keamanan. Dalam era komunikasi, kehadiran pelabuhan perikanan akan memberikan kemudahan bagi

masyarakat perikanan untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait termasuk informasi pasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, dijelaskan bahwa fungsi dari pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
- b. Pelayanan bongkar muat;
- c. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d. Pemasaran dan distribusi ikan;
- e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. Pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. Pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- l. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- m. Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran, dan pencemaran).

A.5 Kebijakan Pembangunan Perikanan

Menurut Dahuri (2000), kondisi pembangunan perikanan Indonesia yang diinginkan adalah suatu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumberdaya ikan beserta ekosistem perairannya untuk

kesejahteraan umat manusia, terutama nelayan dan petani ikan, secara berkelanjutan (*on sustainable basis*). Pembangunan perikanan pada tingkat regional pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu tujuannya bertumpu pada kepentingan nasional secara utuh. Selanjutnya dikatakan bahwa apabila profil (visi) pembangunan perikanan ini dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan, maka ada lima tujuan yang harus dicapai oleh pembangunan perikanan nasional :

- a. Pemenuhan kebutuhan konsumsi produk perikanan untuk dalam negeri.
- b. Peningkatan perolehan devisa.
- c. Peningkatan produksi perikanan sesuai dengan potensi lestari dan daya dukung lingkungan.
- d. Pemeliharaan kelestarian stok ikan dan daya dukung lingkungannya.
- e. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani ikan.

A.6 Pengembangan Wilayah Pesisir

Pengembangan atau pembangunan wilayah tidak hanya dilihat dari fisiknya saja tapi lebih mendekati kepada pengembangan bidang ekonomi. Menurut Budiharsono (2001) pengembangan wilayah dapat ditinjau pendekatannya secara biogeofisik, ekonomi, sosial budaya, kelembagaan, lokasi dan lingkungan. Muluk (1996) perkembangan penduduk, pengembangan wilayah di bagian hilir/darat dan juga pengembangan wilayah pesisir sendiri akan berdampak kepada wilayah seluruh ekosistem pesisir. Dampak perkembangan dan berbagai kegiatan itu dapat berdampak langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat pesisir.

Di dalam pelaksanaan pembangunan suatu pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan, tentunya akan menimbulkan dampak baik di darat, perairan maupun di udara baik positif maupun negatif. Dampak adalah suatu perubahan lingkungan yang mendasar diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan dapat bersifat positif atau negatif, secara langsung maupun tidak langsung. Dampak juga diartikan sebagai suatu benturan antara dua kepentingan atau setiap perubahan yang terjadi dalam suatu lingkungan sebagai akibat adanya aktivitas manusia (Lubis, 2002).

Menurut Soemarwoto (2001) sasaran pembangunan ialah untuk menaikkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan itu dapat mengakibatkan dampak primer biofisik atau/dan sosial - ekonomi - budaya. Dampak primer ini akan mempengaruhi sasaran kesejahteraan yang ingin dicapai. Selanjutnya dikatakan untuk melihat bahwa suatu dampak atau perubahan telah terjadi kita harus mempunyai bahan pembanding sebagai acuan. Salah satu acuan ialah keadaan sebelum terjadi perubahan.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan harus diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal, rasional dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya tanpa menimbulkan kerusakan pada sumberdaya tersebut dan lingkungannya. Pengembangan pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kesempatan kerja, peluang usaha dan kerja tersebut ada karena adanya permintaan pasar, dengan demikian pengembangan perikanan akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut

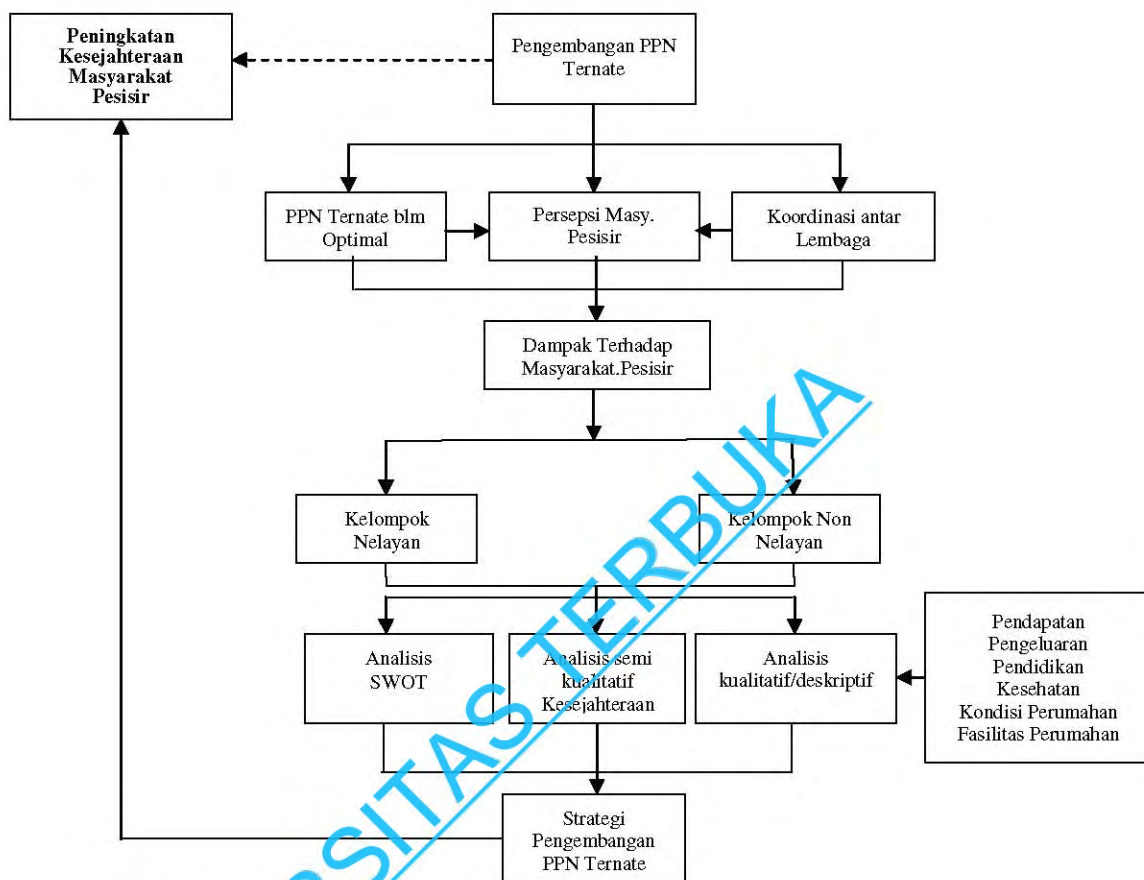
untuk menjadi pengusaha perikanan, nelayan, pedagang ikan, restoran ikan, pedagang bahan alat penangkapan, warung, jasa jasa penyewaan dan lainnya (Pemda Maluku Utara, 2003).

B. Kerangka Berpikir

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan maupun non nelayan dan meningkatkan pendapatan pemerintah, dengan tetap berdaarkan keterkaitan dan keseimbangan hubungan antar komponen-komponen dalam PPN Ternate, masyarakat nelayan ataupun kaitannya dengan instansi lain.

Seiring dengan upaya pengembangan PPN Ternate, maka diperlukan input yang berupa kondisi PPN Ternate pada saat ini dan sebelumnya guna mengetahui tindakan apa yang bakal dilakukan guna pengembangan tersebut.

Pengembangan PPN Ternate selain menguntungkan disatu sisi namun tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak pula pada masyarakat pesisir baik kelompok nelayan yang memanfaatkan PPN Ternate maupun kelompok nelayan yang tidak memanfaatkan PPN Ternate.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

C. Definisi Operasional

- a. Masyarakat pesisir di dalam kawasan PPN Ternate adalah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan perikanan baik sebagai nelayan, bakul/pedagang maupun pengolah ikan dalam kegiatan usaha perikanan.
- b. Kesejahteraan adalah sesuatu yang bersifat subyektif dimana setiap orang mempunyai pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.
- c. Tingkat kesejahteraan yang diukur dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan, tingkat konsumsi/pengeluaran rumah tangga, pendidikan,

kesehatan, kondisi perumahan dan fasilitas rumah.

- d. Pendapatan rumah tangga nelayan, bakul/pedagang ikan dan pengolah adalah semua pendapatan yang diperoleh dengan memperhitungkan semua sumber pendapatan.
- e. Pengeluaran rumah tangga nelayan, bakul/pedagang ikan dan pengolah adalah pengeluaran rumah tangga, baik berupa makanan/pangan maupun non pangan dalam sebulan berdasarkan nilai setara beras menurut tolok ukur (Sajogyo, 1977).
- f. Pendidikan dalam penelitian adalah pendidikan formal di keluarga nelayan.
- g. Kondisi perumahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi atau keadaan tertentu dari perumahan tersebut seperti kondisi bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan tidak permanen. Skor diperoleh dengan menjumlahkan nilai-nilai dari kondisi perumahan tersebut seperti : atap, bilik, status perumahan, lantai dan luas perumahan dengan skor sebagai berikut :
 - a. Permanen (skor = 15 – 21)
 - b. Semi permanen (skor = 10 – 14)
 - c. Tidak permanen (skor = 5 – 9)
- h. Fasilitas perumahan keluarga nelayan adalah sarana yang tersedia lengkap, semi lengkap/cukup, dan kurang lengkap. Skor diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari fasilitas yang tersedia dalam perumahan tersebut seperti : luas pekarangan, hiburan, pendingin, sumber penerangan, bahan bakar, sumber air dan MCK yang ada, dengan skor sebagai berikut :

- a. Tersedia lengkap (skor = 21 – 27)
- b. Semi lengkap (skor = 14 – 20)
- c. Kurang lengkap (skor = 7 – 13)

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek peranan dan fungsi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dirancang sebagai *explanatory research*, yaitu penelitian yang menjelaskan tingkat pendapatan, konsumsi/pengeluaran, tingkat pendidikan, kesehatan, kondisi rumah dan fasilitas rumah masyarakat pesisir yang memanfaatkan PPN Ternate, serta strategi pengembangan PPN Ternate.

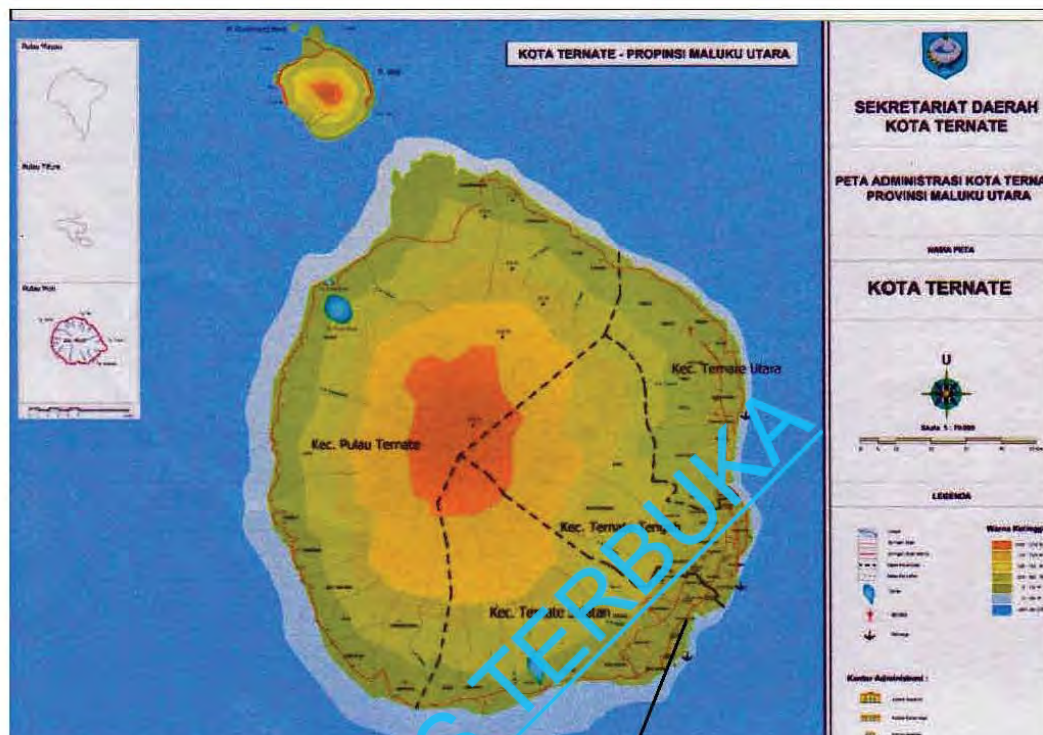
Sesuai dengan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah survei. Di samping itu, pendekatan kualitatif juga dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin melalui pengumpulan dokumen-dokumen sekunder, pengamatan, dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan pada sejumlah informan kunci, untuk melengkapi data dan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui metode survei.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah yang merupakan lokasi pesisir pantai disekitar PPN Ternate yang sebagian besar masyarakatnya nelayan dan pedagang ikan (*dibo-dibo*). Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan :

(1) secara demografi, lokasi tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang sama dilihat dari indeks kemiskinan manusia (IKM) Kota Ternate 7,3 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2008), (2) lokasi tersebut memiliki karakteristik nelayan, pedagang ikan, dan pengolah ikan yang hampir sama, (3) merupakan sentra salah satu komoditas pangan hayati (ikan) yang penting dan banyak diusahakan di daerah pesisir Indonesia, dan (4) memiliki pola usaha penangkapan ikan yang hampir sama.

Penelitian dilaksanakan disekitar kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate meliputi 5 (lima) Kelurahan (Bastiong Talangame, Bastiong Karance, Kayu Merah, Kalumata dan Mangga Dua) yang ada di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara selama \pm 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan Pebruari hingga Mei 2009. Adapun tahun dasar sebagai batas ukur dalam penentuan tahun sebelum dan sesudah pengembangan PPN Ternate yaitu tahun 2003. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.1 Peta Kota Ternate

• Lokasi Penelitian

C. Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel responden dilakukan dengan sengaja dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sedangkan pertimbangan yang diambil itu berdasarkan tujuan penelitian (*Purposive Sampling*) (Singarimbun, 1995). Masyarakat sebagai responden yang akan diwawancarai adalah rumah tangga masyarakat pesisir yang menetap dan berkegiatan di sekitar kawasan PPN Ternate. Responden yang terpilih sebagai sampel merupakan kelompok rumah tangga yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan usaha perikanan dengan jumlah 68 orang. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap keluarga nelayan (*pole and line* dan *purse sein mini*) dan non nelayan yang memanfaatkan PPN Ternate. Keluarga non nelayan

dalam hal ini adalah pedagang/bakul, pengolah ikan dan buruh pelabuhan. Wawancara dilakukan dengan : pengelola PP/PPN = 10 orang, pengusaha penangkapan = 4 orang, pedagang pengumpul = 11 orang, pengolah ikan = 12 orang, ABK = 21 orang, buruh pelabuhan = 10 orang, seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jenis Data, Variabel, Sumber dan Metode Yang Digunakan.

No.	Jenis Data	Variabel	Sumber	Metode
1.	Primer	Persepsi masyarakat ttg Pemanfaatan PPN TTE	a. Nelayan (ABK) b. Non Nelayan (pedagang pengumpul ikan & buruh) c. Pengelola PP d. Pengusaha perikanan	a. Wawancara b. Kuesioner
2.	Sekunder	Pendidikan, Kesehatan, jumlah jiwa	Bappeda Kota Ternate, BPS Kota Ternate, Kecamatan Kota Ternate Selatan	
3.	Sekunder	Pembangunan Perikanan Kota Ternate	Pemda Kota Ternate	
4.	Sekunder	Fasilitas PPN & Fasilitas Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, PPN Ternate, PT. Mitra Nelayan Mandiri, PT. Dwi Poli Perkasa, PT. Era Mandiri Cemerlang	
5.	Sekunder	Kondisi alam Kota Ternate	Stasiun Metereologi dan Geofisika Kota Ternate	
6.	Sekunder	Batas Kota Ternate	Pemda Kota Ternate	
7.	Sekunder	Lokasi Penelitian	Pemda Kota Ternate	
8.	Sekunder	Kedalaman Perairan/ Laut	Dinas Hidroseanografi Angkatan Laut	

D. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum melakukan pengambilan data di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara harus didahului dengan pengurusan surat ijin pengambilan data di Unversita Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Ternate. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan memberikan kuesioner dan wawancara langsung pada masyarakat nelayan dan non nelayan yang ada di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate pada 21 nelayan, 11 pedagang, 9 pengolah tradisional dan 3 pengolah modern. Sedangkan data sekunder berupa kondisi geografis, demografis, hidrografis dikumpulkan dari instansi terkait. Pengumpulan data primer yang dimaksud untuk memperoleh:

- a. Data karakteristik responden seperti : umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan rumah tangga, jenis mata pencaharian, lama tinggal dalam komunitasnya, persepsi dan sikap responden terhadap keberadaan PPN Ternate
- b. Data untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir/nelayan seperti: pendapatan, pengeluaran/konsumsi, pendidikan, kesehatan, kondisi perumahan, dan fasilitas perumahan.

Data untuk merumuskan strategi pengembangan perikanan di kawasan PPN Ternate diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintah, pengusaha perikanan, koperasi, dan masyarakat nelayan dan non nelayan.

Tahapan pengambilan data di daerah :

1. Yang pertama dilakukan adalah mengurus surat ijin pengambilan data ke Universitas Terbuka UPBJJ Ternate.
2. Menghubungi informan kunci seperti penyuluh/enumerator/kepala kelurahan di masing-masing daerah untuk menghubungi nelayan dan non nelayan calon responden.
3. Setelah ada kesepakatan tanggal maka peneliti menuju daerah untuk mengumpulkan data kuantitatif menggunakan kuesioner untuk nelayan dan non nelayan responden.
4. Wawancara dilakukan terhadap nelayan dan non nelayan dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
5. Setelah data terkumpul, data diolah dengan metoda kualitatif.

E. Data dan Instrumentasi

Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden yang tertera pada Tabel 3.1 melalui pengisian kuesioner dengan teknik wawancara (kuesioner terpandu). Data sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, kajian pustaka atau data yang telah ada dan tersedia di lembaga lain, seperti geografis lokasi, demografi, hidrografis, Badan Pusat Statistik Kota Ternate, Bappeda Kota Ternate dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara maupun Kota Ternate .

Instrumentasi berupa kuesioner penelitian, disusun menjadi empat bagian. Bagian pertama berupa pertanyaan-pertanyaan tentang peranan dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate. Bagian kedua yaitu pernyataan-pernyataan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan

PPN Ternate. Bagian ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai tingkat kesejahteraan nelayan dan non nelayan yang memanfaatkan PPN Ternate. Bagian keempat adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai peluang-peluang dan hambatan dalam pengembangan PPN Ternate. Instrumen ini dikembangkan dalam dua bentuk, yaitu berbentuk pertanyaan dan pernyataan baik secara terbuka maupun tertutup.

F. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel dan indikator penelitian secara rinci disajikan pada Tabel 3.2 hingga Tabel 3.4, meliputi : variabel dan indikator faktor peranan dan fungsi PPN Ternate, variabel dan indikator faktor yang mempengaruhi pengembangan PPN Ternate, variabel dan indikator perbedaan kesejahteraan masyarakat pesisir yang memanfaatkan PPN Ternate, variabel dan indikator strategi pengembangan PPN Ternate.

Tabel 3.2 Variabel dan Indikator Faktor Peranan dan Fungsi PPN Ternate

No.	Variabel	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Peranan PPN Ternate	Berkaitan dengan aktivitas produksi	Pelaku : - nelayan - pegawai PPN Ternate	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)
2.	Peranan PPN Ternate	Sebagai pusat distribusi	Pelaku : - nelayan - pedagang - pegawai PPN Ternate	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)
3.	Peranan PPN Ternate	Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan	Pelaku : - nelayan - pegawai PPN Ternate	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)

No.	Variabel	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
4.	Fungsi PPN Ternate	Berkaitan dengan tingkat operasional	Pelaku : - nelayan - pedagang - pengolah ikan - buruh pelabuhan - pegawai PPN Ternate	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)

Tabel 3.3 Variabel dan Indikator Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan PPN Ternate dan Perbedaan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Yang Memanfaatkan PPN Ternate

No.	Variabel	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
A. Sosial Ekonomi Masyarakat				
1.	Tingkat Pendapatan Rumah Tangga	Penghasilan yang diperoleh	Pelaku : - nelayan - pedagang - pengolah ikan	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)
2.	Tingkat Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga	Besarnya konsumsi/pengeluaran yang dikeluarkan	Pelaku : - nelayan - pedagang - pengolah ikan	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)
3.	Tingkat Pendidikan Keluarga	Pendidikan formal yang diperoleh	Pelaku : - nelayan - pedagang - pengolah ikan	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)
4.	Tingkat Kesehatan Keluarga	Kesehatan yang didapat bulan terakhir	Pelaku : - nelayan - pedagang - pengolah ikan	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)
5.	Kondisi Perumahan Keluarga	Bahan Rumah yang digunakan	Pelaku : - nelayan - pedagang - pengolah ikan	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)

No.	Variabel	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
6.	Fasilitas Perumahan Keluarga	Fasilitas rumah yang dimiliki	Pelaku : - nelayan - pedagang - pengolah ikan	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)

Tabel 3.4 Variabel dan Indikator Strategi Pengembangan PPN Ternate

No.	Variabel	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Kekuatan	Potensi yang dimiliki PPN Ternate	Pelaku : - nelayan - pedagang - pengolah ikan - pegawai PPN	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)
2.	Kelemahan	Kekurangan yang dimiliki PPN Ternate	Pelaku : - nelayan - pedagang - pengolah ikan - pegawai PPN	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)
3.	Peluang	Potensi yang belum dioptimalkan PPN Ternate	Pelaku : - nelayan - pedagang - pengolah ikan - pegawai PPN - instansi terkait	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)
4.	Ancaman	Hal-hal yang menghambat operasional PPN Ternate	Pelaku : - nelayan - pedagang - pengolah ikan - pegawai PPN - instansi terkait	Pengisian kuesioner melalui teknik wawancara (kuesioner terpandu)

G. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara terpandu dengan responden berpedoman pada kuesioner yang telah dipersiapkan

sebelumnya dan pengamatan langsung/observasi di lapangan.

Adapun observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang lokasi, keadaan lingkungan kawasan, lokasi pemukiman dan pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta peran serta masyarakat pesisir yang berkegiatan dalam kawasan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Sedangkan data sekunder berupa kondisi geografis, demografis, dikumpulkan dari instansi terkait. Pengumpulan data primer yang dimaksud untuk memperoleh:

- a. Data karakteristik responden seperti : umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan rumah tangga, jenis mata pencaharian, lama tinggal dalam komunitasnya, persepsi dan sikap responden terhadap keberadaan PPN Ternate.
- b. Data untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir/nelayan seperti: tingkat pendapatan, pengeluaran/konsumsi rumah tangga, pendidikan, kesehatan, kondisi perumahan, dan fasilitas perumahan.
- c. Data untuk merumuskan strategi pengembangan perikanan di kawasan PPN Ternate diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintah, pengusaha perikanan, koperasi, dan masyarakat nelayan dan non nelayan.

H. Metode Analisis Data

Tabel 3.5 Metode Analisis

No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis
1.	Identifikasi peran dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate	Tingkat Operasional PPN	Deskriptif

No.	Tujuan Penelitian	Variable	Metode Analisis
2.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan PPN Ternate	Kondisi masyarakat pesisir	Kualitatif
3.	Analisis perbedaan kesejahteraan masyarakat pesisir (nelayan & non nelayan)	Pendapatan, Konsumsi, Pendidikan, Kesehatan, Kondisi Rumah, Fasilitas Rumah	Kualitatif
4.	Analisis strategi pengembangan PPN Ternate	Faktor Internal & Eksternal	SWOT

Untuk mengetahui gambaran umum lokasi penelitian, sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dilakukan analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dan wawancara maupun data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Demikian pula untuk mengetahui identifikasi kinerja pelabuhan perikanan dianalisis secara deskriptif.

Untuk merumuskan strategi pengembangan PPN Ternate dalam rangka mendukung usaha masyarakat pesisir dianalisis dengan metode SWOT. Tujuan metode SWOT menurut Rangkuti, 2008 adalah untuk membandingkan antara faktor internal yaitu kekuatan (*strengths-S*) dan kelemahan (*weakness-W*) dengan faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities-O*) dan ancaman (*threats-T*).

Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kesejahteraan masyarakat pesisir sebelum dan sesudah pengembangan PPN Ternate dianalisis dengan analisis kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antar kelompok serta mendeterminasi variabel-variabel

yang paling menunjukkan perbedaan.

H.1 Analisis Identifikasi Peranan dan Fungsi Pelabuhan Perikanan.

Untuk mempelajari peranan dan fungsi PPN Ternate dalam rangka mendukung usaha masyarakat pesisir dilihat berdasarkan data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif/deskriptif dilakukan terhadap data primer yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dan wawancara maupun data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Demikian pula kondisi dan potensi sumberdaya alam dianalisis secara kualitatif/deskriptif.

H.2 Analisis Strategi Pengembangan PPN Ternate.

Untuk menganalisis dampak yang timbul akibat operasionalnya PPN Ternate, berdasarkan luasnya, arah dan obyek yang terkena dampak dalam penelitian ini digunakan Analisis SWOT, (Rangkuti, 2008).

Hal utama yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan operasional PPN Ternate adalah sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dan yang berusaha di kawasan pelabuhan perikanan (nelayan, pedagang/*dibo-dibo*, dan pengusaha perikanan), selain itu juga peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan. Dengan demikian akan membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar PPN Ternate.

Analisis SWOT adalah analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memformulasikan strategi suatu keadaan (kondisi) yang lebih baik, kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. SWOT adalah singkatan dari lingkungan Internal *Strength* dan *Weaknesses* serta lingkungan Eksternal

Opportunities dan Threats, (Rangkuti, 2008).

Selanjutnya diberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis PPN Ternate. Untuk menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing –masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi PPN Ternate. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik). Sedangkan variabel yang bersifat negatif, kebalikannya (Rangkuti, 2008).

Tabel 3. 6 Bobot Rating Faktor Strategi Internal

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan			
X1			
X2			
⋮			
Xn			
Jumlah			
Kelemahan			
X1			
X2			
⋮			
Xn			
Jumlah			
Total			

Penetapan ini dilakukan untuk melihat strategi pengembangan PPN Ternate selanjutnya yaitu dengan mengamati faktor - faktor internal pada Tabel 3.6 dan faktor- faktor eksternal seperti pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Bobot Rating Faktor Strategi Eksternal

Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang : X1 X2 . . Xn Jumlah			
Ancaman : X1 X2 . . Xn Jumlah			
Total			

Selanjutnya dilakukan pemaduan antara kedua faktor untuk mendapatkan gabungan strategi terbaik bagi pengelolaan pengembangan PPN Ternate seperti terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Strategi Yang Dihasilkan Dari Perpaduan Antara Faktor Strategi Internal Dengan Eksternal

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (S) X1 X2 . Xn	KELEMAHAN (W) X1 X2 . Xn	
	PELUANG (O) X1 X2 . Xn	(Strategi SO) a b . N	(Strategi WO) a b . n
	ANCAMAN (T) X1 X2 . Xn	(Strategi ST) a b . N	(Strategi WT) a b . n

Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi PPN Ternate, sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi yaitu :

- a. Strategi SO : berdasarkan jalan pikiran instansi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- b. Strategi ST : menggunakan kekuatan yang dimiliki instansi untuk mengatasi ancaman.
- c. Strategi WT : berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara

meminimalkan kelemahan yang ada.

- d. Strategi WT : didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Keluaran yang dihasilkan dari analisis ini adalah strategi yang tepat dalam mengoptimalkan peranan dan fungsi PPN Ternate terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

H.3 Analisis Perbedaan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir sebelum dan sesudah pengembangan PPN Ternate dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode statistik yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antar kelompok serta mendeterminasi variabel-variabel yang paling menunjukkan perbedaan. Analisis data untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara karakteristik masyarakat nelayan/penangkap ikan dan non nelayan yang memanfaatkan fasilitas perikanan dalam hal ini PPN Ternate dilakukan analisis kualitatif.

Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir/nelayan dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan, terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga nelayan dan non nelayan yang memanfaatkan fasilitas PPN Ternate dianalisis secara deskriptif dengan sistem skor.

Menurut BPS (2001) yang telah dimodifikasi, tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dibedakan atas 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah. Indikator tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9 Indikator Tingkat Kesejahteraan

No.	Indikator Tingkat Kesejahteraan	Skor	
1.	Tingkat pendapatan/penghasilan keluarga diukur dari besarnya pendapatan keseluruhan RT perkapita dalam sebulan yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Tinggi : > Rp. 200.000,- Sedang : Rp. 150.000, - Rp. 200.000,- Rendah : < Rp. 150.000,-	Tinggi Sedang Rendah	3 2 1
2.	Tingkat konsumsi/pengeluaran keluarga diukur dari besarnya pengeluaran RT perkapita dalam sebulan yang dinyatakan dalam satuan rupiah Tinggi : > Rp. 140.000,- Sedang : Rp. 105.000, - Rp. 139.999,- Rendah : < Rp. 104.999,-	Tinggi Sedang Rendah	3 2 1
3.	Pendidikan keluarga nelayan yang dimiliki dalam pendidikan formal dinyatakan dalam %, yaitu : Tinggi : > 60 % jumlah anggota keluarga tamat SD Sedang : 30-60 % jumlah anggota keluarga tamat SD Rendah : < 30 % jumlah anggota keluarga tamat SD Berdasarkan Ditjen Bangsa Depdagri (1997)	Tinggi Sedang Rendah	3 2 1
4.	Kesehatan keluarga nelayan dalam sebulan mengalami sakit dinyatakan dalam %, yaitu : Baik : < 25 % jumlah anggota keluarga sering sakit Sedang : 25-50 % jumlah anggota keluarga sering sakit Buruk : > 50 % jumlah anggota keluarga sering sakit	Baik Sedang Buruk	3 2 1
5.	Kondisi perumahan keluarga nelayan, terdiri dari : 1. Atap : Daun (1)/Sirap (2)/Seng (3)/Asbes(4)/ Genteng (5) 2. Bilik: Bambu (1)Bambu kayu(2)/ Kayu (3)/ Setengah Tembok (4)/Tembok (5) 3. Status: Numpang (1)/Sewa (2)/ Milik sendiri (3) 4. Lantai: Tanah (1)/Papan (2)/Plester (3) / ubin(4)/ Porselin (5) 5. Luas perumahan : Sempit (<50 m2)(1)/ Sedang (50-100 m2)(2)/Luas (>100 m2)(3)	Permanen (skor 15-21) Semi permanen (skor 10-14) Tidak permanen (skor 5-9)	3 2 1

No.	Indikator Tingkat Kesejahteraan	Skor	
6.	Fasilitas rumah keluarga nelayan terdiri dari : 1. Pekarangan : Sempit (<50 m ²) (1)/ Sedang (50-100m ²) (2)/ Luas (> 100 m ²) (3); 2. Hiburan : Radio (1)/ Tape Recorder (2)/ TV (3)/ Video (4) 3. Pendingin : Alam (1)/ Kipas Angin (2)/Lemari Es(3)/ AC (4); 4. SumberPenerangan:Lampu Tempel(1)/Petromak(2)/ Listrik (3) 5. Bahan Bakar : Kayu (1)/Minyak Tanah (2)/gas (3) 6. Sumber Air: Sungai (1)/Air Hujan (2)/Mata Air (3)/ Sumur (4)/ PAM (5) 7. MCK : Kebun (1)/ Sungai/Laut (2)/ Kamar mandi umum (3)/ Kamar mandi sendiri (4)	Lengkap (skor 21-27) Semi lengkap (skor 14-20) Tidak lengkap (skor 7-13)	3 2 1

Sumber : Badan Pusat Statistik/BPS (2001)

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Wilayah

Kecamatan Kota Ternate Selatan merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kota Ternate, terletak 1 Km dari ibukota, 3 km dari ibukota propinsi Maluku Utara. Kecamatan Kota Ternate Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kota Ternate sebagai pusat kegiatan perikanan utama di bagian selatan Kota Ternate, dimana terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate yang merupakan pusat pengembangan perikanan tangkap di Maluku Utara. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate berada di Kelurahan Bastiong Talangame 2 km dari ibukota Kota Ternate.

Lokasi penelitian terletak di sekitar kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Kota Ternate. Lokasi yang dijadikan daerah penelitian terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu Talangame, Karance, Mangga Dua, Kayu Merah, dan Kalumata (Kecamatan kota Ternate Selatan). Desa-desa tersebut merupakan daerah pesisir dengan masyarakat yang sebagian besar bermatapencaharian berasal dari sumberdaya alam atau jasa lingkungan pesisir dan lautan yang banyak memanfaatkan fasilitas PPN Ternate. Kecamatan Kota Ternate Selatan merupakan pusat pemerintahan, dimana perairan pesisir kecamatan Kota Ternate Selatan bakal dikembangkan menjadi daerah wisata bahari sehingga kegiatan perikanan harus mendukung jenis wisata bahari tersebut dan pengembangan

perikanan harus tetap berprinsip pada kelestarian sumberdaya ikan di kawasan pesisir kecamatan Kota Ternate Selatan tersebut.

Pengembangan pelabuhan perikanan tidak terlepas dari masyarakat pesisir sebagai pengguna pelabuhan perikanan. Agar pengembangannya dapat saling sinergis antara pengelola dan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara, maka pelabuhan perikanan menjadi komponen penting dalam pengembangan industri perikanan sehingga perlu evaluasi untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan ke depan.

A.1 Letak Geografis

Secara geografis kedudukan wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan terletak antara 00°46' sampai 03°36' Lintang Utara dan 127°22'41,10" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Kota Ternate Tengah
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kota Ternate Kepulaun
- Sebelah Timur dengan Pulau Maitara
- Sebelah Barat dengan Gunung Gamalama

Sedangkan secara administrasi kecamatan ini terdiri dari 17 kelurahan.

A.2 Topografi dan Geomorfologi

Secara umum keadaan topografi wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan menunjukkan bahwa kawasan ini termasuk wilayah dengan tingkat kemiringan rendah terletak linier memanjang mengikuti beberapa pesisir pantai bervariasi antara 0 – 2 derajat sampai dengan diatas 40 derajat. Lahan datar –

landai dengan kemiringan 0 – 22 % sebagian besar terdapat di wilayah utara dan timur kawasan kota serta sepanjang pesisir pantai. Sedangkan lahan miring – terjal dengan tingkat kemiringan 22 – 40 % kebanyakan terdapat di bagian selatan dan bagian belakang wilayah Barat kota.

Berdasarkan Monografi Kecamatan (2009), bentuk wilayah Kecamatan Ternate Selatan pada umumnya mempunyai permukaan yang kasar yaitu bergelombang, bergunung, dataran rendah, daerah aliran sungai (DAS) serta pantai. Keadaan perairan Kota Ternate merupakan perairan dengan tingkat kedalaman yang tinggi. Hal tersebut berhubungan dengan lempeng tektonik dasar perairan laut Maluku.

A.3 Klimatologi dan Cuaca

Iklm merupakan gabungan berbagai kondisi sehari-hari dimana unsur penyusun iklim utama adalah temperatur dan curah hujan, sehingga untuk mengetahui tipe iklim suatu wilayah perlu mengetahui karakteristik temperatur dan curah hujan. Keadaan iklim di Kecamatan Kota Ternate Selatan pada dasarnya sama dengan keadaan iklim wilayah-wilayah di Provinsi Maluku Utara, yaitu beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 27°C - 32 °C dengan curah hujan rata-rata antara 1000 – 2000 mm/tahun. Kelembaban nisbi rata-rata yang tercatat pada stasiun Metereologi dan Geofisika Baabullah Ternate (2008) adalah 86% (*higher*) pada bulan Januari dan April dan 78% (*lower*) pada bulan Agustus.

Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson wilayah ini beriklim tipe A dan B, sedangkan menurut klasifikasi Koppen bertipe A. Wilayah Kota Ternate

sama juga wilayah lain dipengaruhi oleh 4 musim, yaitu musim utara atau barat dan musim selatan atau timur dan 2 musim peralihan. Musim angin berlangsung setiap tahun dengan kecepatan rata-rata 12 km/jam yang dipengaruhi oleh keadaan angin musim utara dan musim selatan diselingi musim pancaroba yang merupakan transisi antara kedua musim tersebut. Musim utara terjadi pada bulan Oktober hingga Maret dan musim selatan terjadi pada bulan April hingga September.

Data Stasiun Meteorologi dan Geofisika Baobullah Ternate pada tahun 2008 menunjukkan bahwa musim hujan jatuh pada bulan Januari dan Nopember dengan curah hujan tertinggi dengan jumlah hari hujan 20 hari dan curah hujan terendah pada bulan Agustus dengan jumlah hari hujan 12 hari. Suhu udara maksimum berkisar 29,5-32,3°C dan suhu minimum berkisar 22,1-24,1°C dengan suhu rata-rata 26,6°C. Kelembaban nisbi berkisar 75-87% dengan rata-rata 81,3%. Persentase penyinaran matahari rata-rata berkisar 37% (Pebruari)-91% (Agustus). Kecepatan angin pada bulan Nopember-Mei bertiup dari arah Barat Daya dengan kecepatan maksimum 16 - 28 knot, bulan Juni-September bertiup dari arah Selatan dengan kecepatan maksimum 21 knot.

A.4 Hidro Oseanografi

Informasi dasar tentang kondisi lingkungan perairan, sangat diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan kawasan perairan pantai. Berupa pengetahuan akan karakteristik fisik dan dinamika perairan sehingga diperlukan data dari parameter oseanografi yang diperoleh dari data sekunder.

Perairan Kota Ternate secara langsung berbatasan dengan laut lepas, sehingga kondisi yang terjadi di perairan ini dipengaruhi oleh karakteristik perairan yang berbatasan dengan wilayah perairan Kota Ternate. Beberapa laut yang mempengaruhi secara langsung perairan Kota Ternate adalah laut Maluku. Selain memiliki topografi yang landai sampai terjal, di perairan Kota Ternate terdapat beberapa palung yang dalam. Kedalaman perairan Kota Ternate mulai dari daerah *inshore* sampai pada daerah *offshore* adalah 200-3000 meter. Sedangkan pada daerah atau perairan pantai yang terlindung dan memiliki topografi yang landai terutama pada kawasan pulau-pulau kecil dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter.

Kondisi parameter oseanografi perairan Kota Ternate tidak jauh berbeda dengan perairan tropis lainnya. Kondisi ini bisa terjadi secara harian, tahunan dan jangka panjang. Kondisi pasang surut bergantung pada tipe pasang surut yang terjadi di perairan tersebut, terutama di perairan yang kedalamannya dangkal (*inshore*), sedangkan untuk pergerakan arus dan gelombang bergantung pada topografi pulau. Selat Halmahera yang berhadapan langsung dengan Pulau Halmahera kondisi oseanografi di perairan ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan angin yang besar.

Pasang surut (pasut) adalah proses naik turunnya muka laut secara hampir periodik karena gaya tarik benda-benda angkasa, terutama bulan dan matahari. Naik turunnya muka laut dapat terjadi sekali sehari (pasut tunggal), atau dua kali sehari (pasut ganda). Sedangkan pasut yang berperilaku diantara keduanya disebut sebagai pasut campuran.

Pasang surut yang terjadi di perairan Kota Ternate adalah tipe pasang diurnal, yaitu pergerakan naik turunnya permukaan air laut pada interval waktu yang sama antara siang dan malam. Selanjutnya pergerakan arus yang berlangsung menurut skala waktu dapat dibedakan menjadi arus musiman akibat perubahan musim, yaitu Barat dan Timur dan arus harian yang dipengaruhi oleh pergerakan pasang surut. Data Dishidros TNI-AL (1992) dalam Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP, 2009) kecepatan arus tertinggi terjadi di selat Maitara mencapai 90 ml/jam, sedangkan arus lokal bervariasi pada saat arah angin menuju Selatan sampai Barat Daya dan ke arah Utara sampai Barat dengan variasi antara 1 – 45 cm/detik.

Parameter oseanografi penting lainnya adalah gelombang, informasi mengenai kondisi gelombang dapat memprediksikan perairan dan aktivitas di laut termasuk aktivitas perikanan tangkap. Variasi pergerakan gelombang berdasarkan data Dishidros TNI-AL (1992) dan LON-LIPI Ambon (1994) dalam Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP, 2009) gelombang besar terjadi pada bulan September-Desember dengan ketinggian mencapai 1,50 – 2,00 meter.

Pola pasut di beberapa tempat khususnya diperairan Selat Maitara diperkirakan memiliki ciri yang sama dengan pola pasut diperairan pantai barat Halmahera secara keseluruhan. Pola pasut di daerah ini merupakan rambatan pasut dari perairan yang jauh lebih luas yaitu lautan Pasifik. Sifat pasang surut (pasut) di perairan Kota Ternate (2008) bersifat campuran, dominasi pasut ganda. Dikatakan pasut ganda (*semidiurnal tide*) apabila terjadi dua kali pasang

dan dua kali surut dalam satu hari.

B. Hasil dan Pembahasan

B.1 Kependudukan

Penduduk Kecamatan Kota Ternate Selatan sampai tahun 2008 tercatat sebanyak 52.710 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin, menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak mendominasi penduduk Kecamatan Kota Ternate Selatan yaitu sebanyak 26.404 jiwa (50 %) sedangkan jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 26.306 jiwa (50 %) dengan jumlah rumah tangga 11.598 KK. Sementara itu komposisi penduduk kecamatan Kota Ternate Selatan mayoritas beragama Islam. Berdasarkan agama yang dianut oleh penduduk kecamatan Kota Ternate Selatan terdiri dari : penduduk yang beragama Islam sebanyak 44.902 jiwa, Kristen sebanyak 147 jiwa, dan Katholik sebanyak 38 jiwa.

B.2 Mata Pencarian

Berdasarkan jenis mata pencarian penduduk kecamatan Kota Ternate pada tahun 2008, sebagian besar bermata pencarian di sektor pertanian, nelayan dan pedagang. Sektor perikanan mempunyai proporsi sebesar 1.751 jiwa yang kesemuanya bergerak dibidang perikanan laut 26,10% serta dibidang perdagangan 1.502 jiwa atau sebesar 22,40 % dan pegawai sebanyak 3.431 jiwa atau 51,50 %. Data selengkapnya mengenai komposisi penduduk menurut mata pencarian di Kecamatan Kota Ternate Selatan dapat disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian di Kecamatan Kota Ternate Selatan

Mata Pencapaian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Nelayan	1.751	26,1
Pedagang	1.502	22,4
Pegawai	3.431	51,5
Jumlah	6.684	100,00

Sumber : Data Monografi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Mei 2009

Kegiatan perikanan laut dalam hal ini meliputi nelayan pengusaha dan nelayan buruh. Di sektor perdagangan juga melibatkan perikanan laut karena sebagian dari sektor ini memiliki obyek perdagangan ikan laut baik berupa ikan basah, kering/asin maupun ikan asap.

B.3 Pendidikan dan Kesehatan

Kecamatan Kota Ternate Selatan mempunyai fasilitas pendidikan cukup memadai sampai tingkat SLTA. Jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) baik Negeri maupun Swasta hingga tahun 2008 sebanyak 5.375 orang. Jumlah siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada tahun yang sama berjumlah 4.537 orang. Jumlah siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 6.735 orang. Data selengkapnya mengenai komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di kecamatan Kota Ternate Selatan disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2008

No.	Tingkat Pendidikan	Murid	Prosentase
1	SD	5.375	32,20
2	SLTP	4.537	27,20
3	SLTA	6.735	40,60

Sumber : Data Monografi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Mei 2009

Prasarana dan sarana kesehatan di kecamatan Kota Ternate Selatan cukup memadai. Jumlah prasarana kesehatan yang ada sebanyak 22 buah yang terdiri dari 1 buah rumah sakit umum, 2 buah puskesmas, 4 buah puskesmas pembantu, 9 buah praktek dokter, dan apotik 6 buah. Tenaga medis di kecamatan Kota Ternate Selatan masih sangat terbatas, jumlah dokter baru 19 orang, mantri kesehatan 37 orang. Tenaga bidan dan perawat masing - masing 67 orang serta dukun bayi 12 orang.

B.4 Prasarana dan Sarana

Kebijakan pengembangan wilayah kecamatan Kota Ternate Selatan lebih diarahkan untuk memacu pengembangan wilayah yang terintegrasi secara fisik telah didukung oleh prasarana dan sarana yang cukup memadai. Sistem sarana transportasi dari dan ke Kecamatan Kota Ternate Selatan yang ada saat ini moda transportasi darat berupa angkutan jalan raya dan moda transportasi laut berupa speed boat. Kondisi prasarana jalan dan laut ini merupakan parameter yang menentukan kelancaran distribusi ikan dari PPN Ternate ke daerah hinterlandnya atau sebaliknya.

Demikian juga kondisi sarana transportasi ke dan dari PPN Ternate juga akan mempengaruhi kelancaran distribusi ikan. Jenis sarana transportasi cukup beragam tergantung dari jarak tempuh. Ini akan berpengaruh terhadap kualitas ikan yang akan dipasarkan sampai ke tingkat konsumen. Sarana transportasi yang menghubungkan PPN Ternate dengan daerah sekitar tempat pemasaran ikan dalam kota Ternate dan kota lainnya cukup lengkap dan beragam karena dekat dengan pusat kota pemerintahan Kota Ternate. Bahkan untuk

mengantisipasi kelancaran distribusi, telah dilakukan pembuatan jalan lingkar pantai yang menghubungkan Pelabuhan Ahmad Yani dengan PPN Ternate. Pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti listrik, telekomunikasi, air minum dan lain - lain cukup tersedia.

4. Peran dan Fungsi PPN Ternate

4.1 Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dibangun pada tahun 1987 berada dalam Kelurahan Bastiong Talangame Kota Ternate propinsi Maluku Utara terletak pada posisi 00°46' sampai 03°33' Lintang Utara dan 127°22'41,10" dan merupakan salah satu dari 7 pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan yang telah melaksanakan program revitalisasi pelabuhan perikanan dalam tahun 2005 (DKP, 2009).

Berdasarkan data sekunder dan observasi di lapangan maka hasil penilaian terhadap peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Penilaian Peranan PPN Ternate

No.	Peran	Penjelasan secara ringkas	Ket.	
				%
I.	Peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas produksi :			
a.	Tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan.	Hasil tangkapan perikanan nelayan didaratkan pada dermaga tempat pembongkaran dimuka transit set pelabuhan perikanan, umumnya dilakukan pagi hari.	+	100
b.	Tempat untuk persiapan operasi penangkapan (mempersiapkan alat tangkap, bahan bakar, air, perbekalan kelaut, ataupun perbaikan kapal).	Fasilitas untuk operasi penangkapan telah tersedia dan dipergunakan oleh nelayan dengan sebaik-baiknya.	+	100

No.	Peran	Penjelasan secara singkat		%
c.	Tempat untuk berlabuh kapal perikanan.	Bagi kapal yang akan bersandar dan menunggu antrian tempat, telah memanfaatkan kolam pelabuhan	+	100
II. Sebagai pusat distribusi :				
a.	Tempat transaksi jual beli ikan.	Transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh para pedagang ikan dilaksanakan pada dermaga dan tempat pemasaran ikan dengan sistem transaksi langsung tanpa melalui mekanisme lelang.	+ -	75
b.	Sebagai terminal untuk mendistribusikan ikan.	Distribusi ikan dilakukan setelah dilaksanakan transaksi jual beli antara nelayan dan para pedagang ikan, ikan didistribusikan ke perusahaan, pasar tradisional dan dipasarkan langsung.	+	100
c.	Sebagai terminal ikan hasil laut.	Ikan hasil tangkapan nelayan dibongkar pada dermaga bongkar dengan difasilitasi keranjang ikan dan timbangan ikan.	+	100
III. Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan :				
a.	Kehidupan nelayan	Nelayan telah memanfaatkan pelabuhan perikanan untuk berbagai aktivitas, antara lain : pemenuhan kebutuhan sembako, perbaikan kapal dan alat tangkap, kesehatan, dll.	+ -	80
b.	Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan	Untuk memperoleh dana segar bagi pembiayaan operasi penangkapan, telah dilayani oleh lembaga keuangan, yaitu LPPM3 dan Pegadaian Syariah yang berlokasi di pelabuhan perikanan.	+ -	90
c.	Lintas dan jaringan informasi antara nelayan dengan pihak luar.	Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi nelayan, pelabuhan perikanan telah melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala dan telah membagikan peta fishing ground serta mendirikan perpustakaan perikanan.	+ -	90

Sumber : Data sekunder setelah diolah (2009)

Keterangan :

- + = Operasional sudah optimal (optimal dalam pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya).
- ± = Operasional belum optimal (telah digunakan tetapi belum optimal), contoh : telah ada sarana tempat pelelangan (TPI), namun masih banyak para pedagang ikan tidak menggunakan sarana tersebut.
- = Operasional tidak optimal (tidak digunakan sesuai peruntukannya).

4.1.1 Pelabuhan Perikanan Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Produksi :**a. Tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan.**

Hasil tangkapan perikanan pada umumnya dilakukan pembongkaran pagi hari di dermaga bongkar yang terletak di muka transit set. Ikan dibongkar langsung oleh nelayan dari dalam peti ikan, selanjutnya ditempatkan pada keranjang ikan. Dari hasil wawancara dengan para nelayan diperoleh keterangan bahwa ikan yang dibongkar merupakan hasil tangkapan kapal pajeko (*mini purse seine*) yang diangkut oleh kapal penampung. Kapal penampung setiap hari pergi pulang dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate ke daerah penangkapan (*fishing ground*) untuk mengangkut ikan hasil tangkapan (jenis ikan pelagis, misal : kembung, layang, selar, tongkol). Untuk jenis ikan cakalang dan tuna (jenis *Madidihang*) dibawa langsung oleh kapal penangkap dan didaratkan pada dermaga I. Tetapi untuk jenis ikan karang (kakap, kuwe, kerapu, dll) didaratkan melalui jalan darat, sebab ikan-ikan tersebut dikirim dari daerah penampungan ikan (Halmahera Selatan) yang disimpan dalam peti ikan (*cool box*) dan diangkut dengan menggunakan kapal penumpang. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa ikan yang didaratkan pada PPN Ternate untuk setiap hari rata-rata 8.068 kg (periode bulan Pebruari s/d Mei 2009) dengan nilai Rp15.529.450,-. Data pendaratan dan nilai ikan

bulan Pebruari s/d Mei 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Pendaratan dan Nilai Ikan bulan Pebruari s/d Mei Tahun 2008 & 2009

No.	Bulan	Tahun 2008		Tahun 2009	
		Volume (ton)	Nilai (Rp1.000,-)	Volume (ton)	Nilai (Rp1.000,-)
1.	Pebruari	479	3.756.036	329	3.865.700
2.	Maret	402	2.845.806	262	3.568.850
3.	April	305	3.170.435	299	3.134.900
4.	Mei	255	3.287.532	510	4.960.000
	J u m l a h	1.441	13.059.809	1.291	15.529.450

Sumber : Data primer dan sekunder setelah diolah (2009)

Sebagai pembanding, disajikan data jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate pada tahun 2008 adalah sebesar 1.441 ton dengan nilai penjualan sebesar Rp13.059.809.000,- atau rata-rata pendaratan ikan per hari pada tahun 2008 adalah sebanyak 12 ton. Pendaratan ikan setiap tahun relatif sama dengan tahun sebelumnya, tetapi tergantung dari aktifitas nelayan dalam kegiatan pengumpulan/penangkapan ikan di fishing ground. Pendaratan ikan pada tahun 2009 (dari bulan Pebruari s/d Mei) sebesar 1.291.000 kg terjadi penurunan sebesar 150.000 kg atau 10,40 % bila dibandingkan tahun 2008 (periode Pebruari s/d Mei = 1.441.000 kg), tetapi tahun 2009 mempunyai nilai yang lebih tinggi.

b. Tempat untuk persiapan operasi penangkapan (mempersiapkan alat tangkap, bahan bakar, air, perbekalan kelaut, ataupun perbaikan kapal).

b.1 Tempat mempersiapkan alat tangkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate telah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai bagi nelayan dalam memenuhi kebutuhan

persiapan operasi penangkapan. Dari hasil penelitian dan pengamatan di PPN Ternate terdapat tempat penjemuran alat tangkap dan ruangan untuk mempersiapkan alat tangkap, ruangan tersebut oleh nelayan pajeko digunakan sebagai tempat untuk memperbaiki dan menyusun alat tangkap (jaring mini purse seine) tersebut dengan rapih sebelum dipindahkan ke kapal penangkap. Menurut keterangan yang diperoleh dari nelayan bahwa jaring yang ditata dengan rapih dimaksudkan untuk memudahkan dalam setting yaitu sewaktu melingkar gerombolan ikan di daerah fishing ground. Dalam laporan tahunan 2008 PPN Ternate tercatat bahwa jenis alat tangkap yang dominan di PPN Ternate yaitu : pole & line, purse seine mini, hand line, gill net, muorami, dan bagan.

b.2 Pelayanan air.

Air bersih yang dikonsumsi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate bersumber dari air baku dalam tanah yang diperoleh dari 1 (satu) titik sumur bor milik Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang berjarak \pm 500 m, terletak diluar PPN Ternate. Dalam laporan tahunan 2008 PPN Ternate disebutkan bahwa sumur bor tersebut dibangun pada tahun anggaran 1986/1987, dari hasil wawancara dengan pegawai pelabuhan perikanan diperoleh keterangan bahwa debit air yang mengalir mulai berkurang dan untuk meningkatkan debit air tersebut pada tahun yang akan telah direncanakan penambahan satu titik sumur bor, mengingat kebutuhan air bersih semakin meningkat dengan adanya pengembangan lahan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Jumlah pelayanan air bulan Pebruari sampai

dengan bulan Mei tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Jumlah pelayanan air bulan Pebruari s/d Mei Tahun 2008 dan 2009

No.	Bulan	Tahun 2008	Tahun 2009
		Volume (ton)	Volume (ton)
1	Pebruari	579	877
2	Maret	501	896
3	April	644	310
4	Mei	419	741
	J u m l a h	2.143	2.824

Sumber : Data primer dan sekunder setelah diolah (2009)

Dari tabel tersebut dapat diketahui jumlah pelayanan air bersih selama tahun 2008 sebanyak 2.143 ton atau rata-rata 17,85 ton per hari, sedangkan dari hasil penelitian dari bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 diperoleh data penyaluran air sebanyak 2.824 ton dengan rata-rata penyaluran air 23,53 ton/per hari, bila dibandingkan dengan penyaluran air tahun 2008 terjadi kenaikan sebesar 681 ton atau 31,77 %. Untuk bulan April terjadi penurunan 51,96 %, hal ini disebabkan adanya cuaca buruk sehingga nelayan kurang pergi mencari ikan, akibat hal tersebut penyaluran air menjadi berkurang. Air yang disalurkan pada umumnya digunakan sebagai pembuatan es, kebutuhan nelayan dan masyarakat perikanan.

b.3 Pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Salah satu kebutuhan nelayan untuk kegiatan operasi penangkapan ikan adalah bahan bakar minyak (BBM) berupa solar, sebab mesin kapal yang digunakan oleh nelayan pada umumnya adalah mesin diesel. Bahan bakar minyak (solar) yang disalurkan di PPN Ternate dikelola oleh Koperasi KPN. Mina Sejahtera, dari hasil wawancara dengan petugas koperasi tersebut

diperoleh keterangan bahwa solar yang dijual kepada nelayan dengan harga bersubsidi yaitu Rp4.500,- per liter dan alokasi untuk kapal motor yang mempunyai *Gross Tonnage* (GT) lebih dari 30 adalah sebanyak 75 kiloliter (kl) per bulan. Tetapi dari hasil penelitian hal tersebut belum pernah terlaksana, sebab kapal milik nelayan yang bertambat di PPN Ternate kebanyakan dibawah 30 GT. Penyaluran bahan bakar minyak (solar) dari bulan Pebruari 2009 sampai dengan Mei 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) solar bulan Pebruari s/d Mei Tahun 2008 dan 2009 melalui KPN. Mina Sejahtera

No.	Bulan	Tahun 2008		Tahun 2009	
		Volume (kl)	Nilai (Rp1.000,-)	Volume (kl)	Nilai (Rp1.000,-)
1.	Pebruari	50	215.000	50	225.000
2.	Maret	55	236.500	50	225.000
3.	April	65	279.500	30	135.000
4.	Mei	45	205.938	50	225.000
	J u m l a h	215	936.938	180	810.000

Sumber : Data primer dan sekunder setelah diolah (2009)

Data penyaluran BBM (solar) yang diperoleh dari Laporan Tahunan 2008 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, adalah rekapitulasi (penjumlahan) dari semua penyaluran solar ke nelayan dan kapal non perikanan. Untuk kapal non perikanan dilayani oleh pihak swasta yang berusaha di PPN Ternate.

b.4 Penyaluran es

Kebutuhan es untuk perbekalan nelayan melaut disuplay dari pabrik es milik PPN Ternate, PT.Mitra Nelayan Mandiri dan pabrik es milik swasta yang berlokasi diluar kawasan PPN Ternate. Menurut para nelayan dengan

adanya keberadaan pabrik es tersebut sangat membantu, sebab es yang dihasilkan pabrik tersebut kualitasnya cukup baik dalam mempertahankan mutu ikan, sehingga ikan hasil tangkapan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dan nelayan memperoleh pendapatan yang cukup tinggi. Dari hasil penelitian diperoleh data penyaluran es selama 4 bulan (Pebruari s/d Mei 2009) seperti terlihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Penyaluran Es bulan Pebruari s/d Mei 2008 dan bulan Pebruari s/d Mei 2009

No.	Bulan	Pebruari s/d Mei 2008		Pebruari s/d Mei 2009	
		PPN Ternate (ton)	Swasta (ton)	PPN Ternate (ton)	Swasta (ton)
1	Pebruari	57	537	30	393
2	Maret	50	547	20	284
3	April	36	350	26	310
4	Mei	22	495	38	425
	Jumlah	165	1.929	114	1.412

Sumber : Data primer dan sekunder setelah diolah (2009)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penyaluran es oleh PPN Ternate pada bulan Pebruari 2009 sampai dengan Mei 2009 mengalami penurunan sebesar 51 ton atau 30, 90 % jika dibandingkan dengan bulan Pebruari sampai dengan bulan Mei tahun 2008 sebanyak 165 ton, sedangkan es yang disalurkan oleh pihak swasta mengalami penurunan juga, yaitu sebesar 517 ton atau 26,80 %. Menurut petugas dari PPN Ternate, hal ini diakibatkan oleh kurangnya para nelayan pergi melaut, sehingga kebutuhan es sebagai perbekalan operasional penangkapan kurang terjual.

c. Tempat Berlabuh dan Bertambat Kapal

Kapal milik nelayan sebelum mendapat izin untuk bertambat terlebih dahulu melakukan labuh diperairan kolam pelabuhan perikanan. Berdasarkan keterangan dari petugas dermaga PPN Ternate, disebutkan bahwa kolam pelabuhan terbagi menjadi dua, yaitu kolam pelabuhan dengan kedalaman 6 meter dipergunakan untuk kapal-kapal yang mempunyai bobot lebih dari 30 *gross tonage* (GT), sedangkan kolam pelabuhan dengan kedalaman 2,5 meter dipergunakan bagi kapal-kapal dengan bobot dibawah 30 GT.

Bagi kapal-kapal yang melakukan tambat, tempat telah diatur menurut keperluannya. Untuk kapal yang melakukan bongkar hasil tangkapan ditempatkan di dermaga I atau di dermaga depan transit set, sedangkan bagi kapal-kapal yang melakukan pengisian perbekalan ditempatkan di dermaga II. Tetapi untuk kapal-kapal dibawah 10 GT pada umumnya melaksanakan bongkar hasil tangkapan dan pengisian perbekalan pada satu tempat, yaitu di dermaga I. Menurut keterangan para nelayan, hal tersebut dilakukan dikarenakan keengganan nelayan memindahkan kapal akibat dari arus pada kolam pelabuhan cukup deras. Perlu diketahui bahwa perairan yang menjadi kolam pelabuhan merupakan selat antara Pulau Ternate dan Pulau Tidore, yang mempunyai arus pasang surut cukup deras.

Kapal-kapal yang bertambat pada dermaga PPN Ternate mulai bulan Pebruari 2009 sampai dengan Mei 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Jumlah Kapal Yang Bertambat Pada bulan Pebruai s/d Mei 2008 dan Pebruari s/d Mei 2009

No.	Bulan	Pebruari s/d Mei 2008 (kali)	Pebruari s/d Mei 2009 (kali)
1	Pebruari	450	292
2	Maret	536	241
3	April	424	230
4	Mei	641	377
	J u m l a h	2.051	1.140

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Jumlah kapal yang tambat periode bulan Pebruari 2008 sampai dengan Mei 2008 sebanyak 2.051, berarti pada tahun 2009 (periode Pebruari s/d Mei) mengalami penurunan sebanyak 911 kali atau sebesar 44,41 %. Menurut petugas dari PPN Ternate, hal ini disebabkan pada bulan Pebruari sampai dengan Mei tahun 2009 cuaca di perairan Maluku Utara kurang baik (angin kencang) sehingga nelayan kurang yang pergi melaut/operasi penangkapan.

4.1.2 Sebagai Pusat Distribusi

a. Tempat transaksi jual beli ikan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dilengkapi dengan Tempat Pelelangan ikan (TPI) dan Pusat Pemasaran Ikan yaitu PT. Dwi Poli Perkasa, PT. Era Mandiri Cemerlang, UD. Hermanto, UD. Agus Mandiri dan UD. Irwan yang dapat menampung ikan hasil tangkapan yang didaratkan dan dipasarkan di pelabuhan perikanan. Penyelenggaraan pelelangan ikan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hal ini disebabkan karena penyelenggara pelelangan dalam hal ini KUD Nelayan Bersatu, yang telah ditunjuk belum melaksanakan pelelangan dimana hasil tangkapan nelayan langsung dibongkar dan didaratkan ke perusahaan perikanan tanpa melalui proses pelelangan.

Aktivitas pelelangan ikan untuk menentukan kelayakan harga ikan baik bagi produsen/nelayan maupun bagi pedagang masih belum berjalan dengan baik, dimana hanya dilakukan penimbangan saja atau pencatatan karena transaksi penjualan telah dilakukan oleh pemilik dan pedagang yaitu sudah adanya ikatan antara nelayan dengan pedagang setempat atau dikenal dengan istilah *dibo-dibo*.

b. Terminal ikan hasil laut

Hasil perikanan merupakan produk yang mudah rusak/busuk (*perisable food*) jika tidak ditangani secara tepat dan cepat. Salah satu peran PPN Ternate sebagai terminal ikan hasil laut adalah menyediakan tempat penampungan ikan yang mempunyai instalasi pendingin. Oleh karena itu untuk menangani hal tersebut PPN Ternate telah menyediakan sarana *air blast freezer* (ABF) dan *cold storage* yang dapat disewa oleh para nelayan maupun pedagang ikan dalam penanganan pasca panen, dengan harapan ikan tetap segar dan tahan lama. Apabila pada saat kurang musim ikan, hasil dari penangkapan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pasar ikan sehingga nilai jual ikan tetap tinggi. Pemanfaatan cold storage selama bulan Pebruari sampai dengan Mei tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dilihat seperti Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Sewa Cold Storage di Pelabuhan Perikanan Nusantar Ternate Periode Bulan Pebruari s/d Mei tahun 2008 dan 2009

No.	BULAN	TAHUN 2008 NILAI (Rp.)	TAHUN 2009 NILAI (Rp.)
1.	Pebruari	3.500.000	6.000.000
2.	Maret	9.500.000	5.000.000
3.	April	-	2.500.000
4.	Mei	5.500.000	5.500.000
	Jumlah	18.500.000	19.000.000

Sumber : Data primer dan sekunder setelah diolah (2009)

Dari tabel tersebut, dapat diketahui pada bulan April pendapatan dari sewa cold storage mengalami penurunan. Menurut petugas dari PPN Ternate yang menangani jasa sewa sarana tersebut dikatakan bahwa pada bulan April ikan yang tertangkap oleh nelayan sangat kurang (sedikit) dan hanya mampu untuk memenuhi pasar lokal, sehingga pengusaha ikan beku kurang mendapat ikan hasil tangkapan nelayan, akibatnya ikan yang dibekukan hanya sedikit dan sewa *cold storage* (ruang pendingin) pun menjadi sedikit.

4.1.3 Sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat Nelayan a. Kehidupan nelayan

Nelayan disekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate memanfaatkan prasarana dan sarana pelabuhan sebagai tempat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, dari mulai mempersiapkan operasi penangkapan yaitu dengan memenuhi kebutuhan air, es, garam, bahan bakar, sembako hingga keperluan untuk mandi dapat terpenuhi. Bagi nelayan dengan adanya hal tersebut sangat membantu dan meringankan dikarenakan barang-barang yang dijual harganya cukup terjangkau dan tidak jauh berbeda dengan harga pasar, selain itu dapat menghemat waktu dikarenakan pengadaan kebutuhan tersebut tidak terlalu lama.

Saat terang bulan (bulan purnama) nelayan pajeko pada umumnya tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan, dikarenakan gerombolan ikan (*schooling*) yang menjadi sasaran penangkapan tidak terbentuk (ikan berpencar), akibat dari cahaya bulan yang terang menyinari permukaan laut (ikan bersifat *fototaksis*). Pada saat tersebut para nelayan memanfaatkan sarana pelabuhan perikanan untuk merawat dan memperbaiki jaring mini purse

seine atau kapal penangkap.

b. Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan

Usaha penangkapan ikan yang dilaksanakan oleh nelayan merupakan usaha yang padat modal dan hasil yang diperoleh tidak menentu, hal ini membuat para nelayan pada saat paceklik sering kekurangan modal. Untuk memenuhi biaya operasi penangkapan/melaut tersebut pihak PPN Ternate telah bekerjasama dengan lembaga keuangan, yang dalam hal ini diwakili oleh Pegadaian telah didirikan Pegadaian Syariah, selain itu berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate telah menghadirkan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPPM3). Dengan adanya dua lembaga keuangan tersebut, nelayan sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan biaya operasional melaut, terutama pada musim paceklik.

c. Lalu lintas dan jaringan informasi antara nelayan dan pihak luar.

Sebagai instansi pemerintah PPN Ternate berkewajiban memfasilitasi sarana/tempat penyuluhan/sosialisasi/pelatihan bagi nelayan dengan harapan nelayan dapat menyerap kemajuan teknologi dan memanfaatkan teknologi tersebut dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan. Dengan semakin sering mendapatkan penyuluhan dari nara sumber yang berasal dari Departemen Kelautan dan Perikanan atau Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku Utara yang memberikan materi tentang pentingnya penangkapan ikan yang ramah lingkungan, maka kelestarian sumber daya ikan dapat terjaga dan berkelanjutan.

Pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) telah dilaksanakan secara berkala, dengan maksud agar kelompok nelayan yang telah mendapatkan bantuan berupa kapal penangkap, alat tangkap, maupun alat bantu penangkapan yang disalurkan oleh PPN Ternate dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dapat bergulir kepada anggota yang lain dalam satu kelompok, dengan demikian kesejahteraan nelayan semakin meningkat.

Untuk maksud tersebut PPN Ternate telah menyediakan Gedung Balai Pertemuan Nelayan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan nelayan dalam rangka penyuluhan/sosialisasi perikanan dan melaksanakan kursus / pelatihan kegiatan perikanan. Selain itu gedung tersebut juga dimanfaatkan pula oleh kantor dinas terkait sebagai tempat dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi. Tingkat pemanfaatan Balai Pertemuan Nelayan dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Penggunaan Balai Pertemuan Nelayan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2007 s/d Tahun 2008

NO.	B U L A N	JUMLAH PEMANFAATAN			
		Tahun 2007		Tahun 2008	
		Kali	Peserta	Kali	Peserta
1.	Januari	2	60	2	60
2.	Pebruari	2	60	5	174
3.	Maret	4	141	6	410
4.	April	1	30	7	331
5.	M e i	1	30	7	168
6.	Juni	1	30	4	84
7.	Juli	2	80	4	114
8.	Agustus	7	247	6	128
9.	September	3	65	-	-
10.	Oktober	2	80	4	270

NO.	B U L A N	JUMLAH PEMANFAATAN			
		Tahun 2007		Tahun 2008	
		Kali	Peserta	Kali	Peserta
11.	Nopember	5	527	9	241
12.	Desember	2	50	3	210
	Jumlah	32	1.400	57	2.190

Sumber : Data Laporan Tahunan PPN Ternate (2008)

Dari Tabel 4.10, dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 78 % dibandingkan tahun 2007, menurut staf PPN Ternate hal tersebut disebabkan telah dilaksanakan perluasan dan renovasi gedung tersebut yang cukup representatif, sehingga semakin banyak orang yang berminat untuk menyewa sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.

4.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap mulai dari kegiatan penangkapan ikan di daerah fishing ground, pendaratan hasil tangkapan sampai pendistribusian ikan dan olahannya masih layak untuk dikembangkan sesuai dengan rencana induk (master plan) tata ruang PPN Ternate yang telah dibuat. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik, dimana PPN Ternate yang terletak di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara mempunyai fasilitas yang cukup lengkap sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari Rencana Untuk Tata Ruang (RUTR) yang telah dibuat oleh Bappeda Kota Ternate, dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang mendukung pengembangan PPN Ternate antara lain :

1. Pembuatan jalan Lingkar Pantai dari Pelabuhan A. Yani – Mangga Dua.

2. Penetapan kawasan perikanan dapat menunjang kawasan wisata bahari.

Implementasi fungsi pelabuhan perikanan yaitu telah dioperasionalkannya seluruh sumberdaya yang ada. Keluaran dari operasional tersebut adalah berupa pelayanan terhadap pengguna/masyarakat pesisir.

Berdasarkan data sekunder dan observasi di lapangan maka hasil penilaian terhadap fungsi yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Penilaian Fungsi PPN Ternate

Fungsi	Penjelasan secara ringkas	Ket.	
			%
a. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan	Telah diadakan pelatihan pembinaan KUB, sosialisasi code conduct responsible of fisheries (CCRF), penyebaran peta fishing ground dan pelatihan penanganan ikan diatas kapal, dll.	+	100
b. Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawasannya di dermaga perikanan	Telah dilaksanakan pelayanan bagi kapal-kapal perikanan dan pengawasan perikanan selama 24 jam di dermaga 1 dan 2 yang dilengkapi dengan fasilitas air, bbm (solar) dan penerangan.	+	100
c. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	Pemasaran ikan terutama untuk ekspor yang langsung masuk ke perusahaan berupa ikan segar kategori ukuran ekspor dan di luar ukuran ekspor masuk dalam pasar disekitar wilayah setempat maupun antar wilayah dalam wilayah propinsi Maluku Utara	+	100
d. Pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan	Petugas pengawasan dan pembinaan mutu belum maksimal, dan prasarana pasca panen dan sanitasi lingkungan di TPI kurang memadai, sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan mutu, keamanan dan daya saing produk perikanan.	-	50
e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan	Belum efektif pusat informasi data statistik, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan petugas pengelola informasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi yang up to date. Program peningkatan SDM sudah mulai dikoordinasikan dengan instansi terkait.	+ -	90

Fungsi	Penjelasan secara ringkas	Ket.	
			%
f. Pelayanan bongkar muat	Sudah berjalan kegiatan bongkar muat hasil perikanan, namun demikian masih diperlukan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik	+ -	90
g. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan	Nelayan telah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang ada dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki PPN Ternate	+	100
h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan	Upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan telah dilaksanakan dengan mengadakan patroli yang menggunakan kapal pengawasan perikanan dan monitoring hasil perikanan	- +	95
i. Pelaksanaan kesyahbandaran	Penertiban perijinan bagi kapal perikanan yang akan melaksanakan penangkapan/pemuatan ikan dilaksanakan dengan mengeluarkan Surat Ijin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh syahbandar perikanan	+	100
j. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan	Hasil riset kelautan dan perikanan yang telah diuji coba dan dibukukan sudah dipublikasikan melalui perpustakaan yang ada di PPN Ternate, namun demikian masyarakat perikanan belum memanfaatkan secara optimal	- +	90
k. Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (k.k.) kebakaran dan pencemaran)	Kegiatan K3 telah dilaksanakan dengan dengan baik, hanya pencemaran lingkungan belum sepenuhnya dilaksanakan yaitu masih banyak bangkai ikan yang dibuang di kolam pelabuhan oleh nelayan.	- +	95

Sumber : Data sekunder setelah diolah (2009)

Keterangan :

- + = Operasional sudah optimal (optimal dalam pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya).
- ± = Operasional belum optimal (telah digunakan tetapi belum optimal), contoh : telah ada sarana tempat pelelangan (TPI), namun masih banyak para pedagang ikan tidak menggunakan sarana tersebut.
- = Operasional tidak optimal (tidak digunakan sesuai peruntukannya).

Dari hasil penelitian segenap fungsi PPN Ternate yang telah dilakukan secara baik (positif) yaitu pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat Nelayan, pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawasan perikanan, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, pelaksanaan kesyahbandaran. Sedangkan fungsi yang belum dijalankan secara optimal adalah pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari dan pelaksanaan fungsi karantina ikan.

Adapun pelaksanaan fungsi dan peran pelabuhan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan

Fungsi pertama yaitu sebagai pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan tidak terlepas dari masyarakat pesisir, seperti pedagang ikan, pengolah dan pelaku ekonomi perikanan lainnya. Hal ini diarahkan agar dapat menunjang kegiatan masyarakat nelayan yang berbasis di pelabuhan perikanan tersebut.

Sulitnya akses ke sumber modal dan rendahnya ketrampilan dan kemampuan dalam mengadopsi teknologi penangkapan yang lebih efisien serta kecilnya skala usaha pada sebagian nelayan tradisional, maka perlu diupayakan pengembangan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan penyuluhan. Mengingat pelabuhan perikanan merupakan tempat berkumpulnya nelayan dan tempat yang paling sesuai dalam melaksanakan pengembangan masyarakat pesisir.

Nelayan pada umumnya adalah nelayan tradisional yang bekerja dengan sistem bagi hasil atau upah. Nelayan-nelayan ini umumnya berpendidikan rendah tapi memiliki ketrampilan yang didapatkan dari pengalaman. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada nelayan dan para pedagang ikan di Pelabuhan

Perikanan Nusantara Ternate antara lain berupa kegiatan sosialisasi *Code Conduct Responsible of Fisheries* (CCRF) atau penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan penanganan ikan diatas kapal.

Dalam kegiatan sosialisasi CCRF ini para nelayan diberi pengetahuan tentang cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan agar pemanfaatan sumber daya ikan tetap lestari dan berkelanjutan. Upaya untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya mutlak diperlukan. Bila sumber daya ikan dan tingkat keanekaragaman hayatinya dapat dipertahankan kelestariannya, pemanfaatan sumber daya ikan akan terjamin. Hal ini juga dapat terwujud apabila masyarakat perikanan sadar akan hukum yang mengatur tentang masalah tersebut.

Untuk memonitor kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan, telah dilakukan pendataan dan pelaporan monitoring dan evaluasi (*Money CPUE*) pemanfaatan Sumber Daya Ikan Pelagis. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya ikan khususnya ikan pelagis di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Pembinaan dan pengawasan pasca panen merupakan salah satu kegiatan dalam rangka peningkatan mutu dan nilai jual produk hasil perikanan. Dengan pembinaan penanganan ikan yang baik, maka kita dapat menjaga hasil produksi nelayan dari penurunan mutu sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Disamping itu dengan penerapan penanganan ikan yang baik, pembeli dalam hal ini konsumen terlindungi dari akibat mengkonsumsi ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Untuk kesehatan nelayan, pihak pelabuhan perikanan telah menyediakan tempat balai pengobatan. Pelayanan pengobatan yang diberikan kepada para nelayan tidak dipungut biaya, dari hasil wawancara dengan petugas PPN Ternate diperoleh keterangan bahwa tenaga medis yang melayani adalah tenaga medis dari kantor kesehatan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Tetapi sampai penelitian berakhir tidak ada nelayan yang berobat pada balai pengobatan tersebut, sehingga tenaga medis yang ada di PPN Ternate ditarik kembali oleh instansi yang mengirim. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan petugas medis, selain dari itu para nelayan tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh PPN Ternate untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa dengan semakin tinggi pendidikan dan pendapatan para nelayan, semakin baik pula gizi anggota keluarga, akibatnya kesehatan keluarga nelayan semakin baik. Selain itu letak Poliklinik yang ada di kelurahan Bastiong Kerance jaraknya \pm 500 meter dari PPN Ternate (lebih dekat dengan tempat tinggal para nelayan). Menurut nelayan, lebih efisien jika berobat di Poliklinik.

b. Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawasan perikanan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dibangun sebagai tempat berlabuh (*landing*) dan tambat/merapat (*mooring*) kapal perikanan. Kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan. Pengembangan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas kolam labuh untuk kapal berukuran 5 GT- 30 GT memberikan banyak kemudahan dan keamanan bagi kapal ikan dan kapal pengawasan untuk berlabuh. Dermaga sebagai tempat sandar kapal

perikanan/pengawasan telah dibangun sebanyak 2 (dua) buah dalam bentuk jetty, dengan luas masing-masing dermaga I 560 m² dan dermaga II 846 m² dengan dilengkapi fasilitas air bersih, bahan Bakar Minyak (BBM) solar dan penerangan dengan menggunakan lampu merkuri. Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan/pengawasan telah dilaksanakan selama 24 jam.

Untuk kapal perikanan yang berukuran 5 – 20 GT diberikan tempat sandar/tambat pada kolam pelabuhan yang mempunyai kedalaman -2,5 m pada dermaga I dan II, sedangkan bagi kapal perikanan yang berukuran \geq 20 GT pada kedalaman kolam - 6 m. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam pengaturan olah gerak kapal dan memberikan keamanan bagi kapal-kapal yang berukuran kecil, sehingga benturan antara kapal besar dan kecil dapat dihindarkan. Dengan sistem pembagian besarnya Gross Tonase (GT) kapal yang bertambat juga memberikan ketertiban dan keindahan, sehingga mendukung fungsi K3 (Keamanan, ketertiban dan keamanan).

c. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dilengkapi dengan Tempat Pelelangan ikan (TPI) dan Pusat Pemasaran Ikan yaitu PT. Dwi Poli Perkasa, PT. Era Mandiri Cemerlang, UD. Hermanto, UD. Agus Mandiri dan UD. Irwan yang dapat menampung ikan hasil tangkapan yang didaratkan dan dipasarkan di pelabuhan perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate kurang dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pelelangan ikan. Hal ini disebabkan karena penyelenggara pelelangan dalam hal ini KUD Nelayan Bersatu, yang telah ditunjuk belum melaksanakan pelelangan secara optimal

dimana hasil tangkapan nelayan langsung dibongkar dan didaratkan ke perusahaan perikanan tanpa melalui tempat pelelangan yang ada. Sedangkan PPN Ternate sebagai pemilik sarana TPI hanya mendapat dana dari biaya tambat perahu/kapal sesuai tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 19 Tahun 2006.

Aktivitas pelelangan ikan untuk menentukan kelayakan harga ikan baik bagi produsen/nelayan maupun bagi pedagang masih belum berjalan dengan baik, dimana hanya dilakukan penimbangan saja atau pencatatan karena transaksi penjualan telah dilakukan oleh pemilik dan pedagang yaitu sudah adanya ikatan antara nelayan dengan pedagang setempat atau dikenal dengan istilah *dibo-dibo*. Sehingga apabila tidak segera diantisipasi dapat mengakibatkan monopoli perdagangan ikan secara sepihak yang berakibat rendahnya harga jual bagi produsen/nelayan dan berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan. Kendala yang dihadapi selamanya karena KUD tidak mampu mengambil alih penyedia modal/bakul. Keterkaitan nelayan dengan bakul disebabkan karena nelayan tidak mampu membeli perbekalan melaut secara kontan karena tingginya biaya operasional sehingga nelayan terikat pada pemilik modal. Peran PPN Ternate untuk mengatasi pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, perlu koordinasi bersama PEMDA Kota Ternate dan instansi terkait agar kinerja dalam melaksanakan sistem lelang dan pengelolaan TPI oleh KUD Nelayan Bersatu dapat menjadi lebih baik yaitu dengan jalan mengambil alih fungsi bakul/pemilik modal bagi nelayan oleh KUD. Jika kondisi tersebut dapat dicapai nelayan pasti akan mendapatkan harga yang wajar berdasarkan hasil lelang.

Peran pelabuhan perikanan juga berfungsi sebagai pusat pasar bagi hasil perikanan dan selakigus distribusi ikan ke daerah konsumen, maka perlu pembenahan sistem pelelangan yang belum berjalan secara optimal. PPN Ternate juga merupakan pusat distribusi ikan hasil tangkapan maupun pasar bagi produk perikanan yang didatangkan dari luar daerah dengan tujuan agar sampai kepada konsumen baik domestik maupun ekspor, dengan meminimalisir rantai pemasaran. Selain itu mendatangkan investor yang mengolah ikan tuna dengan cara loin dan merupakan pengembangan/diversifikasi usaha yang dilakukan oleh PT. Era Mandiri Cemerlang. Dengan demikian nelayan pemancing ikan tuna dapat mendapat harga ikannyang cukup baik, dengan catatan apabila ikan tuna masuk kualitas atau great "A" atau untuk ekspor sedangkan yang tidak memenuhi kualitas ekspor dapat dipasarkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

d. Pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan

Dalam era globalisasi dan persaingan dalam pemasaran produk perikanan akan semakin ketat sehingga segala upaya perlu dilakukan untuk penguatan daya saing di pasar internasional. Persaingan ini lebih di pacu dengan bergaungnya isu-isu global seperti " *food safety* ", isu lingkungan hidup dan sebagainya. Bagi konsumen di dalam negeri juga terlihat adanya kecendrungan, tuntutan terhadap mutu yang semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu keanekaragaman produk perikanan siap saji atau siap masak merupakan trend permintaan masyarakat di perkotaan. Permintaan produk perikanan terutama ikan segar dengan mutu yang baik untuk restoran dan hotel

juga semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan sanitasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan higienis, sehingga pada akhirnya akan mendukung perbaikan mutu produk perikanan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan serta tersedianya sarana pengolahan (*fish processing*) dan penyimpanan (*cold storage*) dalam kawasan pelabuhan perikanan sangat diperlukan karena menyangkut produk hasil perikanan yang akan dipasarkan. Pembinaan dan pengawasan pasca panen merupakan salah satu kegiatan dalam rangka peningkatan mutu dan nilai jual produk hasil perikanan. Dengan pembinaan penanganan ikan yang baik, maka kita dapat menjaga hasil produksi nelayan dari penurunan mutu sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Disamping itu dengan penerapan penanganan ikan yang baik, pembeli dalam hal ini konsumen terlindungi dari akibat mengkonsumsi ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Ikan adalah produk yang cepat rusak (*perishable food*) sehingga dalam penanganannya harus dilakukan secara cepat dan benar. Nelayan dan para pedagang ikan sebagai pihak pertama yang menangani komoditi ini perlu diekali pengetahuan dalam hal penanganan agar mutu ikan tetap segar sampai ketangan pembeli atau konsumen. Untuk tujuan tersebut telah dilaksanakan kegiatan pembinaan tentang cara penanganan ikan yang baik.

Perbaikan sanitasi di areal kawasan pelabuhan perikanan cukup optimal. Hal ini disebabkan cukup ketersediaan air bersih untuk keperluan pembersihan ikan dan meja tempat penjualan ikan di TPI, air bersih yang digunakan adalah air laut yang telah mengalami proses treatment dan ditampung pada bak

penampungan dengan kapasitas 10 m³. Masyarakat pengguna (penjual ikan) telah ditumbuhkan sikap kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan yaitu dengan diwajibkan membersihkan pada masing-masing tempat/meja jualan ikan setelah selesai berjualan, sehingga tidak memberikan kesan kekumuhan di dalam areal PPN. Disamping itu pihak PPN Ternate telah menyiapkan tempat sampah kering dan basah (kotoran ikan) disekitar TPI dan setiap pagi dan sore selalu dibersihkan oleh petugas kebersihan/karyawan honorer PPN Ternate.

Prioritas yang perlu ditingkatkan yaitu pengembangan prasarana pasca panen dan pengetahuan nelayan tentang pentingnya mutu hasil tangkapan. Hal ini dimaksudkan agar produk perikanan punya daya saing dan dapat meningkatkan mutu hasil produk perikanan tersebut serta akan berdampak pada pendapatan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan

Sebagai tempat berlabuh dan pendaratan ikan, PPN Ternate merupakan tempat pertama pencatatan kegiatan operasional kapal-kapal penangkap ikan. Selain itu pelabuhan perikanan sebagai tempat berkumpulnya nelayan, pedagang ikan dan pelaku ekonomi perikanan lainnya.

Kegiatan pencatatan data perikanan pada pelabuhan perikanan ini sangat penting dalam pengendalian penangkapan ikan agar tidak melebihi Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTb). Diperlukan kerjasama/koordinasi antar berbagai pihak terutama semua unit usaha dalam lingkup kawasan pelabuhan perikanan, dalam memberikan data yang diperlukan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan data statistik perusahaan tangkap di pelabuhan perikanan

dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung berjalannya Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), pencatatan data statistik yang akurat dan ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami data-data di pelabuhan dapat menunjang operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Juga produksi ikan yang didaratkan dapat dimonitor sehingga tidak mengurangi volume produksi Indonesia. Sistem yang ada akan terkait langsung dengan pelelangan dan pencatatannya, dimana lelang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

f. Pelayanan bongkar muat

Kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan selalu membutuhkan bahan perbekalan seperti BBM (solar), es, air tawar, bahan makanan dan lain-lain. Dengan adanya berbagai fasilitas fungsional yang ada di PPN Ternate seperti instalasi BBM, instalasi air tawar dan pabrik es dan depot logistik yang dikelola oleh Koperasi Mitra Mina, sangat membantu para nelayan dalam memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam penyediaan bahan perbekalan untuk melaut. Pelayanan PPN Ternate kepada nelayan untuk kebutuhan BBM (solar), air tawar dan es serta bongkar hasil tangkapan telah dilaksanakan selama 24 jam.

Selain dilengkapi kolam pelabuhan, PPN Ternate dilengkapi juga dengan fasilitas dermaga yang memberikan banyak kemudahan bagi kapal ikan untuk membongkar ikan hasil tangkapan. Dengan adanya dermaga maka hasil tangkapan lebih terjamin mutunya, selain itu peran pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan ikan antara lain adalah:

- a. penyediaan tenaga dan sarana pendaratan ikan;

- b. penyediaan alat angkut dan alat bongkar ikan hasil tangkapan;
- c. memberikan pelayanan teknis untuk pendaratan ikan.

Untuk itu diperlukan dermaga dan lantai dermaga sebagai kegiatan bongkar muat ikan yang didaratkan agar dapat lebih terjamin kualitasnya terhadap penurunan mutu ikan dan menjaga sanitasi lingkungan tempat pendaratan ikan.

Keuntungan yang diperoleh dengan adanya pelabuhan perikanan yaitu mengurangi biaya produksi karena tersedianya solar, air, es dan bahan perbekalan lainnya yang mudah diperoleh dengan jumlah yang cukup serta dengan harga yang cukup murah.

g. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan

Kegiatan nelayan untuk melaut memerlukan tempat dan fasilitas yang memadai, pelabuhan perikanan sebagai instansi pemerintah dan pelayan masyarakat terumata masyarakat perikanan (nelayan) wajib memenuhi semua kebutuhan tersebut, sebagai contoh tempat untuk bersandar dan berlabuh kapal, menyediakan BBM, air tawar, es, perbekalan untuk makan/sembako, alat tangkap dan lain lain. Selain itu kebutuhan administrasi, seperti : surat laik laut, Surat Ijin Berlayar (SIB), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP). Dengan adanya faktor pendukung tersebut, nelayan tidak repot lagi apabila ingin melaut. Sebab sdemua kebutuhan untuk operasional kapal sudah tersedia dengan baik pada setiap pelabuhan perikanan.

PPN Ternate sebagai instansi pemerintah yang merupakan pelayan masyarakat (publik service) telah berusaha memenuhi kebutuhan nelayan, yaitu bekerja sama dengan pihak investor/pengusaha untuk menyediakan semua

kebutuhan melaut bagi nelayan.

h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan

Kegiatan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) dilakukan melalui pengawasan berkala (patroli), pengisian Lembar Laik Operasional (LLO) serta pembentukan dan pembinaan system pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS). Dengan SISWASMAS yang dibentuk diperoleh manfaat kepedulian masyarakat untuk mengawasi wilayah perairan disekitarnya dan melaporkan kepada PPNS apabila ada penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang (*illegal fishing*), atau adanya kapal asing yang dicurigai mencuri ikan di perairan Maluku Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan aparat dari TNI - AL, Pol. Airud menggunakan kapal patroli atau menyewa kapal motor milik nelayan.

Selain itu juga menerbitkan perijinan bagi kapal-kapal perikanan serta pengamatan keliling di pulau-pulau yang ada di Propinsi Maluku Utara melalui jalur darat. Penanggulangan dan pencegahan tindak kriminal kelautan dan perikanan merupakan bagian dari kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang terkait dengan penanganan *illegal fishing*. Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan masih dijumpai berbagai kendala, antara lain rendahnya produktivitas, efisiensi dan daya saing usaha perikanan skala kecil, masih ditemukannya kasus-kasus *illegal fishing*, kurangnya perhatian sebagian daerah dalam hal pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, serta masih dijumpainya kelemahan dalam penerapan system pengendalian internal (pengawasan melekat dan pengawasan fungsional).

Personil Pengawas Perikanan di PPN Ternate adalah Pejabat Fungsional, secara teknis berada dibawah tanggung jawab Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Personil Pengawas Perikanan PPN Ternate berjumlah 3 orang. Kegiatan pengawasan telah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan kegiatan yang meliputi : kegiatan pemeriksaan dan penerbitan Surat Laik Operasional (SLO), operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di laut, pelaksanaan penyidikan dan pemberkasan perkara serta perbantuan pengurusan izin kapal perikanan.

Penerapan SLO dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No : 03/Men/2002 tentang Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (LBP). Kapal-kapal yang berada di lokasi PPN Ternate diwajibkan melapor sebelum melakukan aktivitas penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan dokumen. Bagi kapal yang laik diberi SLO sebagai dasar penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) oleh Syahbandar Perikanan. Data hasil penerapan SLO/LBP dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Penerapan SLO/LBP oleh Satker Pengawasan SDKP PPN Ternate selama tahun 2008

NO	JML KAPAL PER BULAN	YANG MENERBITKAN IZIN			JUMLAH
		PUSAT	PROVINSI	KAB / KOTA	
1	Januari	--	30	13	43
2	Pebruari	--	52	12	64
3	Maret	1	45	14	60
4	April	1	59	22	82
5	M e i	--	42	26	68
6	Juni	--	49	6	55
7	Juli	1	60	19	80
8	Agustus	--	51	22	73
9	September	3	46	24	73

NO	JML KAPAL PER BULAN	YANG MENERBITKAN IZIN			JUMLAH
		PUSAT	PROVINSI	KAB / KOTA	
10	Oktober	6	58	26	90
11	Nopember	--	113	36	149
12	Desember	--	74	37	111
	Jumlah	12	679	257	948

Sumber : Data Laporan Tahunan PPN Ternate (2009)

Operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dititik beratkan pada pengawasan sumber daya ikan, penertiban perizinan usaha perikanan serta perizinan kapal penangkap ikan.

i. Pelaksanaan kesyahbandaran

Agar daerah lingkungan kerja pelabuhan perikanan (DLKP) yang meliputi wilayah bandar (air) aman dan tertib diperlukan aturan dan mekanisme yang mengatur di wilayah tersebut. Adapun aturan yang meliputi wilayah bandar telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Didalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap kapal yang meninggalkan pelabuhan menuju pelabuhan lain/daerah penangkapan diwajibkan memiliki Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Jadi fungsi kesyahbandaran sangat penting dan berarti bagi kapal-kapal perikanan, terutama didalam melindungi hak-hak anak buah kapal (ABK) agar tidak semata menjadi buruh/pekerja tanpa ada jaminan dari pemilik kapal/juragan. PPN Ternate sejak tahun 2007 telah melaksanakan tugas syahbandar sendiri dan tetap berkoordinasi dengan syahbandar pelabuhan umum (A. Yani) Ternate.

Dengan beroperasinya syahbandar perikanan pada PPN Ternate membuat para nelayan lebih ringan dalam pengurusan surat-surat kapal maupun surat ijin

berlayar. Kemudahan ini membuat nelayan lebih nyaman dan cepat apabila akan melaut/ke fishing ground, sebab tidak harus mengurus lagi ke pelabuhan umum yang jaraknya cukup memakan waktu.

j. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan

Dalam rangka mensosialisasikan hasil teknologi yang telah dilaksanakan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), PPN Ternate telah turut aktif mengupayakan hasil riset tersebut dapat diaplikasikan oleh masyarakat perikanan khususnya nelayan. Dengan kemajuan teknologi penangkapan diharapkan para nelayan lebih mudah dan murah dalam mengoperasikan alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan serta dapat mengetahui gerombolan ikan/fishing ground lebih cepat dengan membaca peta daerah penangkapan yang disebarakan oleh petugas PPN Ternate yang diperoleh dari hasil pemantauan satelit NOAA-AVHRR dan Topex dari BRKP. Hasil yang dirasakan langsung oleh nelayan adalah daerah operasi penangkapan dapat cepat diketahui dan biaya operasional lebih hemat, sehingga dapat meningkatkan penghasilan para nelayan.

Peta Prakiraan daerah penangkapan ikan yang diakses melalui internet yang disebarakan kepada nelayan merupakan salah satu cara yang efektif dan ekonomis dalam hal kegiatan penyebaran informasi penangkapan ikan. Dengan informasi yang didapatkan ini, nelayan tidak perlu lagi berupaya mencari gerombolan ikan tetapi cukup dengan melihat potensi pada peta prakiraan daerah penangkapan ikan.

Kegiatan penyebaran peta prakiraan daerah penangkapan ikan (PPDI) ini dilaksanakan oleh petugas kesyahbandaran perikanan secara periodik melalui

pemberian informasi dan arahan kepada para nelayan. Terkait dengan pemanfaatan dari PPDI kepada nelayan, maka pemantauan respon balik dari peta tersebut sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi.

k. Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (k3), kebakaran dan pencemaran)

Peningkatan K3 secara koreprehensif telah dilaksanakan PPN Ternate agar pada tahun 2020 masuk dalam kategori Pelabuhan Perikanan dengan standar internasional dengan melakukan upaya sebagai berikut :

k.1 Kebersihan.

Pada tahun 2008 PPN Ternate telah mengalokasikan dana bagi 7 orang tenaga honorer, dan pada setiap sudut kompleks Pelabuhan Perikanan telah dibuat papan pengumuman "**Buanglah sampah pada tempatnya**", serta tempat sampah dari drum plastik. Sampah setiap hari dibuang oleh petugas kebersihan PPN Ternate ke TPS (tempat penampungan sementara) selanjutnya diangkut oleh mobil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ternate untuk dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir).

k.2 Ketertiban.

Untuk menjaga suasana tertib di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate telah dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP), maksud dari pembuatan SOP tersebut adalah agar setiap karyawan PPN Ternate yang melaksanakan tugas melayani pengguna jasa tetap disiplin sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi tertib administrasi dan tertib lingkungan.

Hasil kongkrit pelaksanaan tersebut yaitu telah dipasang rambu-rambu lalu lintas, parkir, batas kecepatan maximum dan papan tata tertib pada Pos Tambat Labuh serta papan yang bertuliskan himbauan agar tidak melaksanakan aktivitas non perikanan diatas jam 22.00 WIT. Dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan lalu lintas di areal pelabuhan perikanan berjalan dengan tertib dan lancar.

k.3 Keamanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate pada Tahun 2008 mempunyai tenaga keamanan sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 6 orang tenaga honorer/kontrak dan 3 orang dari TNI AL (atas permintaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate). Sistem jaga yang diterapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yaitu 1 orang dari TNI AL dan 3 orang dari intern Pelabuhan Perikanan dengan waktu jaga 1 x 24 jam.

4.3 Kinerja PPN Ternate dan Tingkat Pemanfaatan Oleh Masyarakat Pesisir

Kegiatan pembangunan PPN Ternate sejak tahun 2003 adalah pengembangan prasarana dan sarana pelabuhan juga bantuan sosial bagi masyarakat pesisir, tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan operasional pelabuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kinerja PPN Ternate dari tahun 2003 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada Tabel 4.13

Tabel 4.13 Kinerja PPN Ternate Dari Tahun 2003 s/d Tahun 2008

Tahun	Rincian Kegiatan	Volume	Keterangan
2003	- Pembangunan Gedung	5 unit	
	- Pembangunan Jalan Komplek	1.140 m ²	
	- Pembuatan Pagar BRC kawasan Pelb.	394 m	
	- Pengadaan Pompa Sanitasi Air	1 unit	
	- Pembuatan Meja Displai Penjualan Ikan	30 buah	- Disewakan ke pedagang ikan / dibo-dibo (optimal)
	- Rabat Lingkungan TPI	1.679 m ²	
	- Pembuatan Drainasi Pasar Ikan	120 m ²	
2004	- Pembangunan Menara Air	1 unit	
	- Pembuatan Instalasi Air bersih	100 m	
	- Pengadaan Timbangan Ikan	3 unit	
	- Pengadaan Keranjang Ikan	100 buah	- Disewakan ke nelayan & pedagang ikan (optimal)
	- Pengadaan Gerobak Ikan	12 unit	
	- Pembangunan Mini Plan Blue Crab	1 unit	
	- Pengadaan Cool Box	70 unit	- Bantuan untuk nelayan & pedagang ikan (optimal)
- Pengadaan Motor Bercool box	1 unit		
- Pelatihan Penanganan Ikan Diatas Kapal	30 orang		
2005	- Pembangunan Tagki Air Tawar Kap. 100 ton	1 unit	
	- Pembangunan Dermaga II	240 m ²	
	- Pembuatan Meja Displai Penjualan Ikan	16 buah	
	- Pembangunan Gedung Penyimpanan Runggu	210 m ²	
	- Pengadaan Mesin Ketinting	10 unit	- Bantuan untuk nelayan & pedagang ikan serta pengusaha rajungan (optimal)
	- Pengadaan Jaring Blue Crab	130 unit	
	- Pengadaan Sarana Pengolahan Rajungan	1 unit	
- Pengadaan Motor Bercool Box	3 unit		
- Pengadaan Trays/keranjang ikan	1.000 buah	- Disewakan ke nelayan & pedagang ikan (optimal)	
2005	- Perpanjangan Dermaga II	685 m ²	
	- Pembuatan & Peningkatan Jalan	1.095 m ²	
	- Pembuatan Pagar kawasan Pelb.	145 m	
	- Pembuatan mess operator	3 unit	
	- Perbaikan Jaringan Listrik	1 Paket	
	- Pembuatan Pagar BRC Sumur Bor	36 m	
	- Pengadaan Mesin Ketinting	15 unit	- Bantuan untuk nelayan & pedagang ikan serta pengusaha perikanan (optimal)
- Pengadaan Pancing Rawai	2 unit		
- Pengadaan Kapal Long Line	3 unit		
- Pengadaan Cool Box	10 buah		
- Pengadaan ABF (Air Blast Freezer)	1 unit		

Tahun	Rincian Kegiatan	Volume	Keterangan	
2006	- Pembangunan Dermaga Transit	84 m ²		
	- Pembangunan Mess Operator	46 m ²		
	- Pembangunan Gedung Bahan dan Alat Perikanan			
	- Perluasan Balai Pertemuan Nelayan	1 paket		
2006	- Pengadaan Peralatan Bengkel	1 buah		
	- Pengadaan Cool Box, kap. 4.600 ltr	10 buah	- Bantuan untuk nelayan & pedagang ikan (optimal)	
	- Pengadaan Jaring Milenium	100 pcs		
	- Pengadaan Jaring Nylon	100 pcs		
	- Pengadaan Bubu Blue Crab	1.000 buah		
	- Pengadaan Mesin Inboard	1 unit		
- Pengadaan Kapal Ikan 20 GT	2 unit			
2006	- Pembinaan KUB	30 orang		
	- Sosialisasi CCRF	30 Orang		
2007	- Pembangunan Mess Operator	2 unit		
	- Pembuatan Atap Dermaga Transit	1 paket		
	- Pengadaan Ice Can & Peralatan Bengkel	1 paket		
	- Pengadaan Perlengkapan Sanitasi TPI	1 paket		
	- Pengadaan Jaringan Internet	1 unit		
	- Pembangunan Mini Plant	1 paket	- Disewakan ke pedagang ikan / dibo-dibo (optimal)	
	- Pengadaan ABF	1 unit		
	- Pengadaan Peralatan Mini Plant	1 paket		
	2007	- Pengadaan Kapal Ikan 20 GT	1 unit	- Bantuan untuk nelayan & pedagang ikan (optimal)
		- Pengadaan Rumpon Pelagis Besar	2 unit	
		- Pengadaan Cool Box kap. 600 ltr	10 buah	
		- Pengadaan Cool Box kap. 280 ltr	7 buah	
2007	- Pembinaan & Pelatihan KUB	30 orang		
	- Pelatihan Penanganan Ikan Di Atas Kapal	30 orang		
	- Sosialisasi CCRF	30 orang		
	- Pelatihan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS)	30 orang		
2008	- Pengadaan Tanah Pengembangan Pelabuhan	60.606 m ²		
	- Perluasan Lahan Sumur Bor	988 m ²		
	- Pembangunan Selasar Dermaga ke TPI	1 buah		
	- Pembangunan Gudang	1 buah		
	- Pembuatan Pintu Air	2 buah		
	- Rehab Tempat Penjualan Ikan	1 unit		
	- Pengadaan Perlatan Bengkel	1 unit		
	- Pengadaan Alat Komunikasi	4 unit		
	- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2 unit		
	- Pengadaan Rumpon Laut Dalam	3 unit	- Bantuan untuk nelayan & pedagang ikan serta koperasi perikanan (optimal)	
	- Pengadaan Cool Box	5 buah		
	- Pengadaan Ketinting dan Mesin	5 buah		
	- Pengadaan Alat Penghemat Bahan Bakar	10 unit		

Tahun	Rincian Kegiatan	Volume	Keterangan
2008	- Pengadaan Lampu Celup Dalam Air (Lacuda) - Rehab Kapal Ikan - Pengadaan Logistik Untuk Depot Nelayan	5 unit 5 buah 1 paket	- Bantuan untuk nelayan & pedagang ikan serta koperasi perikanan (optimal)
	- Pelatihan Penanganan Ikan Di Atas Kapal - Pembinaan KUB - Sosialisasi CCRF - Pembinaan SISWASMAS	45 orang 30 orang 30 orang 30 orang	

Sumber : Data sekunder setelah diolah (2009)

Menurut petugas dari PPN Ternate, bantuan yang diberikan sejak tahun 2003 menggunakan sistem bergulir, artinya penerima paket bantuan (kelompok nelayan, kelompok pedagang/dibo-dibo) diwajibkan mengangsur dari nilai nominal barang yang tercantum dalam berita acara serah terima paket (kapal ikan, *cool box*, jaring, *motor hercool box*, ketinting, rumpon, dll). Selanjutnya uang yang terkumpul dari hasil angsuran tersebut di belikan/dibelanjakan barang (misal : alat tangkap ikan kapal penangkap ikan, *cool box*, dll) yang menjadi kebutuhan anggota dalam kelompok masing-masing (nelayan maupun pedagang) dan diserahkan keanggota dalam kelompok tersebut. Kelompok nelayan dan pedagang dibina oleh petugas dari PPN Ternate, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan/meningkatkan kesejahteraan para nelayan maupun para pedagang.

Dari hasil wawancara dengan para penerima paket bantuan, diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya mereka sanggup untuk mengangsur sehingga sistem bergulir dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kendala yang dihadapi umumnya hasil tangkapan ikan tidak menentu akibat cuaca buruk dan dengan kenaikan harga BBM solar/premium sangat memberatkan para nelayan, sehingga hasil dari nilai jual tangkapan ikan kadang-kadang tidak mencukupi untuk

angsuran, akibatnya sistem angsuran tidak berjalan sesuai kesepakatan/komitmen yang tertuang dalam berita acara serah terima. Hal ini terjadi pada penerima paket bantuan kapal penangkap ikan, alat tangkap ikan, ketinting dan rumpon. Tetapi menurut para penerima paket bantuan cool box, motor bercool box sistem angsuran tidak menemui kendala, hal tersebut disebabkan para penerima bantuan rajin untuk mengangsur, sehingga dalam waktu yang telah ditentukan (sesuai berita acara serah terima barang) lunas.

Menurut pengamatan peneliti, pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan maupun paket bantuan yang diberikan oleh PPN Ternate sudah optimal dilaksanakan dan berfungsi sesuai peruntukannya. Hal tersebut dapat ketahu dari laporan yang disajikan PPN Ternate bahwa seluruhnya dinyatakan 100 %, dan kenyataan fisik bangunan maupun barang yang diadakan serta realisasi penggunaan barang oleh para penerima paket bantuan. Masyarakat pesisir (nelayan, pedagang ikan, pengolah ikan) telah memanfaatkan parasarana dan sarana pelabuhan dengan cukup baik dan optimal, terlihat dari laporan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PPN Ternate setiap tahun meningkat (sumber : laporan tahunan, 2009) dan kenyataan kehidupan masyarakat pesisir sekitar pelabuhan semakin baik kualitasnya (pendapatan, pendidikan, dan kesehatan).

4.4 Perbedaan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Kegiatan pembangunan diwilayah pesisir pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih merata. Tujuan tersebut perlu diwujudkan dalam

rangka memperkecil masalah-masalah kesenjangan sosial, utamanya kesejahteraan sosial yang sering terjadi di wilayah pesisir. Masalah kesejahteraan ini diakibatkan oleh dua faktor yakni faktor eksternal dan internal. Faktor internal umumnya menunjuk pada sistem sosial yang mengandung gejala ketimpangan struktural dalam masyarakat. Ada segolongan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Sedangkan faktor eksternal antara lain termasuk intervensi program pemerintah, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai penyebab ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

Ada tiga kelompok masyarakat pesisir yang dijadikan objek penelitian untuk mengukur tingkat kesejahteraan di PPN Ternate. Kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat nelayan, pedagang/bakul dan pengolah. Indikator yang dijadikan pengukur tingkat kesejahteraan dimasing-masing kelompok yaitu tingkat pendapatan, tingkat konsumsi/pengeluaran, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kondisi perumahan dan fasilitas perumahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui apakah ada perbedaan dari keenam indikator tersebut pada sebelum dan sesudah pengembangan PPN Ternate. Dari analisis ini dapat diketahui bahwa dengan adanya pengembangan pelabuhan perikanan telah terjadi perubahan sosial ekonomi dalam rumah tangga masyarakat pesisir di sekitar PPN Ternate.

4.4.1 Tingkat Pendapatan

Dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat pesisir di kecamatan Kota Ternate Selatan, diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui penambahan pengetahuan dan modal kerja, hal ini dapat meningkatkan kreatifitas nelayan dalam melakukan usahanya.

Keadaan pendapatan perkapita keluarga nelayan dan non nelayan responden seperti dijelaskan pada Tabel 4.14. Variabel Pendapatan pada kategori tinggi lebih banyak terdapat nelayan yang diberdayakan yaitu 21 keluarga, pedagang 11 keluarga dan pengolah tradisional 9 keluarga serta pengolah modern 3 keluarga. Secara umum data ini menunjukkan bahwa nelayan dan non nelayan yang terlibat ko-manajemen (sesudah pengembangan) PPN Ternate mempunyai pendapatan yang lebih tinggi, untuk nelayan naik 147,36% yaitu rata-rata Rp1.050.000,- per bulan dibandingkan dengan nelayan sebelum adanya pengembangan dengan pendapatan rata-rata Rp712.500,-. Perbedaan ini disebabkan oleh besar dan ragam aktivitas yang dilakukan oleh nelayan yang diberdayakan lebih bervariasi sebagai keuntungan dari pelatihan dan bantuan yang didapatkan, seperti mendapatkan bantuan kapal penangkap ikan, alat tangkap ikan, rumpon, dan mesin kapal serta rehab badan kapal beserta mesin kapal. Untuk pedagang ikan hasil yang didapat setelah adanya pengembangan mencapai kenaikan 126,31 % yaitu dengan rata-rata pendapatan Rp600.000,- per bulan dibandingkan sebelum pengembangan dengan rata-rata Rp475.000,-. Hal ini disebabkan adanya pembinaan dan bantuan sarana seperti *cool box* serta fasilitas tempat jualan yang cukup representatif. Sedangkan bagi pengolah ikan secara tradisional (ikan asap) kenaikan penghasilan cukup tinggi yaitu 218,18% dari rata-rata Rp137.500,- sebelum pengembangan menjadi

Rp300.000,- sesudah adanya pengembangan. Bagi pengolah ikan secara modern kenaikan penghasilan yang didapat cukup tinggi yaitu 319,23% yaitu dengan rata-rata Rp2.075.000,- per bulan dibandingkan sebelum adanya pengembangan rata-rata dengan pendapatan Rp650.000,-. Perbedaan ini disebabkan dengan adanya penambahan sarana ruangan pendingin (*coldstorage* dan *airblast freezer* (ABF)) dengan kapasitas lebih besar. Yang dapat menampung hasil perikanan lebih banyak, sehingga pada musim puncak ikan yang diperoleh/ditangkap oleh nelayan semuanya dapat terserap/tertampung oleh para pengolah ikan (pengusaha ikan beku).

Tabel 4.14 Pendapatan per kapita per bulan di kawasan PPN Ternate sebelum dan sesudah pengembangan PPN Ternate

No.	Responden	Sebelum pengembangan (Rp)	Sesudah pengembangan (Rp)	Kenaikan (%)
1.	Nelayan	712.500	1.050.000	147,36
2.	Pedagang	475.000	600.000	126,31
3.	Pengolah tradisional	137.500	300.000	218,18
4.	Pengolah modern	650.000	2.075.000	319,23

Sumber: Data primer setelah diolah (2009)

4.4.2 Tingkat Konsumsi

Secara garis besar pengeluaran responden baik nelayan, pedagang/bakul maupun pengolah terdiri dari dua jenis yaitu untuk pangan dan bukan pangan, besarnya kedua pengeluaran ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan hidup dan pola konsumsi responden itu sendiri, yaitu nelayan sesudah pengembangan PPN Ternate rata-rata sebesar Rp625.000,- per bulan yang terdiri dari Rp375.000,- (60%) untuk pangan dan Rp.250.000,- (40%) bukan pangan.

Sedangkan sebelum pengembangan rata-rata sebesar Rp150.000,- yang terdiri dari Rp125.000,- (83,33%) untuk pangan dan Rp25.000,- (16,67%) non pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran bukan pangan semakin tinggi bila dibandingkan dengan data secara nasional untuk daerah pedesaan berdasarkan Susenas 2000 sebesar 30,74% yang berarti kesejahteraan nelayan relatif lebih baik. BPS (1987) bahwa kesejahteraan dikatakan makin baik apabila persentase pengeluaran pangan penduduk semakin kecil terhadap pengeluaran totalnya.

Apabila jumlah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota keluarga masing-masing, maka diperoleh pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp625.000,- atau dalam setahun Rp7.500.000,-; untuk nelayan setelah pengembangan. Sebelum pengembangan sebesar Rp150.00,- atau dalam setahun Rp1.800.000,-. Pengeluaran perkapita tersebut dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan dengan penentuan garis kemiskinan, dimana dalam penelitian ini kemiskinan didasarkan pada Sajogyo (1977) yang didasarkan pada pengeluaran perkapita per tahun yang diukur dengan nilai harga beras setempat. Pada saat penelitian ini dilaksanakan harga beras di Kecamatan Kota Ternate Selatan sebesar Rp6.500,-per kg, yang berarti nilai pengeluaran per kapita per tahun diatas atau setara dengan 1.153 kg beras, sedangkan menurut Sajogyo dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita per tahun hanya setara dengan 480 kg.

Tingkat konsumsi relatif tidak berbeda antara kedua kelompok responden pada kelompok pedagang pengeluaran perkapita per tahun diatas

atau setara dengan 830 kg beras, sedangkan untuk kelompok pengolah modern pengeluaran perkapita per tahun juga diatas atau setara dengan 1.523. Dari data-data diatas terlihat bahwa tingkat konsumsi dari ketiga kelompok semuanya diatas miskin dengan kata lain dapat dikatakan hidup sejahtera setelah adanya pengembangan PPN Ternate.

Tidak adanya perbedaan pada tingkat konsumsi, dimungkinkan oleh adanya kesadaran yang lebih baik dari nelayan dan non nelayan untuk menabung sebagian pendapatan seperti pada Tabel 4.15, yaitu :

Tabel 4.15 Keadaan Tingkat Konsumsi Responden (nelayan) Per Kapita Per Bulan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate

No.	Responden	Sebelum Pengembangan			Sesudah Pengembangan		
		Pangan (Rp.)	Non Pangan (Rp.)	Jmlh (Rp.)	Pangan (Rp.)	Non Pangan (Rp.)	Jmlh (Rp.)
1.	Nelayan	125.000	25.000	150.000	375.000	250.000	625.000
2.	Pedagang	150.000	25.000	175.000	375.000	75.000	450.000
3.	Pengolah tradisional	62.500	15.000	77.500	125.000	27.500	152.500
4.	Pengolah modern	375.000	100.000	475.000	650.000	175.000	825.000

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

4.4.3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Peningkatan pendidikan dapat mengentaskan penduduk dari kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui perbaikan pendapatan, nutrisi dan pengeluaran keluarga. Pendidikan dapat membuat seseorang berpikir secara rasional dan sistematis.

Seseorang yang memiliki pendidikan lebih tinggi tentunya akan lebih mampu menganalisis manfaat yang akan diperolehnya. Pendidikan formal keluarga nelayan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi dengan distribusi seperti pada Tabel 4.22 berikut. Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas pendidikan nelayan (76,20%) pada kategori sedang, artinya bahwa pendidikan bagi nelayan sudah menjadi kebutuhan demi peningkatan taraf hidup dan pola berpikir.

Tabel 4.16 Keadaan Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Nelayan		Pedagang		Pengolah tradisional		Pengolah modern		Jmlh (org)
		(org)	%	(org)	%	(org)	%	(org)	%	
1.	Tidak lulus SD	0	0	1	9,09	0	0	0	0	1
2.	SD	5	23,80	6	54,54	5	55,56	0	0	16
3.	SLTP	10	47,60	4	36,37	3	33,33	0	0	17
4.	SLTA	6	28,60	0	0	1	11,11	2	66,67	9
5.	Sarjana	0	0	0	0	0	0	1	33,33	1
Jumlah		21	100	11	100	9	100	3	100	44

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Secara keseluruhan dari responden, tingkat pendidikannya cukup baik, hal ini terlihat pada karakteristik responden yaitu dari 44 orang hanya 1 orang yang tidak tamat SD yaitu pada responden pedagang, 16 orang pendidikan tamat SD, 17 orang pendidikan tamat SLTP dan 9 orang pendidikan tamat SLTA serta 1 orang berpendidikan sarjana. Dari data tersebut, memberikan gambaran bahwa keluarga responden dapat berpikir secara lebih rasional dalam menganalisis manfaat yang akan diperolehnya.

4.4.4 Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat mencerminkan salah satu keberhasilan pembangunan dan sekaligus sebagai modal dalam pembangunan, karena dengan penduduk yang sehat diharapkan pembangunan dapat lancar. Oleh karena itu kesehatan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Berdasarkan BPS (susenas), kriteria sakit adalah berapa kali responden mengalami sakit dalam seminggu terakhir. Tingkat kesehatan dalam studi ini dikelompokkan kedalam 3 kategori yakni buruk (sering sakit : 1-2 kali dalam seminggu terakhir), sedang (kadang-kadang sakit : kadang sakit/tidak sakit dalam seminggu terakhir) dan baik (jarang sakit : tiak pernah sakit dalam seminggu terakhir) seperti pada Tabel 4.23, dimana dari kelompok keluarga responden terlihat berbeda jauh yaitu dari 21 keluarga nelayan 14 keluarga (66,68%) pada kategori baik (tidak ada anggota keluarga yang sering sakit), sedangkan pada kategori sedang 4 keluarga (19,04%) dan pada kategori buruk nelayan yang tidak terlibat hanya terdapat 3 keluarga (14,28%). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di kecamatan Kota Ternate Selatan juga sangat sadar akan pentingnya hidup bersih dan sehat, hal ini tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan misalnya pembersihan lingkungan dan usaha pengadaan air bersih untuk diminum. Pengetahuan tentang pentingnya kesehatan didapat dari berbagai program penyuluhan yang dilakukan seperti dari petugas kesehatan berupa dilaksanakannya Posyandu secara efektif. Disamping itu informasi kesehatan dapat diakses melalui acara-acara televisi

dan radio.

Tabel 4.17 Keadaan Tingkat Kesehatan Responden

No	Tingkat Kesehatan	Nelayan		Pedagang		Pengolah tradisional		Pengolah modern	
		(org)	%	(org)	%	(org)	%	(org)	%
1.	Sering Sakit	3	14,28	1	9,09	0	0	0	0
2.	Kadang2 sakit	4	19,04	3	27,27	2	22,22	0	0
3.	Tidak pernah/ jarang sakit	14	66,68	7	63,64	7	77,78	3	100
Jumlah		21	100	11	100	9	100	3	100

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

4.4.5 Kondisi Rumah

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting dalam pencapaian kehidupan yang layak, disamping sandang dan pangan serta kesehatan dan pendidikan. Namun demikian tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok akan perumahan tersebut. Bahkan tidak sedikit warga masyarakat yang tidak mampu memiliki rumah sepanjang hidupnya. Oleh karena itu kondisi perumahan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan; semakin baik kondisi rumah suatu keluarga adalah salah satu indikator semakin tingginya taraf hidup keluarga tersebut.

Kondisi perumahan nelayan responden dapat dilihat dari beberapa tolok ukur seperti jenis atap, bilik, status rumah, dan luas lantai yang dinilai dengan 3 (tiga) kriteria yaitu tidak permanen, semi permanen, permanen dengan perincian seperti pada Tabel 4.18 terlihat bahwa dari kelompok responden pada kategori permanen hanya 6 keluarga (28,57%) dari nelayan, sedangkan pada

kategori rumah semi permanen terdapat 10 keluarga (47,61%) yang tidak permanen 5 keluarga (23,82%). Secara umum terlihat adanya perbedaan kondisi rumah antara nelayan yang terlibat ko-manajemen dan yang tidak. Hal ini dimungkinkan oleh pendapatan yang tinggi dan tingkat kesadaran menabung lebih baik dari responden yang berarti memiliki perencanaan yang lebih baik.

Tabel 4.18 Kondisi Rumah Keluarga Responden

No.	Kondisi Rumah	Nelayan		Pedagang		Pengolah tradisional		Pengolah modern	
		(org)	%	(org)	%	(org)	%	(org)	%
1.	Permanen	6	28,57	4	36,36	0	0	1	33,33
2.	Semi Permanen	10	47,61	5	27,28	6	66,67	2	66,67
3.	Tidak Permanen	5	23,82	4	36,36	3	33,33	0	0
Jumlah		21	100	11	100	9	100	3	100

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

4.4.6 Fasilitas Rumah

Penerangan rumah dalam arti yang lebih luas adalah termasuk fasilitas yang ada didalamnya yang merupakan satu kesatuan yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan. Fasilitas rumah mencakup penyediaan air minum, jaringan saluran pembuangan, kamar mandi dan sebagainya yang kesemuanya penting bagi pemeliharaan kehidupan yang layak.

Fasilitas rumah yang dimaksud dalam studi ini adalah berdasarkan beberapa kriteria yang tercermin dari luas pekarangan, penerangan, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, kelengkapan alat rumah tangga (kulkas, radio, televisi) dan sarana MCK. Berdasarkan kriteria tersebut, fasilitas

rumah dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu tidak lengkap, semi lengkap, dan lengkap berdasarkan skor yang diperoleh dari kriteria tersebut diatas. Distribusi keadaan fasilitas rumah antara kedua kelompok rumah tangga responden dapat dilihat pada Tabel 4.19 dan 4.20, yaitu fasilitas rumah dari kedua kelompok rumah tangga responden berbeda jauh dimana pada kategori lengkap hanya 3 keluarga (10,3%) dari yang tidak terlibat ko-manajemen, angka ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang terlibat ko-manajemen yaitu sebanyak 17 keluarga (56,7%).

Sedangkan pada kategori tidak lengkap terjadi sebaliknya yaitu lebih banyak yang tidak terlibat 16 keluarga (53,3%) dan yang terlibat ko-manajemen hanya 4 keluarga (13,3%), adapun pada kategori semi lengkap keduanya berimbang.

Tabel 4.19 Kondisi Fasilitas Rumah Keluarga Responden (Nelayan dan Pedagang)

No	Fasilitas	Nelayan				Pedagang			
		lengkap		Kurang lengkap		lengkap		Kurang lengkap	
		(org)	%	(org)	%	(org)	%	(org)	%
1.	Pekarangan	12	57,14	9	42,86	2	18,18	9	81,82
2.	Penerangan	21	100	0	0	10	90,90	1	9,10
3.	Bahan Bakar untuk memasak	21	100	0	0	11	100	0	0
4.	Sumber Air Bersih	9	42,86	12	57,14	7	63,63	4	36,37
5.	Kelengkapan rumah tangga (kulkas, radio, televisi)	21	100	0	0	11	100	0	0
6.	MCK	9	42,86	12	57,14	7	63,63	4	36,37

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Tabel 4.20 Kondisi Fasilitas Rumah Keluarga Responden (Pengolah)

No	Fasilitas	Pengolah tradisional				Pengolah modern			
		lengkap		Kurang lengkap		lengkap		Kurang lengkap	
		(org)	%	(org)	%	(org)	%	(org)	%
1.	Pekarangan	0	0	9	100	3	100	0	0
2.	Penerangan	9	100	0	0	3	100	0	0
3.	Bahan Bakar untuk memasak	9	100	0	0	3	100	0	0
4.	Sumber Air Bersih	4	44,44	5	55,56	3	100	0	0
5.	Kelengkapan rumah tangga (kulkas, radio, televisi)	8	88,89	1	11,11	3	100	0	0
6.	MCK	4	44,44	5	55,56	3	100	0	0

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Dari data diatas terlihat bahwa keluarga yang terlibat ko-manajemen lebih banyak yang memiliki fasilitas rumah yang lebih lengkap dibanding dengan yang tidak terlibat, artinya ada perbedaan kelengkapan fasilitas rumah antara kedua keluarga. Fasilitas rumah yang lebih lengkap dimiliki oleh kelompok keluarga yang terlibat ko-manajemen tidak terlepas dari jumlah pendapatan dan keterampilannya.

Berdasarkan hasil analisis indikator kesejahteraan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

4.4.7 Pendapatan Rumah Tangga

Dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat pesisir di kecamatan Kota Ternate Selatan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan responden melalui penambahan pengetahuan dan modal kerja. Besarnya pendapatan responden sebelum pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate adalah rendah. Sedangkan sesudah

pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, pendapatan rumah tangga menjadi meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pekerjaan sampingan/tambahan yang dapat menambah pendapatan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nelayan sebelum adanya pengembangan pelabuhan perikanan lebih kecil dibandingkan setelah berkembang pelabuhan perikanan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pendapatan rata-rata responden per bulan untuk masyarakat nelayan sebelum adanya pengembangan, pendapatan sebesar Rp2.850.000,-, sedangkan setelah adanya pengembangan pelabuhan perikanan pendapatan rata-rata responden sebesar Rp4.200.000,-. Pendapatan rata-rata masyarakat pedagang/bakul ikan sebelum adanya pengembangan pelabuhan perikanan adalah Rp1.900.000,-, setelah adanya pengembangan pelabuhan perikanan menjadi Rp2.400.000,-. Sedangkan pendapatan rata-rata responden perbulan untuk masyarakat pengolah ikan modern sebelum pengembangan pelabuhan perikanan sebesar Rp2.600.000,- dan setelah pengembangan pelabuhan perikanan menjadi Rp8.300.000,-. Untuk lebih jelasnya pendapatan responden di lokasi penelitian dapat disajikan pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21 Pendapatan Responden di Kawasan PPN Ternate Per Bulan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate

No.	Responden	Sebelum pengembangan (Rp)	Sesudah pengembangan (Rp)	Kenaikan (%)
1.	Nelayan	2.850.000	4.200.000	147,36
2.	Pedagang	1.900.000	2.400.000	126,31
3.	Pengolah tradisional	550.000	1.200.000	218,18
4.	Pengolah modern	2.600.000	8.300.000	319,23

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Kondisi seperti ini dapat dipahami karena setelah adanya pengembangan pelabuhan perikanan ada peningkatan usaha dan kesempatan kerja yang semakin luas terutama bagi anggota keluarga dapat membantu mencari nafkah keluarga dengan bekerja sebagai tenaga kerja bongkar muat (TKBM), karyawan, pengurus kapal dan lain-lain. Diantara masyarakat pesisir, tingkat kenaikan pendapatan keluarga pengolah lebih tinggi dibandingkan keluarga nelayan dan keluarga pedagang/bakul. Hal ini disebabkan karena sebagian besar hasil olahan ikan dipasarkan sendiri sehingga ada nilai tambah serta kemampuan dalam mengelola usaha dan produktivitas kerjanya tinggi sehingga terbiasa sebagai usahawan dan pola hidupnya hemat serta dapat mengantisipasi permintaan pasar khususnya produk perikanan.

Demikian juga pendapatan keluarga pedagang/bakul dan nelayan mengalami kenaikan pendapatan. Tetapi keluarga bakul/pedagang kecil dan menengah berbeda dengan keluarga nelayan, dimana keluarga nelayan mempunyai

- a. kemampuan yang lemah dalam mengelola.
- b. keterampilan rendah.
- c. produktivitas kerjanya rendah.
- d. terbiasa sebagai buruh.
- e. pola hidup yang kurang hemat.

Salah satu upaya mengurangi permasalahan perilaku keluarga nelayan tersebut perlu difungsikan peranan KUD agar tidak mengarah ke sistem ijon sehingga dapat menurunkan tingkat pendapatan nelayan. Disamping itu, tidak

stabilnya harga ikan mengakibatkan kerugian para nelayan. Keadaan ini dapat diatasi apabila sistem pelelangan ikan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu PPN Ternate telah mengupayakan dengan memberangkatkan beberapa orang nelayan andalan dan pengurus KUD Nelayan Bersatu Ternate, magang di KUD yang telah berhasil dalam mengembangkan sistem lelang ikan yang ada di Jawa Tengah. Dengan harapan setelah memperoleh ilmu tentang manajemen pengelolaan pelelangan ikan dapat mengaplikasikan di PIN Ternate.

Agar pendapatan keluarga nelayan lebih meningkat maka langkah-langkah yang harus diambil sebagai berikut :

- a. Masyarakat nelayan perlu melengkapi sarana penangkapan ikan yang produktif sesuai dengan daerah tangkapan, baik ukuran kapal maupun alat tangkap yang digunakan;
- b. Perlu diusahakan sarana pengolahan hasil perikanan yang lebih maju serta dapat memenuhi kriteria permintaan pasar;
- c. Membebaskan nelayan dari ketergantungan biaya operasi dan biaya hidup pada para bakul dan pengijon.

Pengembangan pelabuhan perikanan berupa pembangunan prasarana dan sarana pendukung baik fisik maupun non fisik dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektifitas usaha perikanan, sarana pendukung fisik yang diperlukan yaitu unit pelelangan ikan. Sedangkan sarana pendukung non fisik, yaitu :

- a. Melakukan penyuluhan, pendidikan dan latihan secara teratur dan bertahap untuk membentuk masyarakat nelayan yang dapat beradaptasi dengan

kemajuan teknologi dan memiliki motivasi diri untuk maju dan mengembangkan diri.

- b. Sistem informasi pelabuhan perikanan lebih diintensifkan lagi agar berguna bagi masyarakat pengguna.

4.4.8 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga adalah seluruh pengeluaran anggota rumah tangga untuk mengkonsumsi makanan, perumahan, sandang dan barang/jasa. Secara garis besar pengeluaran rumah tangga terdiri dari dua jenis yaitu untuk pangan dan bukan pangan, besarnya kedua pengeluaran ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan hidup dan pola konsumsi rumah tangga itu sendiri. Pengeluaran untuk pangan (termasuk minum dan rokok/tembakau) dan bukan pangan (perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta). Pengeluaran rumah tangga masyarakat pesisir sebelum adanya pengembangan menunjukkan pola yang sederhana. Rata-rata pengeluaran responden perbulan sebelum pengembangan pelabuhan perikanan untuk nelayan sebesar Rp600.000,-, pedagang/bakul sebesar Rp700.000,-, pengolah tradisional Rp310.000,- dan pengolah modern sebesar Rp1.900.000,-.

Proporsi pengeluaran terbesar adalah untuk keperluan pangan. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan non pangan seperti pendidikan, kesehatan dan sosial masih terbatas. Hal ini disebabkan karena orientasi dari setiap responden masih mengarah pada pemenuhan kebutuhan makan (subsisten). Setelah adanya pengembangan PPN Ternate Bacan rata-rata pengeluaran responden untuk nelayan sebesar Rp2.500.000,-, pedagang/bakul

sebesar Rp1.800.000,-, pengolah tradisional Rp550.000,- dan pengolah modern Rp3.300.000,-. Menurut BPS (2007), untuk Kota Ternate pengeluaran rata-rata (Rp) nominal per kapita sebulan Rp179.896,-. Pengeluaran ketiga kelompok masyarakat pesisir di PPN Ternate baik nelayan, pedagang/bakul dan pengolah modern berada di atas rata-rata pengeluaran perkotaan (Ternate), hanya pengolah tradisional yang masih dibawah.

Pengeluaran untuk pemenuhan pangan tampaknya tidak semata-mata untuk karbohidrat saja tetapi lebih banyak untuk kebutuhan jajanan anak-anaknya. Kebutuhan makanan seperti lauk pauk umumnya dipenuhi dari hasil produksinya sendiri. Berdasarkan informasi responden bahwa pengadaan kebutuhan untuk air bersih relatif sedikit, karena air PDAM khusus digunakan untuk minum saja sedangkan mandi/cuci memakai air tanah/sumur. Pengeluaran lainnya seperti perbaikan rumah, transportasi, perawatan kesehatan dan pendidikan untuk sebagian nelayan buruh masih terbatas. Bahkan ada sebagian warga yang masih mendapat bantuan kartu sehat di Puskesmas dan beasiswa pendidikan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk bayaran selama setahun. Berdasarkan hasil penelitian, pola pengeluaran keluarga di kawasan PPN Ternate Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22 Pengeluaran Responden di Kawasan PPN Ternate Per Bulan

Responden	Pengeluaran Rumah Tangga Masyarakat Pesisir							
	Sebelum Pengembangan PPN Ternate				Setelah Pengembangan PPN Ternate			
	Pangan (Rp)	%	Non Pangan (Rp)	%	Pangan (Rp)	%	Non Pangan (Rp)	%
Nelayan	500.000	83,33	100.000	16,67	1.500.000	60	1.000.000	40
Pedagang/Bakul	600.000	85,71	100.000	14,29	1.500.000	83,33	300.000	16,67

Responden	Pengeluaran Rumah Tangga Masyarakat Pesisir							
	Sebelum Pengembangan PPN Ternate				Setelah Pengembangan PPN Ternate			
	Pangan (Rp)	%	Non Pangan (Rp)	%	Pangan (Rp)	%	Non Pangan (Rp)	%
Pengolah tradisional	250.000	80,65	60.000	19,35	400.000	78,43	110.000	21,57
Pengolah modern	1.500.000	78,95	400.000	21,05	2.600.000	78,79	700.000	21,21

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Data mengenai pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam kondisi pendapatan terbatas tentunya akan mendahulukan kebutuhan makanan sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi makanan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan sebaliknya terjadi peningkatan konsumsi bukan makanan, seperti perbaikan kondisi rumah dan menambah fasilitas rumah.

4.5 Pengaruh Pengembangan PPN Ternate Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

4.5.1 Indikator Tingkat Kesejahteraan Keluarga Masyarakat Pesisir di PPN Ternate

Untuk mengetahui apakah memang ada pengaruh tingkat kesejahteraan antara sebelum dan sesudah pengembangan bisa dilihat dari Analisis keeratan hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan dampak dari pengembangan pelabuhan perikanan. Adapun indikator tingkat kesejahteraan yang diuji sebagai berikut :

4.5.1.1 Tingkat Pendapatan Rumah Tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara absolut ada peningkatan pada tingkat pendapatan masing-masing responden sesudah pengembangan yaitu nelayan pada kategori tinggi dari 14 orang (66,7%) menjadi 17 orang (80,9 %), pedagang/bakul pada kategori tinggi dari 5 orang (45,5 %) meningkat menjadi 10 orang (91 %), dan pengolah tradisional pada kategori tinggi dari 3 orang (11,1 %) meningkat menjadi 9 orang (100 %) serta pengolah modern pada kategori tinggi tetap, yaitu tidak ada perubahan tetap 3 orang (100%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.23 berikut ini.

Tabel 4.23 Perbedaan Tingkat Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate

No.	Variabel	Sebelum		Sesudah	
		Orang	%	Orang	%
1.	Tingkat Pendapatan Perkapita				
	Nelayan :				
	Rendah (< 150.000)	6	28,6	3	14,3
	Sedang (150.000 - 200.000)	1	4,7	1	4,7
	Tinggi (> 200.000)	14	66,7	17	80,9
	Pedagang/Bakul :				
	Rendah (< 150.000)	5	45,5	1	9
	Sedang (150.000 - 200.000)	1	9	0	0
	Tinggi (> 200.000)	5	45,5	10	91
	Pengolah tradisional :				
Rendah (< 150.000)	1	11,1	0	0	
Sedang (150.000 - 200.000)	5	55,6	0	0	
Tinggi (> 200.000)	3	11,1	9	100	
Pengolah modern :					
Rendah (< 150.000)	0	0	0	0	
Sedang (150.000 - 200.000)	0	0	0	0	
Tinggi (> 200.000)	3	100	3	100	

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa, pada keempat kelompok responden mempunyai rata-rata tingkat pendapatan untuk masyarakat pesisir sesudah

pengembangan lebih tinggi dari pada sebelum pengembangan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat pesisir di sekitar PPN Ternate pendapatannya menjadi lebih baik.

4.5.1.2 Tingkat Pengeluaran/Konsumsi Rumah Tangga.

Menurut Sajogyo (1977), salah satu indikator untuk memperoleh gambaran rumah tangga miskin, apabila nilai perkapita per tahun lebih rendah dari setara 360 kg beras untuk pedesaan. Harga beras di lokasi pada waktu penelitian adalah sebesar Rp6.500,-/kg. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran/konsumsi rumah tangga sebelum dan sesudah pengembangan dapat dilihat pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24 Perbedaan Tingkat Pengeluaran Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate

No.	Variabel	Sebelum		Sesudah	
		Orang	%	Orang	%
2.	Tingkat Pengeluaran Keluarga				
	Nelayan :				
	Rendah (≤ 99.999)	3	14,3	2	9,5
	Sedang (100.000 - 149.999)	1	4,7	1	4,7
	Tinggi (≥ 150.000)	17	80,9	18	85,8
	Pedagang/Bakul :				
	Rendah (≤ 99.999)	3	27,2	3	27,2
	Sedang (100.000 - 149.999)	4	36,4	4	36,4
	Tinggi (≥ 150.000)	4	36,4	4	36,4
	Pengolah tradisional :				
	Rendah (≤ 99.999)	9	100	0	0
	Sedang (100.000 - 149.999)	0	0	3	33,3
	Tinggi (≥ 150.000)	0	0	6	66,7
	Pengolah modern :				
	Rendah (≤ 99.999)	0	0	0	0
Sedang (100.000 - 149.999)	0	0	0	0	
Tinggi (≥ 150.000)	3	100	3	100	

Sumber : data primer setelah diolah (2009)

Tabel 4.24 di atas menggambarkan peningkatan kesejahteraan keluarga pengolah tradisional pada kelompok tinggi setelah pengembangan mengalami peningkatan dari 0 orang (0 %) meningkat menjadi 6 orang (66,7 %).

4.5.1.3 Tingkat Pendidikan Keluarga.

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Tingkat pendidikan memiliki peranan yang cukup besar dalam proses penerapan teknologi dan inovasi baru. Umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin cepat penyesuaiannya terhadap suatu perubahan. Dengan tingginya pendidikan masyarakat pesisir kecenderungan semakin baik terhadap perbaikan kualitas hidup sehingga dapat meringankan penduduk dari kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat pendidikan yang dimiliki dalam pendidikan formal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Kriteria ini dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu : tinggi, sedang dan rendah. Kriteria **tinggi** apabila jumlah anggota keluarga lebih dari 60 % tamat SD atau ada yang tamat SLTA, **sedang** yaitu jumlah anggota keluarga 30 % - 60 % tamat SD atau ada yang tamat SLTP, dan **rendah** apabila jumlah anggota keluarga kurang 30 % tamat SD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keluarga nelayan, pedagang dan pengolah tradisional sebelum dan sesudah adanya pengembangan pelabuhan perikanan berpengaruh nyata. Hal ini ditunjukkan

pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25 Perbedaan Tingkat Pendidikan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate

No.	Variabel	Sebelum		Sesudah	
		Orang	%	Orang	%
3.	Tingkat Pendidikan Keluarga				
	Nelayan :				
	Rendah (< 30 %)	2	9,5	0	0
	Sedang (30 - 60 %)	17	81,0	0	0
	Tinggi (> 60 %)	2	9,5	21	100
	Pedagang/Bakul :				
	Rendah (< 30 %)	5	45,4	1	9,2
	Sedang (30 - 60 %)	5	45,4	6	54,5
	Tinggi (> 60 %)	1	9,2	4	36,3
	Pengolah tradisional :				
	Rendah (< 30 %)	1	11,1	0	0
	Sedang (30 - 60 %)	5	88,9	5	55,5
	Tinggi (> 60 %)	0	0	4	44,5
	Pengolah modern :				
	Rendah (< 30 %)	0	0	0	0
	Sedang (30 - 60 %)	0	0	0	0
	Tinggi (> 60 %)	3	100	3	100

Sumber : data primer setelah diolah (2009)

Melihat komposisinya pada kelompok tiga (tinggi) untuk nelayan, pedagang dan pengolah tradisional ada peningkatan sebesar 90,5 %, 27,1 % dan 44,5 %. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat pesisir sangat tinggi. Terbukti dari beberapa responden memberikan pernyataan bahwa anak-anak mereka sudah ada yang kuliah pada universitas negeri maupun swasta di Ternate.

4.5.1.4 Tingkat Kesehatan Keluarga.

Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberhasilan pembangunan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Kesehatan keluarga masyarakat pesisir akan mencerminkan tingkat

produktivitas penduduk. Apabila tingkat kesehatan para pekerja tidak mengalami gangguan kesehatan maka akan dapat bekerja secara optimal. Demikian juga apabila anggota keluarga kesehatannya baik maka pengeluaran rumah tangga akan ditekan, apalagi pada saat ini harga obat-obatan relatif mahal sehingga diperlukan dana/anggaran pengeluaran yang tidak sedikit untuk berobat.

Kriteria kesehatan pada penelitian ini dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu : sering sakit (buruk), jarang sakit (sedang) dan tidak pernah sakit (baik). Adapun tingkat kesehatan keluarga masyarakat pesisir di PPN Ternate dapat dilihat pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26 Perbedaan Tingkat Kesehatan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate

No.	Variabel	Sebelum		Sesudah	
		Orang	%	Orang	%
4.	Tingkat Kesehatan Keluarga				
	Nelayan :				
	Buruk (> 50 %)	5	23,8	3	14,2
	Sedang (25 - 50 %)	10	47,6	4	19,0
	Baik (< 25 %)	6	28,6	14	66,8
	Pedagang/Bakul :				
	Buruk (> 50 %)	3	27,3	1	9,0
	Sedang (25 - 50 %)	6	54,6	3	27,3
	Baik (< 25 %)	2	18,1	7	63,7
	Pengolah tradisional :				
	Buruk (> 50 %)	2	22,2	0	0
	Sedang (25 - 50 %)	4	44,4	2	22,2
	Baik (< 25 %)	3	33,4	7	77,8
	Pengolah modern :				
	Buruk (> 50 %)	0	0	0	0
	Sedang (25 - 50 %)	0	0	0	0
	Baik (< 25 %)	3	100	3	100

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan keluarga nelayan, pedagang dan pengolah tradisional/modern sebelum dan sesudah adanya pengembangan pelabuhan perikanan berpengaruh nyata. Terlihat dari prosentase kenaikan kondisi kesehatan keempat variabel bahwa sesudah pengembangan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk **nelayan** kesehatan keluarga buruk menurun 9,6 % kesehatan keluarga baik meningkat 38,2 %, **pedagang** kesehatan keluarga buruk menurun 18,3 % kesehatan keluarga baik meningkat 45,6 %, **pengolah tradisional** kesehatan keluarga buruk menurun 22,2 % (tidak ada yang buruk) kesehatan keluarga baik meningkat 44,4 %. Diantara keempat kelompok keluarga tersebut, keluarga **pengolah modern** menunjukkan tingkat kesehatan yang lebih baik. Berdasarkan Tabel 4.26, ternyata pengembangan pelabuhan perikanan memberikan dampak pada pemahaman masyarakat pesisir bahwa kesehatan sangat penting, yaitu seiring dengan perbaikan gizi dalam keluarga. Pemahaman tentang kesehatan ini lebih baik dari pada sebelum ada pengembangan.

4.5.1.5 Kondisi Perumahan Keluarga.

Salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan adalah papan atau perumahan. Informasi penting yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan rakyat untuk perumahan yaitu antara lain adalah jenis atap, lantai dan dinding. Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati menunjukkan semakin baik keadaan sosial

ekonomi rumah tangga (BPS, 1999).

Semakin sempit luas lantai rumah cenderung dianggap kurang sehat. Beberapa jenis penyakit mudah saling tertularkan diantara sesama anggota rumah tangga pada keluarga yang menghuni luas lantai yang sempit. Ini merupakan kesatuan lingkungan perumahan yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan.

Kondisi perumahan keluarga masyarakat pesisir sebelum dan sesudah pengembangan pelabuhan perikanan, menunjukkan adanya perbedaan hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27 Perbedaan Tingkat Kondisi Perumahan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate

No.	Variabel	Sebelum		Sesudah	
		Orang	%	Orang	%
5.	Tingkat Kondisi Perumahan				
	Nelayan :				
	Tidak Permanen	10	47,6	5	23,8
	Semi Permanen	8	38,1	10	47,6
	Permanen	3	14,3	6	28,6
	Pedagang/ Bakul :				
	Tidak Permanen	7	63,6	4	36,4
	Semi Permanen	4	36,4	3	27,2
	Permanen	0	0	4	36,4
	Pengolah tradisional :				
	Tidak Permanen	6	66,7	3	33,3
	Semi Permanen	3	33,3	6	66,7
	Permanen	0	0	0	0
	Pengolah modern :				
	Tidak Permanen	0	0	0	0
Semi Permanen	3	100	2	66,7	
Permanen	0	0	1	33,3	

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kondisi perumahan keluarga keempat kelompok responden berbeda secara nyata. Ini terlihat dari kondisi bangunan permanen masing - masing kelompok yaitu nelayan dari 3 rumah (14,3%) menjadi 6 rumah (28,6 %), pedagang dari tidak ada (0 %)

meningkat menjadi 4 rumah (36,4 %) dan pengolah modern dari 0 rumah (0 %) menjadi 1 rumah (33,3 %).

4.5.1.6 Fasilitas Perumahan Keluarga.

Fasilitas perumahan yang lengkap merupakan cerminan dari status sosial masyarakat pesisir di sekitar kawasan PPN Ternate, fasilitas yang dimaksud dalam studi ini adalah berdasarkan beberapa kriteria, yaitu luas pekarangan, penerangan, bahan bakar, sumber air, hiburan yang kesemuanya penting bagi pemeliharaan lingkungan. Menurut BFS (2000) kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Berdasarkan kriteria tersebut fasilitas perumahan dibagi menjadi tiga kelompok antara lain fasilitas rumah keluarga tidak lengkap, semi lengkap dan lengkap. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa keempat kelompok responden, fasilitas perumahan sebelum dan sesudah pengembangan berpengaruh secara nyata. Hal ini seperti terlihat pada Tabel 4.28 di bawah.

Tabel 4.28 Perbedaan Fasilitas Perumahan Sebelum dan Sesudah Pengembangan PPN Ternate

No.	Variabel	Sebelum		Sesudah	
		Orang	%	Orang	%
6.	Tingkat Fasilitas Perumahan				
	Nelayan :				
	Tidak Lengkap	5	23,8	0	0
	Semi Lengkap	13	61,9	12	57,1
	Lengkap	3	14,3	9	42,9

No.	Variabel	Sebelum		Sesudah	
		Orang	%	Orang	%
	Pedagang/Bakul :				
	Tidak Lengkap	3	27,3	0	0
	Semi Lengkap	7	63,6	4	36,4
	Lengkap	1	9,1	7	63,6
	Pengolah tradisional :				
	Tidak Lengkap	4	44,4	0	0
	Semi Lengkap	5	55,6	9	100
	Lengkap	0	0	0	0
	Pengolah modern :				
	Tidak Lengkap	0	0	0	0
	Semi Lengkap	0	0	0	0
	Lengkap	3	100	3	100

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas perumahan keempat responden pada dua kelompok, yaitu tingkat semi lengkap dan lengkap rata-rata mengalami peningkatan. Bagi nelayan pada kelompok lengkap meningkat dari 14,3 % menjadi 42,9 %, pedagang dari 9,1 % meningkat menjadi 63,6% dan kelompok pengolah tradisional/modern tetap. Dengan demikian pendapatan keluarga cenderung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

4.5.2 Tingkat Kesejahteraan Keluarga di PPN Ternate

Pembangunan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat kearah yang lebih baik, demikian pula pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dalam mendukung usaha yaitu agribisnis perikanan, merupakan salah satu pemberdayaan keluarga di daerah pesisir untuk meningkatkan taraf hidup yang

lebih baik dan merata. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dapat berasal dari internal yaitu masyarakat itu sendiri yang kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi yang ada. Sedangkan faktor eksternal antara lain intervensi program pemerintah yang membantu memberdayakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonominya.

Tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat pesisir (nelayan, pedagang dan pengolah) yang memanfaatkan fasilitas sebelum dan sesudah pengembangan berdasarkan indikator seperti yang diuraikan di atas, akan dibahas bagaimana pengaruh tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat pesisir sebagai akibat dari aktivitas mereka dalam kegiatan pemanfaatan fasilitas perikanan yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Tingkat kesejahteraan dibagi dalam 3 tingkatan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat kesejahteraan ini berdasarkan dengan pola pengeluaran perkapita per tahun menurut Sajogyo (1977), untuk masyarakat perkotaan dikategorikan miskin apabila pengeluaran perkapita per tahun sebesar 480 kg setara beras, berarti semakin tinggi pengeluaran perkapita akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir tersebut.

Distribusi tingkat kesejahteraan keluarga keempat kelompok masyarakat pesisir yang memanfaatkan fasilitas PPN Ternate dapat dilihat dalam Tabel 4.29.

Tabel 4.29 Distribusi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Masyarakat Pesisir di PPN Ternate

No.	Variabel	Sebelum		Setelah	
		Orang	%	Orang	%
	Tingkat Kesejahteraan Keluarga				
	Nelayan :				
	Rendah (skor 6 – 9)	31	24,6	13	10,3
	Sedang (skor 10 – 13)	50	39,7	28	22,2
	Tinggi (skor 14 – 18)	45	35,7	85	67,5
	Pedagang/Bakul :				
	Rendah (skor 6 – 9)	26	39,4	10	15,2
	Sedang (skor 10 – 13)	27	40,9	20	30,3
	Tinggi (skor 14 – 18)	13	19,7	36	54,5
	Pengolah Tradisional :				
	Rendah (skor 6 – 9)	23	42,6	3	5,6
	Sedang (skor 10 – 13)	25	46,3	25	46,3
	Tinggi (skor 14 – 18)	6	11,1	26	48,1
	Pengolah modern :				
	Rendah (skor 6 – 9)	0	0	0	0
	Sedang (skor 10 – 13)	3	16,7	2	11,1
	Tinggi (skor 14 – 18)	15	83,3	16	88,9

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Tabel 4.29 menunjukkan bahwa keempat kelompok masyarakat pesisir yang memanfaatkan fasilitas pangkalan pendaratan ikan sebelum dan sesudah pengembangan, pada tingkatan tinggi semua kelompok mengalami peningkatan yaitu nelayan dari 45 orang (35,7%) menjadi 85 orang (67,5 %), pedagang dari 13 orang (19,7 %) menjadi 36 orang (54,5 %) dan pengolah tradisional dari 6 orang (11,1 %) meningkat menjadi 26 orang (48,1 %) serta pengolah modern dari 15 orang (83,3 %) menjadi 16 orang (88,9 %).

Tabel 4.30 Variabel Indikator Kesejahteraan, Jumlah Responden pada Setiap Kelompok sesudah Pengembangan PPN Ternate.

Variabel	Kelompok (%)			
	Nelayan	Pedagang	Pengolah tradisional	Pengolah modern
Kesehatan baik	66,80	63,70	77,80	100
Pendapatan lebih dari pengeluaran	80,90	91,00	100	100
Pendidikan tinggi	100	36,30	44,50	100
Kondisi perumahan (permanen)	28,60	36,40	0	33,30
Fasilitas perumahan lengkap	42,90	63,60	0	100

Sumber : Data primer setelah diolah, 2009

Secara keseluruhan tingkat kesejahteraan keluarga pengolah modern lebih tinggi dari pada keluarga nelayan, pedagang, dan pengolah tradisional. Berdasarkan Tabel 4.30 terlihat bahwa tingkat pendapatan masyarakat pengolah modern lebih tinggi daripada tingkat pendapatan pedagang, pengolah tradisional maupun nelayan. Demikian juga dengan tingkat pengeluaran/konsumsi perkapita terbesar oleh masyarakat pengolah modern selanjutnya masyarakat nelayan, pedagang dan pengolah tradisional.

Tingkat pendidikan, baik nelayan maupun pengolah modern menduduki peringkat tertinggi disusul pengolah tradisional dan pedagang. Dari data tersebut dapat dilihat keseriusan masyarakat nelayan dalam memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya. Hal ini merupakan modal bagi kelanjutan pembangunan dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) di Ternate.

Tingkat kesehatan prosentasenya hampir sama antara pengolah, nelayan kemudian disusul pedagang. Hal tersebut disebabkan karena adanya

bantuan kartu sehat dari Puskesmas. Selanjutnya untuk kondisi perumahan masyarakat pedagang skornya tertinggi, diikuti pengolah dan nelayan. Hal tersebut disebabkan kondisi perumahan masyarakat pedagang sudah banyak yang bagus (permanen). Untuk pemenuhan fasilitas perumahan masyarakat pengolah modern menunjukkan skor tertinggi, berarti fasilitasnya lengkap pada masyarakat pengolah modern, kemudian diikuti pedagang dan nelayan serta pengolah modern.

Pengaruh adanya pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir, terlihat pada rata-rata pendapatan kelompok masyarakat pengolah modern mengalami peningkatan sangat tinggi, nelayan tinggi, pedagang cukup tinggi dan pengolah tradisional sedang. Hal ini disebabkan karena berkembangnya jumlah diversifikasi usaha dari para pengolah modern yang mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Misal sebelum ada pengembangan pelabuhan perikanan banyak masyarakat pesisir yang hidupnya hanya tergantung pada laut atau sebagai nelayan saja, bahkan hasil tangkapan yang melimpah tidak habis terjual. Selain harganya cukup murah, pasar tidak mendukung terjadinya transaksi jual beli. Namun setelah berkembangnya pelabuhan perikanan terdapat beberapa anggota masyarakat pesisir yang mempunyai jumlah usaha lebih dari satu mata pencaharian. Ada beberapa nelayan pemilik cenderung memiliki usaha lebih dari satu karena dapat membaca peluang usaha/pasar sehingga merangkap menjadi pedagang pengumpul untuk tujuan ekspor dan pasar lokal.

Hasil penelitian dari responden masyarakat pesisir yang memanfaatkan PPN Ternate dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, yaitu : pengadaan ABF (*Air Blast Freezer*), pengadaan kapal ikan, pembangunan *mini plan*, pengadaan *cool box*, pengadaan rumpon pelagis besar, dapat membantu masyarakat pengguna PPN Ternate dalam menambah pendapatan keluarga. Sebagai contoh pengadaan ABF dan *mini plan* yang dilengkapi *cool storage* kapasitas 50 ton dapat menampung hasil tangkapan nelayan yang melimpah, sehingga ikan dapat disimpan dan tidak terbuang secara percuma, sedangkan *cool box* dimanfaatkan oleh para pedagang ikan untuk menyimpan ikan yang diberi es balok, hal ini menyebabkan ikan tahan lama dan tetap segar, serta harga ikan tidak jatuh, pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Selain itu ternyata ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan pendapatan atau tingkat pengeluaran, masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan lebih baik memperoleh pendapatan lebih dari pengeluaran, sehingga dapat menyisihkan kelebihan tersebut untuk disimpan. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat tersebut lebih meningkat.

4.6 Strategi Pengembangan PPN Ternate Terhadap Masyarakat Pesisir

Untuk memberikan arahan strategi bagi kebijakan pengembangan PPN Ternate ke depan terhadap masyarakat pesisir dianalisis dengan analisis SWOT dengan melihat faktor internal dan eksternal. Lingkungan eksternal adalah peluang dan ancaman (*Opportunities dan Threats*) memberi pengaruh positif, sedangkan lingkungan internal kekuatan dan kelemahan (*Strengths dan*

Weaknesses) memberikan pengaruh negatif. Pada analisa SWOT dilakukan pembobotan dan scoring terhadap setiap faktor. Hasil analisa SWOT menunjukkan bahwa dari total skor faktor-faktor internal bernilai 2,45 terdiri dari pengaruh faktor kekuatan berjumlah 1,75 dan pengaruh faktor kelemahan dengan nilai 0,70. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.31 dibawah ini.

Tabel 4.31 Hasil Skor Faktor Strategi Internal

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
<u>Kekuatan</u>				
Potensi SDI di Kota Ternate	0,20	3	0,60	Data DKP Kota Ternate : Standing stock 71.757,38 ton; Dimanfaatkan baru 26,21 %
Potensi tenaga kerja	0,15	3	0,45	Tersedianya SDM yang terdidik dan potensial
Potensi sosial budaya	0,10	3	0,3	Kebiasaan makan ikan
Dukungan pemerintah/masyarakat	0,05	2	0,1	Pemda Kota Ternate dan masyarakat sekitar sangat apresiatif
Fasilitas prasarana dan sarana	0,10	2	0,2	Adanya pengembangan lahan industri 6,06 Ha
Keamanan yang kondusif	0,05	2	0,1	Terjaganya keamanan selama 24 jam.
Jumlah			1,75	

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
<u>Kelemahan</u>				
Terbelenggu aturan	0,05	2	0,10	Adanya PERDA yang saling tumpang tindih antara Pemda Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara
Tidak punya akses ke sumber modal	0,10	3	0,30	Kurangnya informasi Pasar dan investor
Posisi tawar rendah	0,10	3	0,30	Kurangnya publikasi dan promosi
Jumlah			0,70	
Total	1,00		2,45	

Sumber : Data Primer setelah diolah (2009)

Sedangkan total skor faktor eksternal bernilai 3,05 yang berasal dari faktor peluang senilai 2,25 dan faktor ancaman senilai 0,8. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.32 berikut ini.

Tabel 4.32 Hasil Skor Faktor Strategi Eksternal

Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
<u>Peluang</u>				
Penerimaan PINBP	0,20	3	0,60	Meningkatnya pendapatan pelabuhan perikanan
Ekspor/Permintaan Produksi	0,20	3	0,60	Peluang untuk memenuhi permintaan produk perikanan dari luar negeri
Diversifikasi Usaha	0,05	3	0,45	Adanya peluang usaha produk perikanan (pengalengan ikan, tepung ikan, ikan fillet, tuna loin)
Kesempatan Berusaha	0,10	3	0,30	Masih banyak usaha perikanan yang dapat dikembangkan

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
Wisata Bahari	0,10	2	0,20	Potensi alam yang indah dan asri yang belum dimanfaatkan
Pemanfaatan SDI Kota Ternate	0,05	2	0,10	Potensi sumberdaya ikan yang melimpah dan pemanfaatan baru 26,21 %
Jumlah			2,25	
<u>Ancaman</u>				
Konflik Masyarakat Pesisir	0,20	3	0,60	Dengan adanya nelayan pendatang dari Sulawesi dapat menimbulkan kecemburuan sosial
Pencemaran Lingkungan/Budaya	0,05	2	0,10	Pendatang dari luar Ternate (Jawa, Sulawesi) dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat setempat
Illegal Fishing (Penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab)	0,05	2	0,10	Banyaknya nelayan panboat (dari Philipina) yang menangkap ikan di perairan Maluku tanpa ijin
Jumlah			0,80	
Total	1,00		3,05	

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Dari informasi ini dilakukan perbandingan dan pertimbangan antara faktor internal dan eksternal. Selanjutnya ditentukan strategi yang paling tepat bagi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate. Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa strategi yang paling tepat bagi pengembangan PPN Ternate adalah memaksimalkan kekuatan dengan peluang-peluang yang ada

melalui bergesernya permintaan akan ikan sebagai sumber protein hewani dan sebagai tujuan daerah wisata bahari adalah Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha (SO), Peningkatan Kualitas SDM (WO), Peningkatan Kelembagaan (ST) dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (WT). Arah strategi ini dapat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal dapat disajikan pada Tabel 4.33 berikut ini.

Tabel 4.33 Interaksi Antara Faktor Internal dan Eksternal

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi SDI di Kota Ternate 2. Potensi tenaga kerja 3. Potensi Sosial Budaya 4. Dukungan pemerintah / masyarakat 5. Fasilitas prasarana dan sarana 6. Keamanan yang kondusif 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbelenggu aturan 2. Tidak punya akses ke sumber modal 3. Posisi tawar rendah
<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan PNBP 2. Ekspor/permintaan produksi 3. Diversifikasi usaha 4. Kesempatan berusaha 5. Wisata bahari 6. Pemanfaatan SDI Kota Ternate 	<p style="text-align: center;">STRATEGI (SO)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha ➤ Peningkatan prasarana dan sarana ➤ Peningkatan operasional pelabuhan perikanan 	<p style="text-align: center;">STRATEGI (WO)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kualitas SDM ➤ Peningkatan kerjasama/ jejaring dengan mitra bisnis ➤ Promosi produk perikanan
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran Lingkungan / Budaya 2. Konflik masyarakat pesisir 3. Illegal Fishing (penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab) 	<p style="text-align: center;">STRATEGI (ST)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kelembagaan ➤ Peningkatan pengawasan sumberdaya ikan ➤ Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan 	<p style="text-align: center;">STRATEGI (WT)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan masyarakat pesisir ➤ Pemberian bantuan modal usaha kerja ➤ Penyuluhan kepada masyarakat pesisir.

Sumber : Data primer setelah diolah (2009)

Dari beberapa set alternatif strategi tersebut kemudian dicari keterkaitan antar faktor dan nilai bobotnya. Kemudian ditentukan prioritas alternatif strategi

berdasarkan besar jumlah bobot : pertama peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, kedua peningkatan kualitas SDM, ketiga peningkatan kelembagaan dan keempat pemberdayaan masyarakat pesisir.

Anggapan masyarakat terhadap pengembangan pelabuhan perikanan telah memberikan manfaat serta keuntungan kepada mereka berupa peningkatan kesempatan kerja dan berusaha (SO). Strategi ini dapat ditingkatkan karena adanya peluang pemanfaatan potensi SDI atau Sosial budaya, adanya fasilitas sarana dan prasarana dan diversifikasi usaha sehingga berimplikasi membuka kesempatan kerja dan berusaha. Pembangunan perikanan yang dilaksanakan hendaknya dapat mengurangi pengangguran (*pro job*) dan menumbuhkan tenaga kerja baru, hal ini sesuai dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Mengingat tingkat pendidikan/ketrampilan rendah maka diperlukan peningkatan kualitas SDM (WO) berupa penyuluhan/sosialisasi dan pelatihan/ketrampilan agar dapat bersaing sehingga bila pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sumber daya manusia harus disiapkan dan ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang dan memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang semakin moderen. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka sumber daya ikan dapat terkelola dengan baik dan optimal, terutama wilayah perairan yang selama ini belum dikelola/dimanfaatkan oleh para nelayan. Dengan mengelola perairan tersebut, maka nilai jual hasil tangkapan (terutama ikan tuna) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (*pro growth*), hal tersebut

sesuai dengan himbauan pemerintah.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan kelembagaan yang ada di masyarakat pesisir supaya diperoleh perbaikan terhadap pelestarian lingkungan berupa sumberdaya ikan dan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (ST). Peran lembaga sosial sangat diharapkan dalam mendukung upaya yang telah digalakan pemerintah yaitu usaha penangkapan ikan menggunakan bahan dan alat yang ramah lingkungan.

Strategi ini diharapkan agar pemerataan hasil pemanfaatan pembangunan pelabuhan perikanan dapat dinikmati oleh masyarakat pesisir, sehingga dapat berimplikasi pada pengelolaan maka diperlukan pemberdayaan masyarakat pesisir (WT). Pemberdayaan masyarakat, yaitu pemerataan hasil pemanfaatan agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas (nelayan). Hal tersebut sesuai dengan program pemerintah, bahwa pembangunan perikanan harus ada keberpihakan terhadap masyarakat miskin (*pro poor*). Pemberdayaan komunitas nelayan harus dilakukan dengan tepat dan berangkat dari kultur yang ada. Penekanannya pada peningkatan kesadaran akar masalah dan potensi yang ada didalam dan sekitar komunitas.

Program kegiatan yang disarankan yaitu agar digalakkan hubungan kemitraan antara pihak investor (swasta) dengan masyarakat lokal, terutama bantuan yang sifatnya mendukung usaha yang kondusif terhadap kelangsungan usaha di kawasan PPN Ternate. Juga dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk kelembagaan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Koperasi Unit Desa (KUD) dan keikutsertaan tokoh-tokoh masyarakat,

dapat mengeliminir terjadinya konflik antara pemerintah, pengelola dan masyarakat pesisir dalam mengembangkan pelabuhan perikanan.

Keterlibatan masyarakat pesisir dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberadaan sumberdaya ikan di laut maupun menciptakan iklim yang nyaman dan sehat untuk berusaha. Untuk menciptakan ini tentunya tidak terlalu sulit mengingat lokasi pengembangan pelabuhan perikanan mulanya merupakan pusat konsentrasi nelayan a tinya berkembangnya pelabuhan karena difasilitasi oleh program pemerintah. Kondisi ini sangat menguntungkan sebab dapat membuka peluang kerja dan berusaha bagi masyarakat pesisir untuk ikut berpartisipasi dalam industri perikanan tangkap.

Kelembagaan yang ada pada kawasan PPN Ternate seperti : Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPPM3), Pegadaian Syariah dan Lembaga Keuangan Pemerintah diharapkan dapat mengangkat masyarakat pesisir dari ketidak berdayaan baik terhadap permodalan maupun posisi tawar yang rendah. Kelembagaan pemerintah sebagai pengelola keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut saling koordinasi dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan agar pengembangan PPN Ternate dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna khususnya nelayan buruh yang semakin tersisih dari persaingan usaha, permodalan dan keterampilan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir, baik positif maupun negatif. Pengaruh positif yaitu terjadi peningkatan usaha dan kesempatan kerja (*pro job*) atau lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat pesisir, hal ini berpengaruh pada tingkat pendapatan (*pro poor*). Adapun pengaruh negatif dari pengembangan pelabuhan perikanan yaitu terjadi persaingan usaha, konflik sosial dan ketersediaan sumberdaya ikan yang semakin berkurang.

Prospek pengembangan PPN Ternate menjadi lebih terarah bila pengembangan pelabuhan perikanan diselaraskan dengan memperkirakan daya dukung dan potensi sumberdaya ikan demi perbaikan taraf hidup masyarakat pesisir (*pro growth*).

1. Peranan dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate sangat dibutuhkan untuk mendukung usaha masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan. Adapun peranan yang telah dilakukan adalah sebagai pusat distribusi ikan; yang berkaitan dengan produksi perikanan; dan pusat kegiatan masyarakat nelayan. Sementara itu fungsi PPN Ternate yang telah dilaksanakan antara lain: pelatihan dan penyuluhan/sosialisasi, pemasaran ikan, perpustakaan perikanan, pelayanan sandar/tambat kapal, pelayanan bongkar muat, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan

dan pelaksanaan kesyahbandaran serta pengendalian lingkungan .

2. Dalam pengembangan PPN Ternate dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mengenai pendapatan, konsumsi rumah tangga, pendidikan, kesehatan, kondisi dan fasilitas perumahan masyarakat sekitar pelabuhan perikanan.
3. Masyarakat pesisir baik nelayan maupun non nelayan yang memanfaatkan PPN Ternate kesejahteraannya semakin meningkat, hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa pendapatan nelayan maupun non nelayan semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan tingkat pendidikan, kesehatan, konsumsi rumah tangga yang tidak hanya untuk keperluan pokok saja dan kondisi mapun fasilitas perumahan yang lebih baik.
4. Untuk meningkatkan operasional PPN Ternate dalam menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir dengan 4 (empat) strategi yaitu :
 - a. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
 - b. Peningkatan kualitas SDM
 - c. Peningkatan kelembagaan
 - d. Pemberdayaan masyarakat pesisir

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disarankan dan direkomendasikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Fungsi dan peranan PPN Ternate dapat lebih ditingkatkan terutama mengenai sistem lelang dan pola pemasaran ikan, yang ditunjang dengan peningkatan mutu ikan dan diversifikasi produk hasil perikanan yang laku di pasaran.

- b. Perlu penjabaran dari fungsi pelabuhan perikanan yang ada, supaya berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejalan dengan peningkatan kesejahteraan maka sumberdaya manusia sebagai pengguna pelabuhan perikanan agar lebih ditingkatkan peran, pengetahuan dan daya saing terhadap peluang kesempatan kerja dan berusaha.
- c. Pengembangan pelabuhan perikanan pada prinsipnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, karena itu diperlukan pemberdayaan masyarakat supaya lebih berpartisipasi dalam mengembangkan pelabuhan perikanan.
- d. Prasarana yang telah dimiliki PPN Ternate, lahan dengan luas 6, 06 Ha yang masih keadaan rawa sebaiknya lebih cepat dimatangkan dalam bentuk kawasan industri, agar lebih memberikan peluang usaha dibidang perikanan, terlaksananya program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan program Minapolitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bengen, D.G., (2000). *Teknik Pengambilan Contoh dan Analisis Data Biofisik Sumberdaya Pesisir*. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- BPS, (1987). *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS, (2001). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2001*. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS, (2008). *Data dan Informasi Kemiskinan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Budiharsono. S., (2001). *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Budiman Chr, Supratiwi, Debbby R.D., (2007). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Dahuri, R., (2000). *Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: LISPI bekerjasama dengan Ditjen P3K, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., Sitepu, M.J., (2001). *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- DEPTAN. (1992) *Petunjuk Teknis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dilingkungan Direktorat Jenderal Perikanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian.
- DKP. (2001). *Buku Manual Operasional Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- DKP. (2006). *Buku Petunjuk Teknis Pelabuhan Perikanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- DKP. (2009a). *Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2008*. Ternate: PPN Ternate, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- DKP. (2009b). *Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2008*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.

- Elfandi, SK., (2000). *Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan*. Seminar on Management of Activities and Fishing Port. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Kusumaatmaja, S., (2001). *Vitalisasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan*. Bahan Pidato Rapat Koordinasi. Makalah yang tidak dipublikasikan.
- Lubis, E., (2002). *Pengantar Pelabuhan Perikanan (Buku 1)*. Laboratorium Pelabuhan Perikanan Jurusan PSP. Makalah yang tidak dipublikasikan.
- Muluk, C., (1996). *Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir*. Makalah Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Makalah yang tidak dipublikasikan.
- Nikijuluw, V., (2002). *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: Kerjasama antara P3R dengan PT. Pustaka Cidesindo.
- Pemda Maluku Utara. (2003). *Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku Utara Tahun 2002*. Ternate: Departemen Dalam Negeri.
- Pemda Maluku Utara. (2007). *Sekilas Sejarah Maluku Utara*. Ternate: Departemen Dalam Negeri.
- Pemda Maluku Utara. (2008). *Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku Utara Tahun 2007*. Ternate: Departemen Dalam Negeri.
- Pemda Kota Ternate. (2008). *Lima Tahun Pembangunan Perikanan*. Ternate: Departemen Dalam Negeri.
- Pemda Kota Ternate. (2009). *Monografi Kecamatan Kota Ternate Selatan*. Ternate: Departemen Dalam Negeri.
- Rangkuti, Freddy., (2008). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sajogyo, (1977). *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Satria, A., (2002). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Singarimbun, M.,(1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soemarwoto, O., (2001). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Umar, H., (2003). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, UW., (1999). Determinan Sosial Ekonomi Peluang Migran Asal Jawa Timur Untuk Memperoleh Pekerjaan Pada Sektor Formal-Informal di DKI Jakarta. Diambil 10 Mei 2011, dari situs Word Wide Web
<http://eprints.ui.ac.id/id/eprint/9496>

Winoto, G., (2006). Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro*. Semarang.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 5. Foto-foto Penelitian



Foto 1 : Kapal Bertambat pada Dermaga I PPN Ternate



Foto 2 : Kegiatan ABK Membongkar Hasil Tangkapan (Ikan).



Foto 3 : Aktifitas Dibo-dibo (Pedaganglkan) pada saat pembelian ikan dari nelayan



Foto 4 : Es Balok (bahan kebutuhan melaut nelayan)



Foto 5 : Dermaga Transit (tempat bongkar ikan hasil tangkapan nelayan)



Foto 6 : Kapal Motor dengan bobot 421 GT bertambat di dermaga PPN Ternate Mitra Mas 5)



Foto 7 : Kondisi rumah nelayan : 1. Permanen

2. Tidak Permanen



Foto 8 : Kondisi rumah nelayan : 3. Permanen

4. Semi Permanen

Lampiran 6. Lay Out Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

